PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemeretaan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perangkat Daerah adalah unsut pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan Adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
18. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya RPJM Daerah adalah:

a. menjabarkan visi dan misi yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
b. pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya RPJM Daerah adalah :

a. memberikan gambaran evaluasi pencapaian indikator sasaran pokok Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
b. tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh Daerah selama 5 (lima) tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
c. tersajinya informasi mengenai potensi/kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan; dan
d. tersajinya informasi perencanaan Pembangunan Daerah selama periode 5 (lima) tahun berikut kerangka pendanaannya.

Pasal 4

(1) Sistematika RPJM Daerah Tahun 2025-2029 meliputi :
    a. Pendahuluan.
    b. Gambaran Umum Daerah.
    c. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
e. Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Wali Kota dalam rangka menyelenggarakan pembangunan di Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
c. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah; dan
d. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 7

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu berlakunya RPJM Daerah.
(2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat melakukan Perubahan RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 9

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-65/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI

FIRMAN ZEBUA, SH
PEMBINA
NIP. 19850111 201101 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang, dimulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RPJM Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah, yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional, serta berpedoman pada RTRW Daerah.

Penyusunan RPJM Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2025- 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR: 105

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen 7
1.4 Maksud dan Tujuan 10
1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD 11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 12
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 12
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 76
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 94
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 107
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 150
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah 178

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 Visi 193
3.2 Misi 194
3.3 Tujuan dan Sasaran 196
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan 203
3.5 Arah Kebijakan Tahunan 213
3.6 Program Prioritas Daerah 214

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1 Program Perangkat Daerah 238
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 291

BAB V PENUTUP
5.1 Kaidah Pelaksanaan 339
5.2 Pembiayaan Pembangunan 348
5.3 Kesimpulan 349

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan ...13
Tabel 2.2 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli 14
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli 15
Tabel 2.4 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara.....16
Tabel 2.5 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Utara 16
Tabel 2.6 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan 17
Tabel 2.7 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.....17
Tabel 2.8 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.....18
Tabel 2.9 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi 18
Tabel 2.10 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat.....19
Tabel 2.11 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Barat.....20
Tabel 2.12 Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.....20
Tabel 2.13 Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa 21
Tabel 2.14 Sturuktur Geologi Kota Gunungsitoli.....21
Tabel 2.15 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Gunungsitoli.....22
Tabel 2.16 Nama-nama Sungai di Kota Gunungsitoli 22
Tabel 2.17 Kondisi Curah hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....25
Tabel 2.18 Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....26
Tabel 2.19 Jenis Pengunaan Lahan 26
Tabel 2.20 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Gunungsitoli 28
Tabel 2.21 Kebutuhan Rumah Di Kota Gunungsitoli Pada Tahun 2043 39
Tabel 2.22 Proyeksi Kebutuhan Air Dan Ketersediaan Air Serta Status Daya Dukung Air Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029.....48
Tabel 2.23 Jumlah Produksi dan Konversi Bahan Pangan menjadi Energi di Kota Gunungsitoli.....50
Tabel 2.24 Konversi Produksi Bahan Pangan (103 Juta Kkal) dan Proyeksi Ketersediaan Pangan di Kota Gunungsitoli Tahun 2023- 2029 51
Tabel 2.25 Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Gunungsitoli Tahun 2023– 2029.....54
Tabel 2.26 Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029.....55
Tabel 2.27 Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029.....56
Tabel 2.28 Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli 59
Tabel 2.29 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Gunungsitoli 59
Tabel 2.30 Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029.....60
Tabel 2.31 Realisasi Indikator Lingkungan Hidup.....68
Tabel 2.32 Indeks Resiko Bencana Kota Gunungsitoli 71

Tabel 2.33 Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2024 73
Tabel 2.34 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020-2025.....73
Tabel 2.35 Jumlah Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan s.d tahun 2024.....74
Tabel 2.36 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....75
Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024 75
Tabel 2.38 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2024.....75
Tabel 2.39 Perkembangan Jumlah Tempat Ibadah Agama Tahun 2020-2024..76
Tabel 2.40 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 77
Tabel 2.41 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 78
Tabel 2.42 Perkembangan Laju Inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....80
Tabel 2.43 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....81
Tabel 2.44 Perkembangan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Gunungsitoli.....83
Tabel 2.45 Realisasi Indikator Urusan Kesehatan Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....84
Tabel 2.46 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024.....85
Tabel 2.47 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2024.....85
Tabel 2.48 Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024.....85
Tabel 2.49 Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2024.....86
Tabel 2.50 Angka Kematian Ibu (AKI) di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....86
Tabel 2.51 Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....87
Tabel 2.52 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024.....88
Tabel 2.53 Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Guru Kota Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024.....89
Tabel 2.54 Jumlah Kualifikasi Guru Yang Berkualifasi Pendidikan Menurut Jenjang Sekolah Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2024 89
Tabel 2.55 Jumlah Guru Aktif Yang Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik Menurut Jenjang Sekolah Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2024.....89
Tabel2.56 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024.....91
Tabel 2.57 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota

Gunungsitoli Tahun 2020-2024 92
Tabel 2.58 Perkembangan Indeks Budaya Lokal Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 93
Tabel 2.59 Perkembangan Indeks Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024 94
Tabel 2.60 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 95
Tabel 2.61 Perkembangan Industri Pengolahan di Kota Gunungsitoli 96
Tabel 2.62 Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kota Gunungsitoli 96
Tabel 2.63 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Pekerjaan/Kegiatan di Kota Gunungsitoli 97
Tabel 2.64 Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 98
Tabel 2.65 Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 98
Tabel 2.66 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2020-2024 ... 100
Tabel 2.67 Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 100
Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 100
Tabel 2.69 Indikator Urusan Wajib Penataan Ruang Kota Gunungsitoli Tahun 2024 101
Tabel 2.70 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 101
Tabel 2.71 Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 105
Tabel 2.72 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Gunungsitoli Tahun 2024 105
Tabel 2.73 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 107
Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 108
Tabel 2.75 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 108
Tabel 2.76 Capaian Pembinaan PMKS Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 ... 115
Tabel 2.77 Perkembangan Fasilitas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 116
Tabel 2.78 Capaian Indikator Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2024 116
Tabel 2.79 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2024 117
Tabel 2.80 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Gunungsitoli 131
Tabel 2.81 Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Gunungsitoli 133
Tabel 2.82 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019-2024 152

Tabel 2.83 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2019-2024 Kota Gunungsitoli 153
Tabel 2.84 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024.....156
Tabel 2.85 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca T.A.2020-2024 Kota Gunungsitoli.....158
Tabel 2.86 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli.....164
Tabel 2.87 Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 166
Tabel 2.88 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030 Kota Gunungsitoli 171
Tabel 2.89 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli.....174
Tabel 2.90 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (2025 s/d 2030) Kota Gunungsitoli.....175
Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 198
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 .204
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029.....213
Tabel 3.4 Rencana Aksi Program Prioritas Kesehatan Terjamin 215
Tabel 3.5 Rencana Aksi Program Prioritas SDM Tangguh 219
Tabel 3.6 Rencana Aksi Program Prioritas Ekonomi Cemerlang.....222
Tabel 3.7 Rencana Aksi Program Prioritas Birokrasi Beritegritas 227
Tabel 3.8 Rencana Aksi Program Prioritas Infrastruktur Mantap 231
Tabel 3.9 Matriks penyelarasan arah pembangunan RPJMD Kota Gunung Sitoli dengan sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD.....233
Tabel3.10 Dukungan Program Daerah terhadap 6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.....235
Tabel3.11 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 236
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah, Indikator Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2029.....239
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025-2029 292
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030.....295

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita ADHB Kota Gunungsitoli Tahun 2020 s.d. 2024 79
Grafik 2.2 Indeks Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2020 s.d. 2024 80
Grafik 2.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2024.....81
Grafik 2.4 Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli Tahun 2018-2024.....83
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2019-2024.....90
Grafik 2.6 Proporsi Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024 Kota Gunungsitoli 155
Grafik 2.7 Gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli 164

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....300
Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN.....303
Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD.....304

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setalah dilantik. Untuk itu, visi dan misi serta program kerja Kepala Daerah tersebut selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Dokumen visi-misi dan program kerja dimaksud merupakan dokumen yang sangat strategis dan penting karena memuat janji pasangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada rakyat, yang harus diwujudkan pada akhir periode jabatan apabila pasangan tersebut terpilih.

Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam dalam penyusunan RPJPD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan Skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.

Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
2. RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, mencakup pendahuluan, analisis gambaran umum daerah, visi, misi dan program prioritas pembangunan, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 104);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanatkan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dikoordinasikan, disinergikan serta diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Gunungsitoli dan RTRW, dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RTRW Kabupaten/Kota lain disekitarnya agar tercipta sinergitas perencanaan dalam pembangunan kewilayahan, serta kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan Rancangan Awal RPJMD juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dipakai sebagai dasar penentuan permasalahan dan isu strategis, yang merupakan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

1. **Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN**

   Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN yang perlu mendapatkan dukungan dari Kota Gunungsitoli juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029.

2. **Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara**

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Gunungsitoli.

3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kota Gunungsitoli

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah Gunungsitoli Hebat, Maju dan Berkelanjutan. Pada tahapan ini, arah kebijakan untuk perencanaan Tahun 2025–2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi, terutama :

a. Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial.
b. Peningkatan produktivitas, penataan destinasi pariwisata, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
c. Peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan penerapan riset dan inovasi.
d. Peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat dan lembaga demokrasi yang kuat.
e. Optimalisasi kerukunan umat beragama dan meningkatkan peran keluarga dalam peningkatan pembangunan kebudayaan.
f. Pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan di wilayah terluar Kota Gunungsitoli.
g. Peningkatan layanan air bersih, sanitasi, dan persampahan.
h. Peningkatan Pembangunan yang ramah lingkungan.

4. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kota Gunungsitoli

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP serta program strategis nasional. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan

prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

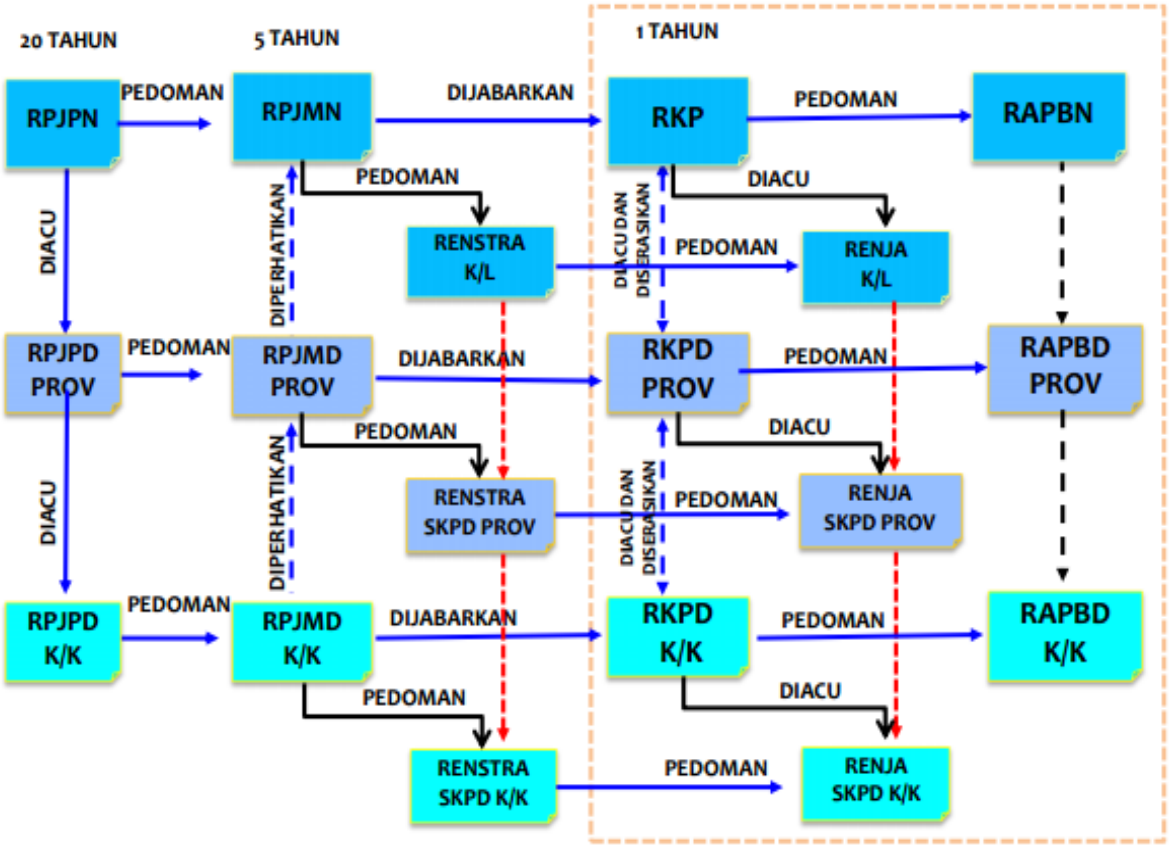

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

6. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain RAD Sustainable Development Goals (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD yaitu untuk menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam periode 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data dan informasi yang relevan dan penting terkait gambaran umum kondisi daerah baik pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah serta Aspek Pelayanan Umum;
2. Menelaah, menyajikan dan menyajikan hasil evaluasi rencana pembangunan lima tahunan (RPJMD) untuk memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam dokumen rencana tahunan (RKPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana pembangunan yang disusun;
3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam pelaksanaan Urusan;
4. Menelaah dan menganalisis kekuatan dan potensi daerah untuk menjawab permasalahan dan isu- isu strategis daerah guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai refleksi cita-cita bersama masyarakat.

1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan, menjelaskan secara singkat hubungan antara dokumen RPJMD dengan RPJPD 2025-2045 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan, serta menjelaskan sistematika RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi pencapaian SPM, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis daerah

BAB III. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi dan misi daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas daerah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan tentang program-program perangkat daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V. PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substantsial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya dalam pencapaian sasaran Pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu upaya strategis yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian, peningkatan aksesibilitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila ditinjau dari Posisi Geostrategis Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Nias memiliki posisi strategis dan dapat menjadi kutub pertumbuhan wilayah karena letak geografisnya diapit oleh 4 (empat) Kabupaten di Kepulauan Nias. Oleh karena itu, pembangunan di Kota Gunungsitoli mencakup berbagai sektor yang saling terintegrasi.

Pembangunan Kota Gunungsitoli yang telah dilaksanakan melalui proses yang dinamis dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan fokus pada pembangunan pada sumber daya manusia tangguh, kesehatan terjamin, ekonomi cemerlang, birokrasi berintegritas dan infrastruktur mantap, Kota Gunungsitoli dapat memanfaatkan potensi dan posisi strategis yang dimilikinya untuk menjadi kota yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten/kota di pantai barat Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi kedepan dapat dilaksanakan dengan Perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan segala aspek untuk dapat tercapai.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Gunungsitoli terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah 469,36 km2, atau mencapai 0,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas wilayah administrasi Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Sitolu Ori);
2. Selatan : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Gido dan Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias);
3. Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;

4. Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias (Kecamatan Hiliduho), dan wilayah Kabupaten Nias Utara (Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Kecamatan Namohalu Esiwa).

Secara astronomis, Kota Gunungsitoli terletak di antara 00°12'-1°32' Lintang Utara (LU) dan 970°00'-980°00' Bujur Timur (BT), memiliki kondisi bentang alam yang bervariasi didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai dengan ketinggian 0 - 600 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari Posisi Geostrategis Kota Gunungsitoli sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kepulauan Nias memiliki posisi strategis karena letak geografisnya diapit oleh 4 (empat) Kabupaten di Kepulauan Nias. Kota Gunungsitoli merupakan pusat perdagangan dan jasa serta pintu masuk dan keluar Pulau Nias melalui Bandara Udara Binaka, Pelabuhan Angin Gunungsitoli dan Pelabuhan Roro Desa Siwalubanua II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Secara administratif Kota Gunungsitoli terdiri atas 6 (enam) Kecamatan, 98 (sembilan pulu delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 :
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)	Rasio Terhadap Luas (%)
1.	Gunungsitoli	29	3	109.09	23.24
2.	Gunungsitoli Selatan	15	-	56.85	12.11
3.	Gunungsitoli Utara	10	-	79.73	16.99
4.	Gunungsitoli Idanoi	26	-	134.78	28.72
5.	Gunungsitoli Alo'oa	9	-	60.21	12.83
6.	Gunungsitoli Barat	9	-	28.70	6.11
JUMLAH		**98**	**3**	**469.36**	**100.00**

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2025

Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat menguraikan informasi mengenai potensi dan kendala fisik perkembangan suatu zona/wilayah. Kondisi topografi Kota Gunungsitoli secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara berada pada ketinggian/elevasi 0-300 meter di atas permukaan laut. sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Ketinggian (mdpl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Miga	46,91	33,26	11,03	-	-	-
2	Sihareo II	9,43	51,57	136,89	-	-	-
3	Ilir	79,82	-	-	-	-	-
4	Sifalaete Tabaloho	47,06	84,65	0,45	-	-	-
5	Dahana	121,10	45,54	32,30	5,31	-	-
6	Sisobahili Tabaloho	40,67	43,82	13,93	-	-	-
7	Dahadano Gawu-gawu	30,38	31,26	46,40	-	-	-
8	Lasara Bahili	41,55	13,28	-	-	-	-
9	Mudik	45,51	-	-	-	-	-
10	Boyo	62,93	16,96	-	-	-	-
11	Hilinaa	119,03	9,34	9,21	0,25	-	-
12	Lelewonu Nikootano	6,73	21,87	28,25	43,51	63,06	1,76
13	Simandraolo	-	-	-	44,51	110,65	90,16
14	Madolaoli	-	-	0,18	75,13	33,45	-
15	Sisarahili Sisambualahe	-	-	4,52	107,03	16,41	-
16	Onowaembo	7,48	25,43	32,79	142,18	4,47	-
17	Fadoro Lasara	-	42,49	64,46	10,22	-	-
18	Tuhemberua Ulu	10,73	26,02	26,90	26,98	-	-
19	Onozitoli Sifaoroasi	10,58	30,83	12,29	1,77	-	-
20	Pasar Gunungsitoli	57,92	3,89	-	-	-	-
21	Saombo	32,68	6,16	-	-	-	-
22	Iraonogeba	-	30,14	58,80	24,35	-	-
23	Ombolata Ulu	41,99	45,65	0,96	-	-	-
24	Moawo	78,03	77,92	0,25	-	-	-
25	Saewe	77,22	98,68	15,63	-	-	-
26	Sifalaete Ulu	-	36,31	113,55	1,25	-	-
27	Hilimbaruzo	-	33,78	44,11	42,77	1,54	-
28	Hilihao	70,39	68,94	40,50	-	-	-
29	Sisarahili Gamo	66,03	85,64	17,23	-	-	-
30	Bawodesolo	101,43	157,12	31,35	-	-	-
31	Onozitoli Olora	130,66	95,63	14,26	-	-	-
32	Madula	172,45	88,41	29,73	8,74	-	-
JUMLAH		**1.508,71**	**1.304,59**	**785,97**	**534,00**	**229,58**	**91,92**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli

No	Nama Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Miga	23,82	23,76	23,42	17,69	2,51
2	Sihareo II	44,46	61,53	52,26	37,38	2,26
3	Ilir	62,45	12,28	4,30	0,79	-
4	Sifalaete Tabaloho	44,78	36,62	30,25	19,45	1,06
5	Dahana	46,79	50,47	57,19	46,35	3,46
6	Sisobahili Tabaloho	23,21	29,83	32,90	12,13	0,35
7	Dahadano Gawu-Gawu	17,50	29,50	35,44	24,05	1,55
8	Lasara Bahili	16,21	11,85	13,06	12,16	1,53
9	Mudik	28,02	8,68	5,27	3,16	0,40
10	Boyo	25,91	25,31	17,92	10,62	0,14
11	Hilinaa	53,88	40,83	17,79	19,06	6,26
12	Lelewonu Nikootano	23,83	43,57	55,71	40,68	1,39
13	Simandraolo	103,85	52,01	62,07	23,34	4,06
14	Madolaoli	15,46	31,74	43,30	18,08	0,19
15	Sisarahili Sisambualahe	20,82	42,86	43,26	18,00	3,01
16	Onowaembo	32,38	51,10	56,45	43,24	29,18
17	Fadoro Lasara	14,88	28,06	36,27	31,51	6,45
18	Tuhemberua Ulu	12,04	11,11	17,43	32,81	17,24
19	Onozitoli Sifaoroasi	112,98	78,26	39,80	9,52	-
20	Pasar Gunungsitoli	31,67	12,75	9,11	7,83	0,45
21	Saombo	8,50	10,06	12,38	7,12	0,78
22	Iraonogeba	36,62	43,13	25,46	7,55	0,55
23	Ombolata Ulu	27,87	25,99	17,18	15,98	1,59
24	Moawo	51,51	50,94	29,65	21,07	3,03
25	Saewe	65,06	59,35	41,64	22,44	3,03
26	Sifalaete Ulu	48,43	51,81	34,08	13,89	2,90
27	Hilimbaruzo	16,87	23,89	29,11	31,99	20,35
28	Hilihao	73,77	66,18	29,25	10,51	0,12
29	Sisarahili Gamo	55,48	58,88	34,90	18,79	0,86
30	Bawodesolo	103,41	100,59	66,79	17,50	1,61
31	Onozitoli Olora	112,98	78,26	39,80	9,52	-
32	Madula	57,01	78,37	94,51	64,63	4,82
JUMLAH		**1302,93**	**1261,18**	**1087,43**	**680,82**	**122,46**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.4
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Ketinggian (mpdl)				
		0-50	50-100	100-150	200-250	250-300
1	Hiligodu Ulu	41,33	134,24	79,63	-	-
2	Hilimbowo Olora	160,95	104,15	2,35	-	-
3	Olora	255,30	1,22	-	-	-
4	Gawu-Gawu Bouso	513,14	0,98	-	-	-
5	Loloanaa/lolomoyo	123,40	298,79	52,77	-	-
6	Lasara Sowu	137,07	184,96	114,63	68,46	13,53
7	Hambawa	291,97	600,72	451,56	114,24	2,95
8	Tetehosi Afia	529,61	130,37	42,25	-	-
9	Afia	401,64	12,68	-	-	-
10	Teluk Belukar	928,36	146,32	46,92	-	-
JUMLAH		**3382,77**	**1614,43**	**787,41**	**182,70**	**16,48**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.5
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Utara

No	Nama Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Hiligodu Ulu	49,69	86,47	89,67	26,42	0,24
2	Hilimbowo Olora	55,66	83,75	88,78	38,32	0,94
3	Olora	147,45	78,14	26,06	4,11	0,77
4	Gawu-Gawu Bouso	328,69	144,05	35,34	6,05	-
5	Loloanaa/lolomoyo	131,25	169,58	125,74	46,61	1,77
6	Lasara Sowu	99,81	136,36	166,62	104,88	10,99
7	Hambawa	217,49	454,63	606,51	160,07	22,76
8	Tetehosi Afia	353,28	205,60	105,32	37,51	0,53
9	Afia	252,49	117,58	34,23	8,73	1,29
10	Teluk Belukar	708,52	298,01	96,77	17,37	0,93
Jumlah		**2344,31**	**1774,17**	**1375,03**	**450,09**	**40,22**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi berada pada ketinggian/elevasi 0-287 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi berada pada kawasan dengan kemiringan (lereng) antara 0->20% sebagaimana dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan

No	Desa	Ketinggian Lahan (mpdl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Faekhu	107,07	18,06	-	-	-	-
2	Fodo	112,76	30,36	-	-	-	-
3	Hiligara	1,74	56,81	105,28	95,92	18,74	-
4	Hiligodu Ombolata	2,68	137,70	120,66	26,68	5,30	-
5	Lolofaoso Tabaloho	53,74	43,93	8,72	-	-	-
6	Lololakha	14,08	188,88	220,22	26,68	5,30	-
7	Lolomboli	30,28	44,51	11,20	-	-	-
8	Luaha Laraga	40,67	89,14	25,63	-	-	-
9	Mazingo Tabaloho	133,05	125,65	71,26	11,59	-	-
10	Ombolata Simenari	47,60	80,06	64,90	52,49	14,30	-
11	Ononamolo I Lot	370,80	104,73	85,15	3,07	-	-
12	Onozitoli Tabaloho	142,24	166,85	99,69	35,03	1,69	-
13	Sihare'o I Tabaloho	-	76,44	149,59	146,65	50,42	-
14	Sisobahili II Tanoseo	-	15,87	76,81	175,28	52,55	-
15	Tetehosi Ombolata	-	15,15	107,36	146,02	52,32	-
JUMLAH		**1056,71**	**1194,14**	**1146,47**	**814,57**	**256,42**	**-**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.7
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Selatan

No	Desa	Kemiringan Lereng				
		0- 8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45 %
1	Faekhu	41,82	40,14	31,88	10,63	0,67
2	Fodo	54,95	40,10	30,94	15,46	1,68
3	Hiligara	23,22	59,42	116,59	77,30	1,97
4	Hiligodu Ombolata	28,40	70,28	124,75	68,29	1,31
5	Lolofaoso Tabaloho	17,61	23,80	40,74	23,54	0,69
6	Lololakha	54,48	135,79	269,28	141,77	4,80
7	Lolomboli	15,68	24,31	31,17	14,41	0,42
8	Luaha Laraga	35,78	44,76	48,18	24,53	2,19
9	Mazingo Tabaloho	95,67	93,72	93,48	53,90	4,77
10	Ombolata Simenari	36,22	64,40	91,73	63,67	3,33
11	Ononamolo I Lot	220,99	116,65	135,68	81,26	9,17
12	Onozitoli Tabaloho	74,86	85,62	156,34	118,28	10,39
13	Sihare'o I Tabaloho	39,18	100,65	179,37	98,91	5,00
14	Sisobahili II Tanoseo	30,30	64,58	116,69	102,00	6,95
15	Tetehosi Ombolata	23,24	53,03	125,14	117,16	2,29
JUMLAH		**792,41**	**1017,27**	**1591,94**	**1011,08**	**55,62**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.8
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Awa'ai	-	2,96	21,82	168,42	117,67	-
2	Bawodesolo	164,97	4,17	-	-	-	-
3	Binaka	269,50	10,55	1,25	-	-	-
4	Dahana	152,83	18,12	0,02	-	-	-
5	Fadoro	61,47	52,68	39,02	36,47	14,80	0,42
6	Fowa	71,80	-	-	-	-	-
7	Helefanikha	0,02	24,82	61,67	82,04	32,46	3,08
8	Hilihambawa	-	-	3,29	82,75	206,40	93,51
9	Hilimbawadesolo	150,59	18,65	-	-	-	-
10	Hilimbowo Idanoi	-	19,77	90,72	97,24	10,43	-
11	Hiliweto Idanoi	-	21,55	13,53	67,35	149,25	-
12	Humene	63,13	-	-	-	-	-
13	Idano Tae	56,91	12,68	-	-	-	-
14	Lewuoguru Idanoi	15,25	32,66	41,44	104,85	47,02	26,41
15	Loloana'a Idanoi	40,41	21,24	13,26	36,99	24,65	-
16	Ombolata Idanoi	-	38,57	120,30	110,35	63,63	-
17	Onowaembo Idanoi	30,51	176,71	112,28	63,00	17,97	-
18	Samasi	1,26	82,84	162,85	121,29	50,02	-
19	Sifalaete	63,45	44,34	13,68	-	-	-
20	Simanaere	45,65	49,52	59,75	80,79	7,92	-
21	Siwalubanua II	57,41	29,74	9,84	-	-	-
22	Siwalubanua-I	-	21,23	75,01	104,73	67,00	-
23	Tetehosi II	27,22	132,21	104,04	165,57	142,00	-
24	Tetehosi-I	45,48	56,32	32,95	37,44	3,60	-
25	Tuhegeo I	122,01	25,62	32,57	3,93	-	-
26	Tuhegeo-II	-	7,56	109,42	69,63	5,50	-
JUMLAH		**1439,87**	**882,96**	**1105,18**	**1365,79**	**811,07**	**127,96**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli Tahun 2022

Tabel 2.9
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

No	Nama Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45%
1	Awa'ai	42,93	86,33	117,40	63,23	0,99
2	Bawodesolo	115,64	34,64	9,34	6,91	2,62
3	Binaka	174,21	66,21	22,08	15,23	3,58
4	Dahana	117,75	32,20	12,35	8,42	0,25
5	Fadoro	26,77	33,69	66,53	64,70	13,17
6	Fowa	54,75	14,60	1,68	0,76	-
7	Helefanikha	23,75	52,89	83,56	41,76	2,12

No	Nama Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	> 45%
8	Hilihambawa	120,64	92,69	113,27	55,84	3,51
9	Hilimbawadesolo	110,04	38,14	15,41	4,82	0,83
10	Hilimbowo Idanoi	15,08	42,74	98,69	61,46	0,18
11	Hiliweto Idanoi	0,42	-	71,3	4,69	14,15
12	Humene	29,60	24,53	8,12	0,87	0,02
13	Idano Tae	30,55	18,21	13,42	7,30	0,11
14	Lewuoguru Idanoi	38,49	41,44	86,66	87,98	13,06
15	Loloana'a Idanoi	30,69	36,24	39,91	25,22	4,47
16	Ombolata Idanoi	32,64	84,21	151,20	64,67	0,13
17	Onowaembo Idanoi	32,64	82,52	163,80	87,72	6,22
18	Samasi	31,16	78,13	152,49	141,20	15,28
19	Sifalaete	29,40	35,14	38,84	16,65	1,44
20	Simanaere	40,59	62,95	74,53	58,60	6,95
21	Siwalubanua II	22,49	32,53	29,87	9,74	2,36
22	Siwalubanua-I	32,45	68,44	105,89	61,49	4,24
23	Tetehosi II	85,27	159,74	214,43	108,83	2,77
24	Tetehosi-I	26,30	43,19	54,31	47,72	4,27
25	Tuhegeo I	81,02	43,02	25,93	29,35	4,79
26	Tuhegeo-II	20,17	54,16	89,24	28,69	0,14
JUMLAH		**1392,58**	**1358,58**	**1788,95**	**1099,20**	**93,52**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

3. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat berada pada wilayah perbukitan dengan ketinggian/elevasi 150-350 meter di atas permukaan laut. Bila ditinjau dari sudut kelerengannya, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Barat terdiri atas beberapa kategori yaitu kemiringan lereng 0%-8% (datar), kemiringan lereng >8%-15% (landai), kemiringan lereng >15%-25% (bergelombang), kemiringan lereng >25%-40% (curam) dan kemiringan lereng >40% (sangat curam) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Barat

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mpdl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Lolomoyo Tuhemberua	32,28	88,91	80,95	41,47	17,34	16,31
2	Sihare'o Saiwahili	85,84	27,70	3,68	-	-	-
3	Tumori	23,99	51,66	28,98	39,21	12,01	-
4	Tumori Balohili	122,10	28,00	-	-	-	-
5	Gada	-	41,10	244,76	147,64	50,94	1,87
6	Hilinakhe	-	20,73	142,19	103,53	25,30	-
7	Orahili Tumori	12,14	62,99	115,69	47,34	27,05	-
8	Ononamolo I Lot	-	-	33,67	310,14	275,28	25,22

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mpdl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
9	Onozikho	-	19,88	260,21	244,80	63,96	-
Total		**276,35**	**340,97**	**910,13**	**934,13**	**471,88**	**43,40**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.11
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Barat

No	Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %
1	Lolomoyo Tuhemberua	39,58	52,39	88,30	80,64	16,35
2	Sihare'o siwahili	31,43	33,65	33,24	18,53	0,37
3	Tumori	15,58	30,22	50,28	56,56	3,20
4	Tumori Balohili	70,97	42,84	22,27	11,63	2,40
5	Gada	49,26	104,06	196,66	126,79	9,53
6	Hilinakhe	18,96	48,51	99,14	110,78	14,36
7	Orahili Tumori	26,41	55,17	95,41	83,85	4,36
8	Ononamolo II lot	80,71	145,60	237,83	167,53	12,64
9	Onozikho	58,52	128,67	234,56	159,43	7,66
Total		**391,42**	**641,12**	**1057,70**	**815,75**	**70,86**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.12
Ketinggian Lahan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Ketinggian Lahan (Mdpl)					
		0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300
1	Iraono Lase		2,88	89,31	74,09	5,68	-
2	Lololawa	9,12	65,59	125,78	136,81	21,00	-
3	Orahili Tanoseo	-	-	0,29	15,45	88,84	41,73
4	Tarakhaini	-	-	0,56	123,42	109,92	32,29
5	Fadoro Hilimbowo	-	-	-	-	52,33	133,24
6	Fadoro You	-	123,49	272,12	22,34	2,69	-
7	Nazolou Alo'oa	1,12	56,37	130,89	175,92	321,54	0,96
8	Nazalou Lolowua	126,19	249,31	178,40	140,48	80,46	-
9	Niko'otano Dao	0,12	98,66	230,26	375,93	395,31	13,32
	Total	**136,55**	**596,30**	**1027,61**	**1064,44**	**1077,77**	**221,54**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Tabel 2.13
Kemiringan Lereng di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

No	Desa	Kemiringan Lereng				
		0-8 %	8-15 %	15-25 %	25-45 %	>45 %
1	Iraono Lase	35,73	61,85	59,79	14,16	0,43
2	Lololawa	30,40	70,34	131,94	110,50	15,10
3	Orahili Tanoseo	49,37	30,97	44,09	21,68	0,20
4	Tarakhaini	65,43	65,88	80,65	51,69	2,55
5	Fadoro Hilimbowo	126,96	24,27	25,32	8,74	0,27
6	Fadoro You	55,38	109,81	181,12	72,65	1,68
7	Nazolou Alo'oa	140,41	195,83	247,10	96,65	6,81
8	Nazalou Lolowua	131,90	164,91	309,21	128,01	40,81
9	Niko'otano Dao	274,64	303,58	376,23	154,90	4,24
	Total	**910,23**	**1027,44**	**1455,46**	**658,99**	**72,07**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi, serta memliki peran terbentuknya satu bentukan lahan di Wilayah tersebut. Sebaran struktur geologi yang terdapat di Kota Gunungsitoli didominasi oleh Alluvium (Qa), Formasi Gomo (Tmpg1), Formasi Gunungsitoli (QTgs), dan Formasi Lolomatua (Tml4) secara rinci diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Sturuktur Geologi Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Struktur Geologi (Ha)					
		Older Alluvium (Qp)	Goungon Formation (QTg)	Coral-reef Limestone (Tml1)	Gomo Formation (Tmpg1)	Tanah Bola Melange	Total
1	Gunungsitoli	-	3110,32	-	1339,74	-	4450,06
2	Gunungsitoli Alooa	-	85,28	1794,48	2244,43	-	4124,19
3	Gunungsitoli Barat	-	54,48	-	2922,37	-	2976,84
4	Gunungsitoli Idanoi	589,59	383,94	512,48	4046,76	195,93	5728,71
5	Gunungsitoli Selatan	191,23	5,84	-	4239,30	25,09	4461,46
6	Gunungsitoli Utara	-	2885,10	970,93	2121,76	-	5977,78
Total		**780,82**	**6524,96**	**3277,89**	**16914,35**	**221,02**	**27719,04**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Kondisi hidrologi suatu daerah, paling tidak dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni posisi (geografi), iklim (curah hujan), dan geologi. Posisi suatu daerah yang berada di dekat pantai di kelilingi laut akan berbeda dengan daerah yang berada di tengah pulau. Ditinjau dari kondisi hidrologi Kota Gunungsitoli memiliki 13 Daerah Aliran Sungai (DAS), berikut ini merupakan daftar DAS di wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.15
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Gunungsitoli

No	Nama DAS	Panjang (m)
1.	DAS Sowu	142.676
2.	DAS Boe	5.520
3.	DAS Afia	37.486
4.	DAS Bo'uso	21.268
5.	DAS Olora	38.645
6.	DAS Gamo	9.718
7.	DAS Moawo	18.775
8.	DAS Nou	85.059
9.	DAS Miga	77.951
10.	DAS Idanoi	120.093
11.	DAS Ndra Humene	14.263
12.	DAS Fowa	12.980
13.	DAS Gido Si'ite	63.280
	Total	**647.714**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

Air permukaan/sungai di Kota Gunungsitoli terdapat cukup banyak, yang mengalir dari pegunungan di tengah Pulau Nias menuju ke arah perairan laut. Kebanyakan sungai-sungai yang mengalir di Kota Gunungsitoli tidak terlalu besar, sehingga tidak semua sungai tercatat memiliki nama. Daerah Kota Gunungsitoli posisinya berdekatan dengan pantai dan dialiri beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun.

Tabel 2.16
Nama-nama Sungai di Kota Gunungsitoli

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
1	Sungai Ndra Humene	Gunungsitoli Idanoi	5,0	Kecil
2	Sungai Foa	Gunungsitoli Idanoi	7,2	Kecil
3	Sungai Madawa	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
4	Sungai Umbu Dahana	Gunungsitoli Idanoi	4,0	Kecil
5	Sungai Miga Sebua	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
6	Sungai Miga Si'ite	Gunungsitoli Selatan	10,0	Sedang
7	Sungai Siwali	Gunungsitoli Selatan	5,0	Kecil
8	Sungai Bo'u	Gunungsitoli Selatan	3,0	Kecil
9	Sungai Idanoi	Gunungsitoli Selatan	20,0	Sedang
10	Sungai Nou	Gunungsitoli Barat	12,0	Sedang
11	Sungai Bo'adulo	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
12	Sungai Simangani	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
13	Sungai Bona'a	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
14	Sungai Sumui	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
15	Sungai Bodalu	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
16	Sungai Mola	Gunungsitoli Barat	7,0	Kecil
17	Sungai Bogaoha	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
18	Sungai Matemate	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
19	Sungai Solotu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
20	Sungai Simaoso	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
21	Sungai Larumae	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
22	Sungai Tawaya	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
23	Sungai Ra'ura'u	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
24	Sungai Fazizi	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
25	Sungai Alasa	Gunungsitoli Barat	5,0	Kecil
26	Sungai Tagaẃa	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
27	Sungai Bogaõlõ	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
28	Sungai Hele'akhe	Gunungsitoli Barat	4,0	Kecil
29	Sungai Maera	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
30	Sungai Zõluzõlu	Gunungsitoli Barat	3,0	Kecil
31	Sungai Mo'awõ	Gunungsitoli	10,0	Sedang
32	Sungai Bogalitõ	Gunungsitoli	4,0	Kecil
33	Sungai Saombõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
34	Sungai Walo	Gunungsitoli	2,0	Kecil
35	Sungai Sifadõlõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
36	Sungai Sahõndrõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
37	Sungai Tohia	Gunungsitoli	2,0	Kecil
38	Sungai Totoa	Gunungsitoli	2,0	Kecil
39	Sungai Boyo	Gunungsitoli	7,0	Kecil
40	Sungai Alimbungõ	Gunungsitoli	2,0	Kecil
41	Sungai Idanõmanu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
42	Sungai Idanõ Fandindina	Gunungsitoli	3,0	Kecil

No.	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)	Klasifikasi*
43	Sungai Idanõgohõ	Gunungsitoli	3,0	Kecil
44	Sungai Idanõmalõwu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
45	Sungai Lelewõnu	Gunungsitoli	3,0	Kecil
46	Sungai Fafa	Gunungsitoli	4,0	Kecil
47	Sungai Waru	Gunungsitoli	4,0	Kecil
48	Sungai Faekhuzihamba	Gunungsitoli	5,0	Kecil
49	Sungai Bodõwu	Gunungsitoli	7,0	Kecil
50	Sungai Bodõwu So'ene	Gunungsitoli	4,0	Kecil
51	Sungai Bozulu	Gunungsitoli	4,0	Kecil
52	Sungai Tebai'oyo	Gunungsitoli	4,0	Kecil
53	Sungai Delamawõ	Gunungsitoli	3,0	Kecil
54	Sungai Azue	Gunungsitoli	3,0	Kecil
55	Sungai Sitoba'a	Gunungsitoli	3,0	Kecil
56	Sungai Simangani	Gunungsitoli	3,0	Kecil
57	Sungai To'õ	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
58	Sungai Bofino	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
59	Sungai Si’arawi	Gunungsitoli Utara	4,0	Kecil
60	Sungai Tambalou	Gunungsitoli Utara	12,0	Sedang
61	Sungai Lawu-Lawu	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
62	Sungai Bo’e	Gunungsitoli Utara	15,0	Sedang
63	Sungai Hela	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
64	Sungai Menau	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
65	Sungai Lotu	Gunungsitoli Utara	10,0	Sedang
66	Sungai Mbombo Ebua	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
67	Sungai Lewŵuõguru	Gunungsitoli Utara	8,0	Kecil
68	Sungai Gamo	Gunungsitoli Alo’oa	25,0	Besar
69	Sungai Olora	Gunungsitoli Alo’oa	25,0	Besar
70	Sungai Bo’usõ	Gunungsitoli Alo’oa	25,0	Besar
71	Sungai Afia	Gunungsitoli Alo’oa	25,0	Besar
72	Sungai Mbombo Sebua	Gunungsitoli Alo’oa	6,0	Kecil
73	Sungai Bõziwawõ	Gunungsitoli Alo’oa	10,0	Sedang
74	Sungai Sotufo	Gunungsitoli Alo’oa	10,0	Sedang
75	Sungai Namõlõ	Gunungsitoli Alo’oa	8,0	Kecil
76	Sungai Dudunou	Gunungsitoli Alo’oa	10,0	Sedang
77	Sungai Bowulu	Gunungsitoli Alo’oa	8,0	Kecil
78	Sungai Tanõse’õ	Gunungsitoli Alo’oa	8,0	Kecil

Letak Kota Gunungsitoli yang dekat dengan garis khatulistiwa menyebabkan curah hujan setiap tahun cukup tinggi. Pada tahun 2024 rata-rata curah hujan mencapai 254,62 mm^3 perbulan dengan banyaknya hari hujan mencapai 288 hari setahun atau rata-rata 24 hari per bulan. Curah hujan yang paling besar terjadi pada bulan Agustus mencapai 381,5 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari. Sementara curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan hanya sebanyak 19 hari dengan curah hujan hanya mencapai 142,7 mm/tahun.

Curah hujan yang tinggi setiap tahun mengakibatkan kondisi alam Kota Gunungsitoli sangat lembab dan basah dengan rata-rata kelembaban antara 86–90 persen. Di samping itu struktur batuan dan susunan tanah di Kota Gunungsitoli pada umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadinya patahan pada jalan-jalan aspal dan longsor, demikian juga sering ditemui daerah aliran sungai yang berpindah-pindah.

Keadaan iklim Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara dalam satu tahun rata-rata 27,13^{0}C, dengan rata-rata minimum per bulan sebesar 22,75^{0}C dan rata-rata maksimum 33,64^{0}C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu bulan sebesar 3,83 Knot.

Tabel 2.17
Kondisi Curah hujan di Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan
1.	Januari	236,2	23
2.	Februari	144,5	17
3.	Maret	275,4	25
4.	April	257,9	26
5.	Mei	166,6	24
6.	Juni	149,2	19
7.	Juli	133,2	23
8.	Agustus	307,7	29
9.	September	382,4	25
10.	Oktober	368,0	21
11.	November	368,6	27
12.	Desember	265,7	29

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.18
Kondisi Rata-Rata Suhu dan Kelembaban di Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Bulan	Rata-Rata Suhu Udara Temperatur (^oC)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	27,1	88
2.	Februari	27,8	86
3.	Maret	27,4	89
4.	April	27,9	88
5.	Mei	27,7	88
6.	Juni	27,1	89
7.	Juli	27,2	88
8.	Agustus	26,5	90
9.	September	27,7	89
10.	Oktober	26,5	89
11.	November	26,6	90
12.	Desember	26,1	90

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka

Kota Gunungsitoli memiliki luas lahan 27,899 Ha yang sebagian berupa kawasan Pertanian Lahan Kering seluas 16.631,7 Ha (59,61%), kawasan Hutan seluas 8.154,9 Ha (29,99%) dan kawasan Permukiman seluas 1.034,5 Ha (3,7%). Bila ditinjau dari kondisi eksisting pengunaan lahan saat ini, Kota Gunungsitoli masih memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya namun dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berkelanjutan. Secara rinci jenis pengunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Jenis Pengunaan Lahan

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
1	Badan Air	183,96	0,66
2	Hutan	7.987,54	28,72
3	Kawasan Fasilitas Kesehatan	4,48	0,02
4	Kawasan Fasilitas Umum	52,24	0,19
5	Kawasan Militer	2,70	0,01
6	Kawasan Permukiman	1.241,42	4,46
7	Kawasan Pendidikan	59,02	0,21
8	Kawasan Perdagangan dan Jasa	58,86	0,21
9	Kawasan Perkantoran	21,33	0,08
10	Kawasan Wisata	3,01	0,01

No.	Jenis Guna Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
11	Lahan Terbuka	45,35	0,16
12	Mangrove	151,74	0,55
13	Pantai	7,77	0,03
14	Perkebunan	202,60	0,73
15	Pertanian Lahan Kering	16.872,54	60,68
16	Rawa Gambut	100,05	0,36
17	Ruang Terbuka Hijau	4,70	0,02
18	Sawah	808,22	2,91
Total		**27.807,53**	**100,00**

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kota Gunungsitoli adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung. Penetapan kawasan ini menitik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budaya sesuai dengan fungsi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Pengarahan kawasan budidaya dalam RTRW Kota Gunungsitoli adalah :

a. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdaya guna dan hasil guna, serasi seimbang dan berkelanjutan;
b. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis yang lain.

Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada :

a. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
b. Kebijaksanaan pembangunan;
c. Program sektoral yang akan dilaksanakan;
d. Rencana struktur yang akan dilaksanakan;
e. Hasil masukan analisa fisik, sosial, ekonomi dan struktur ruang.

Adapun kawasan budidaya yang direncanakan di Kota Gunungsitoli meliputi kawasan hutan produksi; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan peruntukan industri; kawasan permukiman; kawasan perdagangan dan jasa; kawasan perkantoran; kawasan transportasi; dan kawasan pertambangan dan energi dengan total seluas 23.054,25 Ha. Untuk lebih jelasnya rencana kawasan budidaya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Gunungsitoli

Kawasan	Sub Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)
Kawasan Permukiman	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Gunungsitoli	64,90
		Gunungsitoli Alo'oa	12,39
		Gunungsitoli Barat	4,70
		Gunungsitoli Idanoi	22,89
		Gunungsitoli Selatan	31,83
		Gunungsitoli Utara	42,70
	Kawasan Perumahan	Gunungsitoli	1.778,15
		Gunungsitoli Alo'oa	628,91
		Gunungsitoli Barat	218,40
		Gunungsitoli Idanoi	849,19
		Gunungsitoli Selatan	860,47
		Gunungsitoli Utara	903,16
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	Gunungsitoli	2,69
		Gunungsitoli Alo'oa	94,73
		Gunungsitoli Barat	10,07
		Gunungsitoli Idanoi	202,61
		Gunungsitoli Selatan	80,26
		Gunungsitoli Utara	415,15
	Kawasan Hortikultura	Gunungsitoli	10,90
		Gunungsitoli Alo'oa	26,28
		Gunungsitoli Barat	8,95
		Gunungsitoli Idanoi	83,22
		Gunungsitoli Selatan	116,42
		Gunungsitoli Utara	42,70
	Kawasan Perkebunan	Gunungsitoli	1.645,95
		Gunungsitoli Alo'oa	3.124,04
		Gunungsitoli Barat	976,56
		Gunungsitoli Idanoi	2.948,53
		Gunungsitoli Selatan	2.271,64
		Gunungsitoli Utara	3.783,65
	Kawasan Peternakan	Gunungsitoli Utara	5,26
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Gunungsitoli Alo'oa	219,76
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	Gunungsitoli	9,49
		Gunungsitoli Barat	4,75

Kawasan	Sub Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)
		Gunungsitoli Idanoi	15,42
		Gunungsitoli Selatan	19,63
		Gunungsitoli Utara	17,35
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Gunungsitoli	0,77
		Gunungsitoli Idanoi	14,99
Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Gunungsitoli	492,29
		Gunungsitoli Alo'oa	26,69
		Gunungsitoli Idanoi	231,20
		Gunungsitoli Selatan	115,97
		Gunungsitoli Utara	149,08
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya	Gunungsitoli Utara	173,46
Kawasan Perkantoran	Kawasan Perkantoran	Gunungsitoli	30,58
		Gunungsitoli Alo'oa	0,55
		Gunungsitoli Barat	0,43
		Gunungsitoli Idanoi	0,49
		Gunungsitoli Selatan	8,73
		Gunungsitoli Utara	4,28
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Gunungsitoli Selatan	6,85
		Gunungsitoli Utara	138,97
Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	Gunungsitoli	3,34
		Gunungsitoli Idanoi	101,07
		Gunungsitoli Selatan	0,88
Kawasan Budidaya		Kota Gunungsitoli	22.841,30

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

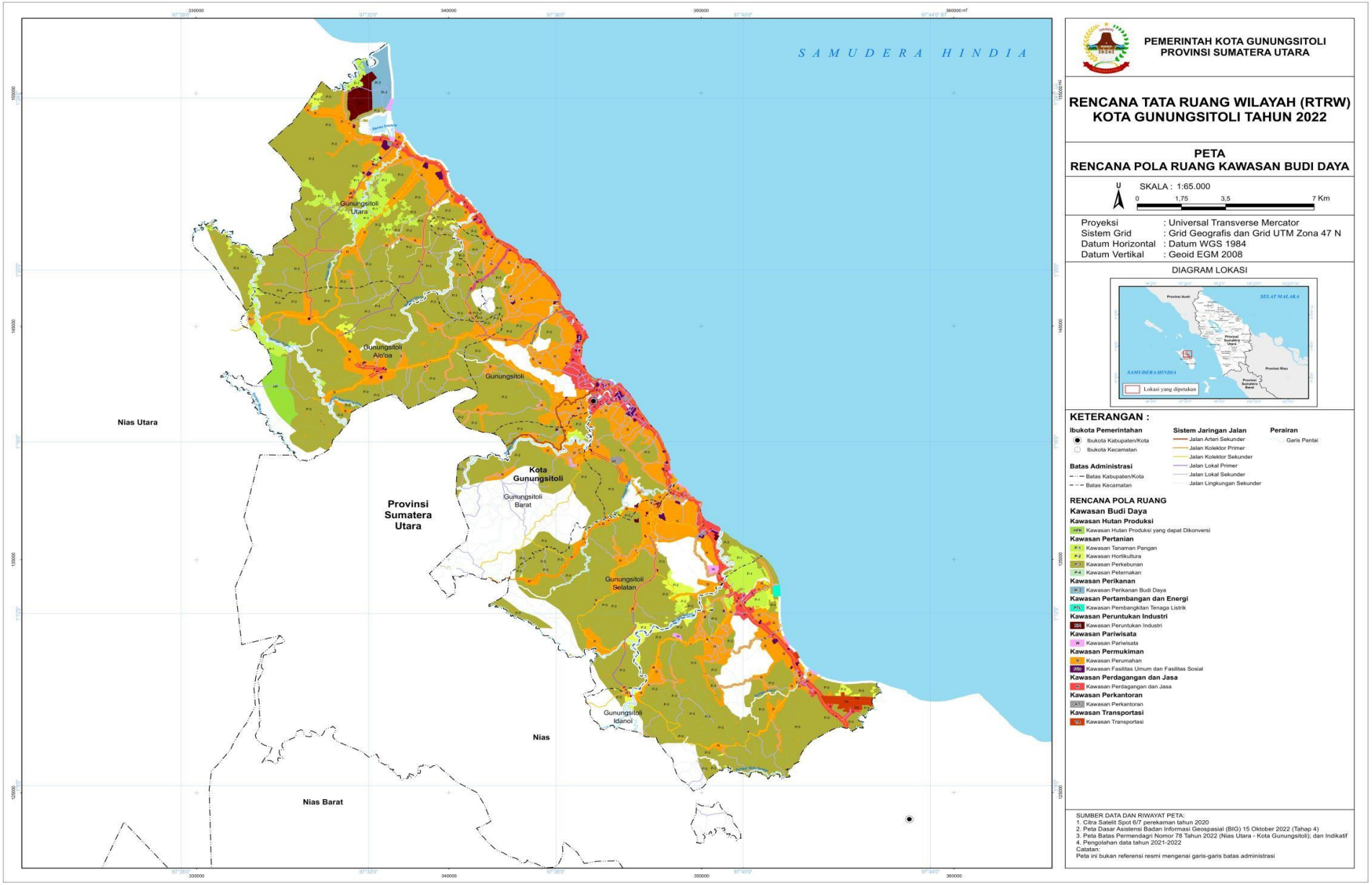
SAMUDERA HINDIA
Gunungsitoli Utara
Gunungsitoli Alo'oa
Gunungsitoli
Nias Utara
Kota Gunungsitoli
Gunungsitoli Barat
Provinsi Sumatera Utara
Gunungsitoli Selatan
Gunungsitoli Idanoi
Nias
Nias Barat
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022
PETA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDI DAYA
SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
SELAT MALAKA
SAMUDERA HINDIA
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Sistem Jaringan Jalan
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
P-4 Kawasan Peternakan
Kawasan Perikanan
IK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pertambangan dan Energi
PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
R Kawasan Perumahan
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perkantoran
Kawasan Perkantoran
Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar Asistensi Badan Informasi Geospasial (BIG) 15 Oktober 2022 (Tahap 4)
3. Peta Batas Permendagri Nomor 78 Tahun 2022 (Nias Utara - Kota Gunungsitoli); dan Indikatif
4. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

1) Kawasan Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung.

Hutan produksi merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Di Indonesia sebagian besar hutan produksi juga adalah hutan alam yang dieksploitasi dalam rangka hak pengusahaan hutan dan hutan buatan atau hutan tanaman, misalnya hutan jati, tusam, mahoni, damar, jabon, bambu di Pulau Jawa dan hutan tanaman tusam di Sumatera Utara. Hutan-hutan produksi umumnya berlokasi di dataran rendah, sehingga penebangannya tidak akan mengganggu tata air. Selain nilai kayunya yang tinggi untuk penghara industri, seperti balok gergajian, kayu pulp, kayu lapis dan lain-lain. ciri-ciri hutan produksi ialah pengolahan yang intensif berdasarkan asas-asas kelestarian, murni jenis pohonnya dan kebanyakan seumur. Selain menghasilkan kayu juga memberi hasil hutan ikutan seperti getah buah tengkawang, rotan dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi eksisting, peruntukan lahan untuk kawasan hutan produksi di Kota Gunungsitoli berupa kawasan hutan produksi yang dapat di konversi. Rencana peruntukan ini hanya terdapat di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan luas 219,76 Ha.

2) Kawasan Pertanian

Rencana kawasan pertanian adalah rencana pengalokasian suatu kawasan yang memenuhi kriteria untuk kegiatan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, wilayah Kota Gunungsitoli adalah wilayah perkotaan yang masih memiliki lahan pertanian yang cukup potensial (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi ketiga yang cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kota Gunungsitoli. Karena itu dalam arahan tata ruang perlu dibuat untuk pedoman kebijakan yang strategi untuk mendukung kegiatan pertanian menjadi berkelanjutan, khususnya kegiatan agrobisnis dan agroindustri yang sangat berpotensi dikembangkan di Kota Gunungsitoli.

A. Kawasan Hortikultura

Pendekatan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi biaya dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditi unggulan. Melalui pengembangan kawasan diharapkan dapat terwujud pelayanan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan. Dalam pembangunan kawasan mutlak diperlukan suatu perencanaan yang disusun dengan melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan.

Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek sumberdaya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan kekhususan wilayah. Pengembangan hortikultura berbasis kawasan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Memungkinkan penangaanan berbasis komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya.
b. Memberikan peluang bagi semua komoditas potensial di kawasan untuk ditangani secara proporsional.
c. Merupakan wadah dan wahana pelaksanaan desentralisasi pembangunan secara nyata, sinergis, dan harmonis, diantara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Memungkinkan “critical mass” penggalangan sumberdaya sehingga terjadi sinergi dari berbagai sumberdaya.
e. Membedakan secara jelas karakter dan pengukuran kinerja antara pengembangan dan perbaikan.
f. Meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan dan sekitarnya.
g. Skala pengembangan usaha menjadi lebih luas.
h. Sebagai entry point pelayanan inovasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembiayaan.

Menurut Permentan no. 41 Tahun 2009, penetapan kawasan budidaya hortikultura dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen.
b. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
c. Mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Rencana penetapan kawasan hortikultura di Kota Gunungsitoli juga sesuai maksud dan tujuan yang dijabarkan diatas. Rencana kawasan hortikultura di Kota Gunungsitoli direncanakan seluas 288,47 Ha, meliputi:

a. Kecamatan Gunungsitoli kurang lebih seluas 10,90 Ha
b. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa kurang lebih seluas 26,28 Ha
c. Kecamatan Gunungsitoli Barat kurang lebih seluas 8,95 Ha
d. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi kurang lebih seluas 83,22 Ha
e. Kecamatan Gunungsitoli Selatan kurang lebih seluas 116,42 Ha
f. Kecamatan Gunungsitoli Utara kurang lebih seluas 42,70 Ha

B. Kawasan Perkebunan

Subsektor Perkebunan di Kota Gunungsitoli merupakan sektor unggulan dan penggerak ekonomi wilayah sehingga diperlukan pengelolaan secara berkelanjutan. Amanat pengelolaan perkebunan berkelanjutan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Selain itu, pentingnya pengelolaan berkelanjutan juga untuk meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan data dari BPS, sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 adalah sektor pertanian (14,44%) yang mana subsektor perkebunan termasuk di dalamnya.

Komoditi perkebunan di Kota Gunungsitoli ditargetkan untuk pengembangan 3 komoditas unggulan, seperti: tanaman Kelapa, Karet, dan coklat. Atas dasar pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan sebuah kawasan perkebunan di Kota Gunungsitoli. Penetapan Rencana Kawasan Perkebunan di Kota Gunungsitoli ini mengacu pada 3 pedoman yaitu: (1) Peraturan Menteri Pertanian no. 8 tahun 2016 tentang Perkebunan Berbasis Spasial; (2) Peraturan Menteri Pertanian no. 56 tahun

2016 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Alokasi ruang untuk rencana kawasan perkebunan di Kota Gunungsitoli ditetapkan seluas 14.751,22 Ha, meliputi:

a. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli seluas 1.645,95 Ha
b. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa seluas 3.124,04 Ha
c. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli Barat seluas 976,56 Ha
d. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi seluas 2.948,53 Ha
e. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli Selatan seluas 2.271,64 Ha
f. Kawasan Perkebunan di Kecamatan Gunungsitoli Utara seluas 3.783,65 Ha

C. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan petemakan atau terpadu sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu serta berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Penetapan Kawasan peternakan di dalam dokumen ini hanya menunjukkan bahwa di kawasan tersebutlah peternakan dikembangkan, karena peternakan di Kota Gunungsitoli pada umumnya berada pada kawasan permukiman. Selain itu penetapan kawasan peternakan dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan baku industri, serta penyediaan bahan pangan sumber hewani melalui peningkatan produksi peternakan secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha maupun pelaku ternak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan data BPS populasi ternak terbesar di Kota Gunungsitoli adalah ternak babi, dengan populasi kurang lebih 3.088 ekor. Kriteria Kawasan peternakan adalah :

a. Kawasan peternakan adalah berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional dengan aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai.
b. Kawasan peternakan harus memiliki lahan padang penggembalaan dan atau hijauan makanan ternak (HMT), serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan ternak- hortikultura.
c. Kriteria khusus kawasan peternakan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas yaitu satu kawasan peternakan untuk 3.000 ekor.

d. Berdasarkan kriteria diatas, maka kawasan peternakan yang direncanakan di Kota Gunungsitoli seluas kurang lebih 5,26 Ha berada pada Kecamatan Gunungsitoli Utara.

3) Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang direncanakan di Kota Gunungsitoli adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya adalah untuk kegiatan perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Berdasarkan data BPS, tahun 2021, produksi ikan di Kota Gunungsitoli hampir seluruh berasal dari perikanan laut, yaitu sebesar 6.544 ton, sementara produksi ikan dari perikanan tawar hanya sebesar 135,36 ton, yang keseluruhannya dipelihara di area kolam.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya terdiri dari perikanan tambak air tawar dan budidaya teripang. Adapun jenis kegiatan dan lokasi perikanan budidaya di Kota Gunungsitoli, meliputi:

a. Budidaya perikanan tambak udang di Kecamatan Gunungsitoli Utara (tepatnya di Desa Afia, Desa Teluk Belukar);
b. Budidaya tambak ikan air tawar di Kecamatan Gunungsitoli Utara (tepatnya di Desa Tetehosi Afia) dan Kecamatan Gunungsitoli Barat (tepatnya di Desa Tumori, Desa Tumori Balohili)
c. Budidaya teripang di Kecamatan Gunungsitoli Utara (tepatnya di Desa Teluk Belukar)

Rencana alokasi lahan untuk peruntukan kawasan perikanan budidaya di direncanakan di Kota Gunungsitoli tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan total luas kurang lebih 173,46 Ha. Sedangkan pengembangan perikanan tangkap direncanakan di kawasan pesisir. Mengingat Kota Gunungsitoli memiliki 4 Kecamatan yang berbatasan dengan laut, maka pengembangan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan; dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Pengembangan perikanan pada wilayah pesisir akan dikembangkan dengan konsep agromarin sehingga dapat menjadi ekonomi potensial wilayah.

4) Kawasan Peruntukan Industri

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah sehingga keberadaan dan tingkat pertumbuhan sektor industri umumnya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Kawasan industri biasanya berlokasi di tepi ataupun di luar kawasan permukiman dari sebuah kota yang biasanya terletak dekat dengan fasilitas transportasi, terutama di kawasan tempat bertemunya jalan tol, stasiun, bandar udara, terminal barang, dan pelabuhan.

Untuk mengembangkan sektor industri di Kota Gunungsitoli sebenarnya sangat potensial sekali untuk dikembangkan di beberapa zona industri, baik industri manufaktur maupun industri pengolahan sumber daya alam. Banyaknya hasil pertanian dan perkebunan merupakan bahan dasar atau bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan sektor industri.

Berdasarkan Permen Perindustrian no. 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, beberapa kriteria dalam menentukan lokasi kawasan industri adalah sebgai berikut:

a. Jarak lokasi ke pusat kota Minimal 10 km
b. Jarak terhadap permukiman Minimal 2 km
c. Tersedia jaringan transportasi darat seperti tersedianya jalan arteri primer atau jaringan kereta api
d. Tersedianya jaringan energi dan kelistrikan serta jaringan telekomunikasi
e. Tersedianya prasarana angkutan seperti pelabuhan laut untuk kelancaran
f. trarısporlasi logistik barang maupun outlet eksport/import
g. Tersedianya sumber air baku seperti sumber air permukaan (sungai, danau, waduk/embung, atau laut) dengan debit yang mencukupi

Berdasarkan kriterian diatas maka kawasan yang potensial untuk rencana kawasan peruntukan industri dilokasikan di Kawasan Perkotaan Gunungsitoli antara lain adalah: kawasan Kecamatan Gunungsitoli Utara yang dikonsep dengan kawasan industri terpadu dengan luas 138,97 Ha dan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Gunungsitoli selatan dengan luas 6,85 Ha.

Beberapa ketentuan lainnya terkait kawasan industri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri pada Pasal 7, menyatakan bahwa Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan

Industri. Selanjutnya kewajiban berlokasi di Kawasan Industri dikecualikan diantaranya:

a. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
b. Industri mikro, kecil, dan menengah.
c. Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.

5) Kawasan Pariwisata

Peruntukan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2031 meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Jenis Kegiatan dan arahan lokasi wisata tersebut meliputi :

a. Pariwisata Alam adalah seluruh kawasan atau lokasi alam wilayah Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat teknis sebagai daerah tujuan wisata alam;
b. Pariwisata Bahari adalah seluruh tepi pantai yang telah tertata dan memenuhi syarat teknis sebagai daerah tujuan wisata bahari.
c. Pariwisata lainnya adalah kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata khusus, termasuk perhotelan dan plasa-plasa yang telah memenuhi syarat teknis serta patut dan layak menarik perhatian pengunjung.

Peruntukan kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2031 meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Jenis Kegiatan dan arahan lokasi wisata tersebut meliputi :

a. Pariwisata Alam adalah seluruh kawasan atau lokasi alam wilayah Kota Gunungsitoli yang memenuhi syarat teknis sebagai daerah tujuan wisata alam;
b. Pariwisata Bahari adalah seluruh tepi pantai yang telah tertata dan memenuhi syarat teknis sebagai daerah tujuan wisata bahari.

c. Pariwisata lainnya adalah kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata khusus, termasuk perhotelan dan plasa-plasa yang telah memenuhi syarat teknis serta patut dan layak menarik perhatian pengunjung.

Potensi wisata ini pada umumnya tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli, sehingga penetapan rencana kawasan wisata juga mempertimbangkan potensi yang ada di seluruh wilayah. Luas kawasan pariwisata ditetapkan seluas 66,64 Ha, meliputi:

a. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Gunungsitoli dengan luas 9,49 Ha
b. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Gunungsitoli Barat dengan luas 4,75 Ha
c. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas 15,42 Ha
d. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dengan luas 19,63 Ha
e. Kawasan Pariwisata di Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas 17,35 Ha

6) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kota Gunungsitoli pada umumnya dapat dikembangkan pada seluruh wilayah kota, terutama pada lahan yang realitif datar (0 – 8%) dan telah mempunyai jaringan jalan. namun untuk mendukung rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan maka pengembangan kawasan permukiman tertutama diarahkan pada jalan utama kolektor primer dan pusat-pusat Pelayanan Kota. Selain pada jalan kolektor primer dan pusat-pusat pelayanan kota, pengembangan kawasan permukiman baru sekarang ini diarahkan ke kawasan yang baru terbuka di daerah perbukitan. namun dari segi pemanfaatan perlu usaha rekaya teknis dalam pemanfaatan. Rencana kawasan permukiman di Kota Gunungsitoli direncanakan seluas 5.204,24 Ha, meliputi rencana kawasan perumahan seluas 5.024,83 Ha, serta kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 179,41 Ha, berikut penjabarannya:

A. Kawasan Perumahan

Pengembangan kawasan perumahan dan perumahan baru di Kota Gunungsitoli di arahkan diluar pusat kota Gunungsitoli sekarang ini. Sampai dengan tahun 2042 luas wilayah perumahan di Kota Gunungsitoli direncanakan mencapai 5.238,28 Ha yang terdiri dari:

a. Kecamatan Gunungsitoli dengan luas 1778,15 Ha
b. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan luas 628,91 Ha

c. Kecamatan Gunungsitoli Barat dengan luas 218,40 Ha

d. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas 849,19 Ha

e. Kecamatan Gunungsitoli Selatan dengan luas 860,47 Ha

f. Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas 903,16 Ha

Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa kebutuhan lahan yang direncanakan dengan hasil hasil proyeksi kebutuhan lahan perumahan telah terakomodir kebutuhan lahan 20 tahun kedepan sehingga dapat dikatakan kebutuhan lahan untuk 20 tahun kedepan telah dipersiapkan. Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan perumahan sampai tahun 2043 untuk Kota Gunungsitoli adalah sebesar 1.158 Ha yang terdiri dari kavling rumah kecil dengan luas 421,20 Ha (21.060 unit), kavling rumah sedang dengan luas sekitar 421,20 Ha (14.040 unit), serta kavling rumah besar dengan luas 315,90 Ha (7.020 unit). Kawasan perumahan di Kota Gunungsitoli diarahkan ke sebelah barat dan hendaknya jauh dari pinggir pantai. Jika dilihat pada kondisi eksisting tahun 2010, banyak pembangunan perumahan semakin menyebar disepanjang pinggir pantai di Kota Gunungsitoli yang termasuk dalam kawasan lindung. Direncakan adanya relokasi perumahan yang masuk dalam kawasan lindung ke bagian sebelah barat mengarah ke arah perbukitan yang bisa dibudidayakan yaitu di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa; Kecamatan Gunungsitoli Barat dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Kebutuhan Rumah Di Kota Gunungsitoli Pada Tahun 2043

NO	Kecamatan	Tahun Proyeksi Luas Lahan Rumah Besar (Ha)				
		2023	2028	2033	2038	2043
1	Gunungsitoli Idanoi	60,96	67,14	73,98	81,54	89,88
2	Gunungsitoli Selatan	37,86	39,30	40,80	42,36	43,98
3	Gunungsitoli Barat	20,46	21,24	22,02	22,86	23,76
4	Gunungsitoli	161,46	165,48	169,56	173,76	178,02
5	Gunungsitoli Alo'oa	20,34	21,90	23,58	25,38	27,36
6	Gunungsitoli Utara	46,74	49,38	52,20	55,14	58,26
Kota Gunungsitoli		347,82	364,44	382,14	401,04	421,20
NO	Kecamatan	Tahun Proyeksi Luas Lahan Rumah Sedang (Ha)				
1	Gunungsitoli Idanoi	60,93	67,14	74,01	81,57	89,88
2	Gunungsitoli Selatan	37,86	39,30	40,80	42,36	43,95
3	Gunungsitoli Barat	20,46	21,24	22,05	22,86	23,73
4	Gunungsitoli	161,49	165,48	169,56	173,73	178,02
5	Gunungsitoli Alo'oa	20,34	21,90	23,58	25,41	27,36
6	Gunungsitoli Utara	46,74	49,38	52,17	55,11	58,23
Kota Gunungsitoli		347,82	364,44	382,17	401,04	421,20

NO	Kecamatan	Tahun Proyeksi Luas Lahan Rumah Kecil (Ha)				
1	Gunungsitoli Idanoi	45,71	50,37	55,50	61,17	67,41
2	Gunungsitoli Selatan	28,40	29,48	30,60	31,76	32,97
3	Gunungsitoli Barat	15,35	15,93	16,53	17,15	17,81
4	Gunungsitoli	121,11	124,10	127,17	130,31	133,52
5	Gunungsitoli Alo'oa	15,26	16,43	17,70	19,05	20,52
6	Gunungsitoli Utara	35,07	37,04	39,14	41,34	43,68
Kota Gunungsitoli		260,87	273,35	286,62	300,78	315,90

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli

B. Kawasan Fasilitas Pelayanan Umum

Kawasan fasilitas pelayanan umum terdiri dari pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Arahan lokasi dari masing-masing kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kawasan Pendidikan

Perencanaan kawasan pendidikan sangat tergantung kepada karakteristik dari masing-masing jenis pendidikan, perkembangan penduduk usia sekolah dan skala pelayanannya. Hingga akhir tahun perencanaan luas penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan seluas 144,29 Ha. perencanaan kawasan pendidikan di Kota Gunungsitoli dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan perguruan tinggi di wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi;
2. Pengembangan kawasan pendidikan dasar dan menengah diarahkan di seluruh SPPK;dan
3. pengembangan kawasan pendidikan khusus kejuruan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. Kesehatan

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan di Kota Gunungsitoli terdri atas :

1. pusat kesehatan regional di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
2. pusat kesehatan skala kecamatan di seluruh wilayah Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.

c. Peribadatan

Fasilitas peribadatan dalam penyediaannya baik itu berupa jenis, macam, dan besaran sangat tergantung pada kondisi setempat. Kondisi tersebut adalah berupa struktur penduduk menurut agama/kepercayaan yang dianut, dan cara atau pola melaksanakan agama/kepercayaannya. Dengan demikian maka fasilitas

peribadatan yang mempunyai skala pelayanan lingkungan diarahkan berada pada setiap pusat-pusat lingkungan. Sedangkan bagi fasilitas peribadatan yang mempunyai skala pelayanan tingkat kecamatan sebaiknya diarahkan pada pusat-pusat WP. Dan untuk fasilitas peribadatan yang mempunyai pelayanan skala regional (seperti Gereja Distrik, Gereja Wilayah, Gereja Katederal, Mesjid raya/Mesjid Agung) diarahkan tetap berada pada pusat kota. Rencana luas pola ruang untuk fasilitas peribadatan hingga akhir tahun perencanaan seluas 20,95 Ha.

7) Kawasan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan Sistem Pusat-pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan. Fungsi utama Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

a. Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran);
b. Menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Arahan pengembangan pola ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Gunungsitoli secara umum adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Gunungsitoli dialokasikan di Pusat Kota dan di koridor jalan-jalan utama kota.
b. Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa dialokasikan di setiap pusat SPPK di setiap kecamatan.
c. Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa menurut kebutuhan di pusat-pusat kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/perumahan.
d. Perdagangan informal dialokasikan di pusat-pusat perdagangan Pusat Kota dan di pusat SPPK di pusat-pusat perdagangan kecamatan secara terencana dan terintegrasi dengan lokasi perdagangan sektor formal, yang ditata dengan mempertimbangkan aspek keteraturan, ketertiban, estetika lingkungan, kenyamanan, dan keamanan dengan mengedepankan norma-norma pemanfaatan ruang publik secara rasional dan adil.

e. Pembangunan Gedung pusat perbelanjaan (Mal, Shopping center, Supermarket, Hypermarket, dan sejenisnya) diwajibkan menyediakan 10 % (sepuluh persen) dari luas total lantai komersial yang tersedia di dalam pusat perbelanjaan untuk pengusaha kecil, khususnya pengusaha sektor informal dengan harga jual atau harga sewa yang terjangkau, yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan wali kota.

Pengembangan kegiatan perdagangan direncanakan seluas 1.015,23 Ha, meliputi pasar. pusat perbelanjaan/pertokoan dan sektor informal.

a. Pengembangan Pasar tradional di setiap pusat kegiatan lingkungan yang akan melayani skala kota maupun beberapa desa disekitarnya, adapun pasar tradisional yang akan dikembangkan:
   1. Pusat pasar sembako, pasar ikan (sore), pasar pagi, pasar induk, pasar Ya'ahowu;
   2. Pekan Loloana'a Lolomoyo, Simpang Lima, Hilimbowo Olora, Gawu- Gawu Bo'uso, Afia, Boe di Kecamatan Gunungsitoli Utara;
   3. Pekan Lololawa, nazalou Lolowua di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa;
   4. Pekan Onowaembo, Madolaoli di Kecamatan Gunungsitoli;
   5. Pekan Onozikho, Gada di Kecamatan Gunungsitoli Barat;
   6. Pekan Hiligodu, Tetehosi, Simanaere, Hiligara, Somolo-molo di Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
   7. Pekan Humene, Fadoro Id, Ombolata Id, Onowaembo Id, Fowa, dan Samasi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi;
   8. Pasar Idanoi di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi;
   9. Pasar Tabaloho di Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
   10. Pasar Fondrako di Kecamatan Gunungsitoli Barat;
   11. Pasar Hili Dora'a di Kecamatan Gunungsitoli Utara;
   12. Pasar Alo'oa di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa;dan
   13. Pusat-pusat perbelanjaan lainnya;

b. Rencana Pasar Modern, meliputi pusat-pusat perbelanjaan di gedung/bangunan bertingkat tinggi yang modern seperti plasa di wilayah PPK.. Untuk pusat perbelanjaan skala kecamatan di arahkan di pusat-pusat SPPK, sedangkan untuk pusat perdagangan skala pelayanan kota dan regional di arahkan di Pusat Kota Gunungsitoli dan Kota Baru di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa. Perencanaan pusat-pusat perbelanjaan harus terintergrasi sistem transportasi. Pusat perbelanjaan harus

memiliki parkir yang cukup dengan mengakomodasi lokasi bagi becak dan ojek, serta harus menyediakan ruang terbuka untuk sektor informal (secara terbatas dan teratur).

c. Rencana penempatan kegiatan informal ditempatkan terintegrasi dengan pusat-pusat perdagangan yang ada atau di tempatkan pada kawasan-kawasan ruang multiguna dengan pola kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan sektor informal. Adapun Pemerintah Kota bertugas untuk mengatur dan mengelola terkait dengan pola kerja sama dan menyediakan prasarana dasar. misal air, listrik dan air limbah.

8) Kawasan Perkantoran

Lahan yang dialokasikan menjadi kawasan perkantoran di Kota Gunungsitoli adalah seluas 45,06 Ha. Alokasi ruang untuk kawasan perkantoran direncanakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Luas terbesar yang ditetapkan menjadi kawasan perkantoran terletak pusat pemerintahan Kota Gunungsitoli yaitu di Kecamatan Gunungsitoli dengan luas 30,58 Ha.

Renccana kawasan perkantoran yang terdiri dari kantor Pemerintahan Kota Gunungsitoli berada pada satu kawasan yaitu kawasan area perkantoran di wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Untuk Area perkantoran swasta ditetapkan di pusat pelayanan kota dan di sub pusat pelayanan kota. Sedangkan fasilitas perkantoran kecamatan diarahkan berada pada Pusat-pusat WP dan Kantor Lurah/Desa dapat dipertahankan pada pusat-pusat lingkungan.

9) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Di Wilayah Kota Gunungsitoli saat ini terdapat tiga sistem transportasi yaitu sistem transportasi darat, laut dan udara. Adapun kawasan transportasi yang direncanakan dengan luas 105,29 Ha, dengan lokasi sebagai berikut:

a. Kawasan Bandar Udara Binaka di Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi;
b. Kawasan pelabuhan, meliputi:
    1. Kawasan Pelabuhan Gunungsitoli di Kelurahan Saombo

2. Kawasan Pelabuhan Pengumpul Lokal di Desa Siwalubanua II
3. Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Sisarahili Gamo, Desa Ombolata Ulu, Desa Olora, Desa Teluk Belukar, Desa Humene, dan Desa Luaha Laraga; dan
4. Kawasan Galangan Kapal di Desa Afia.

c. kawasan terminal barang meliputi terminal barang di kawasan pergudangan dan industri;

1. Kawasan terminal umum, meliputi:
2. Terminal penumpang tipe B di Desa Faekhu;
3. Pengembangan terminal penumpang tipe B di Desa Sisarahili Gamo
4. Pengembangan terminal penumpang tipe C di Desa Tumori Balohili;
5. Pengembangan terminal penumpang tipe C di Desa Fowa; dan
6. Pengembangan terminal penumpang tipe C di Desa Nazalou Alo'oa.

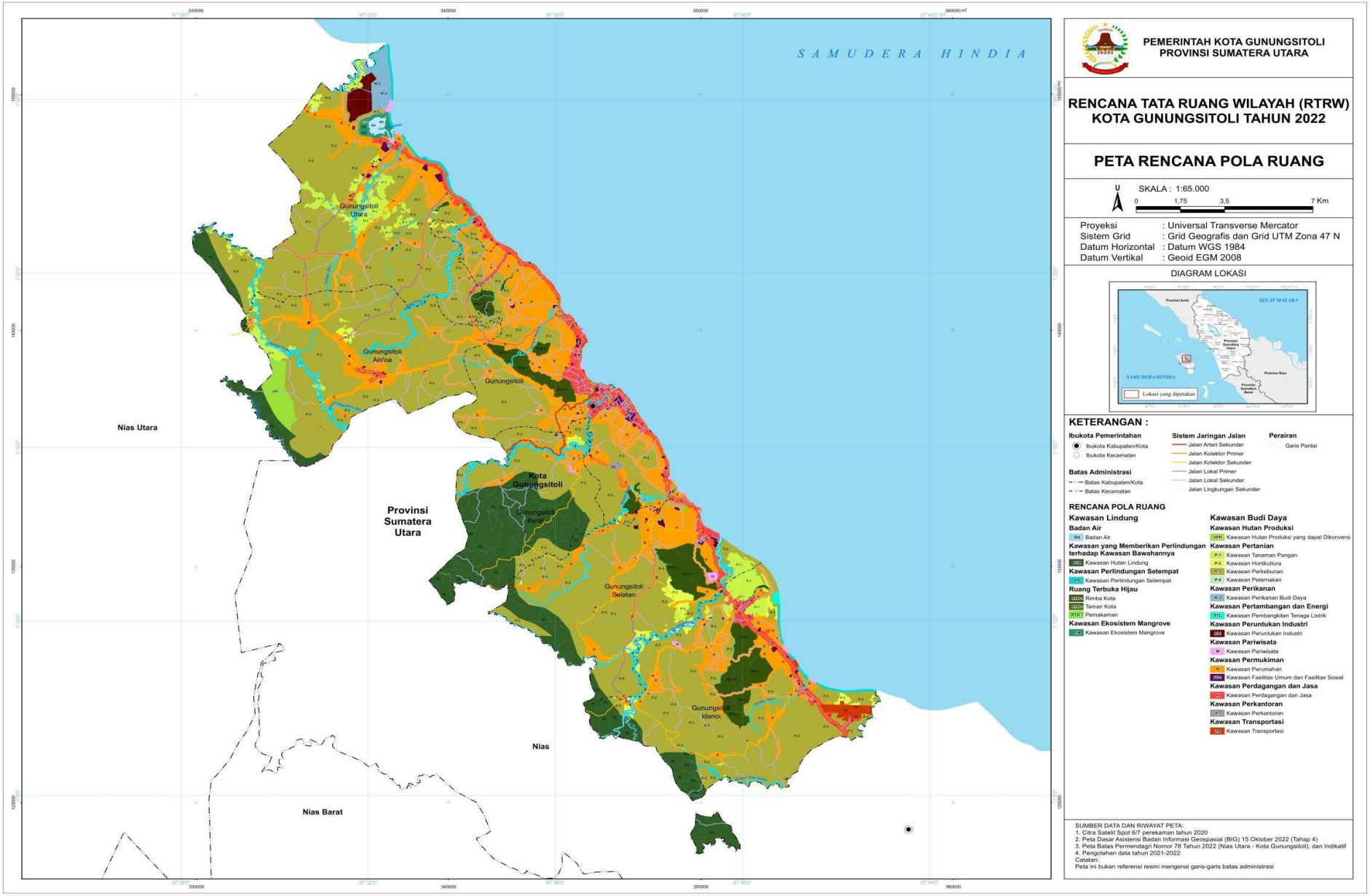
SAMUDERA HINDIA
Nias Utara
Provinsi Sumatera Utara
Nias Barat
Nias
Gunungsitoli Utara
Gunungsitoli Alo'oa
Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
Gunungsitoli Barat
Gunungsitoli Selatan
Gunungsitoli Idanoi
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022
PETA RENCANA POLA RUANG
SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
SELAT MALAKA
SAMUDERA HINDIA
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Sistem Jaringan Jalan
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Badan Air
BA Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
HL Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
PS Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
RTH Rimba Kota
RTH Taman Kota
RTH Pemakaman
Kawasan Ekosistem Mangrove
KM Kawasan Ekosistem Mangrove
Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
HPK Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
Kawasan Pertanian
P-1 Kawasan Tanaman Pangan
P-2 Kawasan Hortikultura
P-3 Kawasan Perkebunan
P-4 Kawasan Peternakan
Kawasan Perikanan
K-2 Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pertambangan dan Energi
PTL Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
Kawasan Peruntukan Industri
SPK Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
W Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
R Kawasan Perumahan
FUS Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Kawasan Perdagangan dan Jasa
C Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perkantoran
K-T Kawasan Perkantoran
Kawasan Transportasi
TR Kawasan Transportasi
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar Asistensi Badan Informasi Geospasial (BIG) 15 Oktober 2022 (Tahap 4)
3. Peta Batas Permendagri Nomor 78 Tahun 2022 (Nias Utara - Kota Gunungsitoli); dan Indikatif
4. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu landscape based proxy dan landcover/landused based proxy, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

1) Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah bahwa penghitungan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah.

Kebutuhan air di Kota Gunungsitoli bersumber dari kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan air dari sumber domestik atau rumah tangga dilakukan dengan menghitung cakupan penduduk terlayanani sampai dengan akhir tahun perencanaan dengan menghitung dan memproyeksikan penduduk yang akan terlayani. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan menggunakan metode geometri. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Gunungsitoli berjumlah 142890 jiwa dengan kebutuhan air seesar 150 l/k/hari atau 54,75 m3/tahun sehingga di tahun 2023 kebutuhan air domestik sebesar 7.7823.227,50 m3/tahun. Kebutuhan air domestik akan meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Kemudian kebutuhan air non domestik didapatkan dengan memperhitungkan kebutuhan untuk lahan di Kota Gunungsitoli yang meliputi tutupan lahan sawah, perkebunan, ladang, dll. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /2/202 diperoleh nilai kebutuhan air untuk lahan di Kota Gunungsitoli sebesar 54967333m3/tahun dimana diasumsikan kebutuhan air untuk lahan tersebut akan tetap hingga akhir tahun perencanaan (tidak mempertimbangkan perubahan tutupan lahan), kemudian dilakukan pemodelan menggunakan peta wilayah aliran sungai dengan sebaran ketersediaan air melalui sistem grid ukuran 30” x 30” atau 0.9 km x 0.9 km.

Melalui perhitungan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non domesik yang diperoleh dari perhitungan tutupan lahan di Kota Gunungsitoli maka dapat diperoleh kebutuhan air total di Kota Gunungsitoli. Pada tahun 2023 kebutuhan air total Kota Gunungsitoli sebesar 62.790.561 m3/tahun. Proyeksi kebutuhan air total hingga akhir tahun perencanaan yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Proyeksi Kebutuhan Air Dan Ketersediaan Air Serta Status Daya Dukung Air Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029

No	Tahun	Jumlah dan Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air		Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Non Domestik	Kebutuhan Air Total	Ketersediaan Air	Selisih	Status Daya Dukung Air
		(Jiwa)	(L/K)/Hari)	(m^3/tahun)	(m^3/tahun)	(m^3/tahun)	(m^3/tahun)	(m^3/tahun)	(m^3/tahun)	
1	2023	142.890	150	54,75	7.823.227,50	54.967.333	62.790.561	209.888.853	147.098.293	Surplus
2	2024	145.476	150	54,75	7.964.811,00	54.967.333	62.932.144	209.888.853	146.956.709	Surplus
3	2025	148.109	150	54,75	8.108.967,75	54.967.333	63.076.301	209.888.853	146.812.552	Surplus
4	2026	150.790	150	54,75	8.255.752,50	54.967.333	63.223.086	209.888.853	146.665.768	Surplus
5	2027	153.520	150	54,75	8.405.220,00	54.967.333	63.372.553	209.888.853	146.516.300	Surplus
6	2028	156.298	150	54,75	8.557.315,50	54.967.333	63.524.649	209.888.853	146.364.205	Surplus
7	2029	**159.127**	**150**	**54,75**	**8.712.203,25**	**54.967.333**	**63.679.536**	**209.888.853**	**146.209.317**	**Surplus**

Sumber : KLHS Kota Gunungsitoli

Berdasarkan perhitungan kebutuhan air Kota Gunungsitoli melalui Tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kebutuhan air di setiap tahunnya akan meningkat, hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Gunungsitoli hingga akhir tahun perencanaan di tahun 2029. Pada tahun 2029 kebutuhan air total di Kota Gunungsitoli sebesar 63.679.536 m3/tahun dengan selisih antara kebutuhan air total dengan ketersediaan air adalah sebesar 146.209.317 m3/tahun. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diperoleh status daya dukung air di Kota Gunungsitoli di tahun 2029 termasuk pada kategori belum terlampaui atau surplus. Sehingga kondisi daya dukung dan daya tampung air di Kota Gunungsitoli termasuk pada kondisi wilayah berlebih air dan masih dapat memenuhi kebutuhan airnya.

2) Daya Dukung Pangan

Sektor pertanian bukan menjadi kontribusi utama pertumbuhan ekonomi di Kota Gunungsitoli. Daya dukung pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Kondisi daya dukung pangan dibedakan menjadi sudah terlampaui dan belum terlampaui, yang ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan yang dikonversikan kedalam bentuk energi dengan satuan kalori. Ketersediaan pangan di Kota Gunungsitoli dihitung berdasarkan produksi komoditas pangan sebagai berikut:

1. Komoditas perkebunan, antara lain: lada, pala, tebu, pinang, aren, kemiri, kulit manis, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao dan andaliman.
2. Komoditas peternakan, antara lain: sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi, ayam, itik, burung puyuh, baik daging maupun telur.
3. Komoditas tanaman pangan, antara lain: beras, ubi, kacang-kacangan dan jagung.
4. Komoditas perikanan, antara lain: patin, lele, nila, ikan mas, kakap, bandeng, udang, cakalang, tongkol, tuna, dan lainnya.
5. Komoditas hortikultura, antara lain: buah-buahan, tanaman biofarmaka, serta tanaman sayuran.

Adapun produksi berbagai komoditas pangan dan konveri bahan pangan menjadi energi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.23

Jumlah Produksi dan Konversi Bahan Pangan menjadi Energi di Kota Gunungsitoli

No	Peternakan	Ton	Kkal	Perkebunan	Ton	Kkal	Perikanan	Ton	Kkal
1	Sapi	3.817.341	767.285.541	Cengkeh	1.155.035	381.161.550	Lele	8.624.342	905.555.910
2	Kerbau	384.529	30.377.791	Pala	138.646	71.818.628	Nila	8.647.364	769.615.396
3	Kambing	342.861	51.086.289	Pinang	239.783	79.128.390	Tongkol	13.162.529	1.316.252.900
4	Domba	357.840	113.435.280	Kemiri	321.527	217.030.725	Tuna	12.438.554	1.343.363.832
5	Babi	352.784	159.811.152	Kelapa	4.246.741	764.413.380	Lainnya	15.764.325	1.986.304.950
6	Ayam	364.831	108.719.638	Kopi Robusta	195.245	47.054.045			
7	Ayam petelur	341.825	101.863.850	Kakao	261.943	81.464.273			
8	Itik	368.659	118.339.539						
9	Ayam kampung	358.709	106.895.282						
Total		**6.689.379**	**1.557.814.362**	**Total**	**6.558.920**	**1.642.070.991**	**Total**	**58.637.114**	**6.321.092.988**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Gunungsitoli

No	Pertanian			Pertanian Lahan Kering					
	Hortikultura	Ton	Kkal	Tanaman Sayuran (a)	Ton	Kkal	Tanaman Hortikultara (b)	Ton	Kkal
1	Alpukat	15.431.513	15.431.513	Bayam	19.786.119	316.577.904	Jahe	12.786.156	652.093.956
2	Belimbing	16.241.231	16.241.231	Buncis	18.675.624	634.971.216	Kapulaga	8.622.012	2.681.445.732
3	Duku/ Langsat/ Kokosan	16.268.502	16.268.502	Cabai Rawit	23.696.431	2.843.571.720	Kencur	9.875.004	2.024.375.820
4	Durian	39.212.154	39.212.154	Kacang Panjang	16.879.215	523.255.665	Kunyit	12.861.200	887.422.800
5	Jambu Air	15.413.152	15.413.152	Kangkung	15.896.582	445.104.296	Laos/ Lengkuas	11.945.205	310.575.330
6	Jambu biji	16.342.515	16.342.515	Ketimun	14.962.435	119.699.480	Mengkudu/ Pace	8.736.140	133.662.942
7	Jeruk siam/ keprok	13.352.628	13.352.628	Petsai/ Sawi	10.474.607	293.288.996	Temulawak	8.925.244	2.784.676.128
8	Mangga	19.234.259	19.234.259	Semangka	15.954.325	446.721.100	Jeruk Nipis	8.617.032	258.510.960
9	Manggis	12.431.620	12.431.620	Terung	17.425.666	487.918.648	Serai	11.748.212	1.163.072.988
10	Nenas	14.602.135	14.602.135	Cabai besar	24.665.334	887.952.024			
11	Pepaya	11.436.451	11.436.451	Cabai keriting	23.598.742	849.554.712			
12	Pisang	21.241.230	21.241.230	Jamur tiram	19.545.631	586.368.930			

13	Rambutan	8.612.342	8.612.342						
14	Salak	9.123.415	9.123.415						
15	Sawo	10.346	10.346						
16	Sirsak	11.462	11.462						
17	Sukun	12.574	12.574						
18	Buah Naga	9.476	9.476						
19	Lemon	11.626	11.626						
Total		**228.998.631**	**16.761.882.319**	**Total**	**221.560.711**	**8.434.984.691**	**Total**	**94.116.205**	**10.895.836.656**

No	**Pertanian Lahan kering**		
	Tanaman Pangan	**Ton**	**Kkal**
1	Beras	48.678.120	17.378.088.765
2	Ubi Jalar	6.782.346	807.099.174
3	Ubi Kayu	7.455.329	1.148.120.666
4	Kacang Hijau	5.365.264	1.732.980.272
5	Jagung	8.584.351	1.261.899.597
Total		**76.865.410**	**22.328.188.474**

Ketersedian pangan dihitung dengan produksi berbagai komoditas pangan di Kota Gunungsitoli yang merupakan akumulasi produksi pada kabupaten/kota tahun 2021 dan 2023 yang kemudian dilakukan konversi energi terhadap hasil produksi komoditas pangan di Kota Gunungsitoli. Tabulasi dan proyeksi Konversi Ketersediaan Pangan di Kota Gunungsitoli Tahun 2023- 2029 dapat dilihat melaui Tabel berikut.

Tabel 2.24
Konversi Produksi Bahan Pangan (103 Juta Kkal) dan Proyeksi Ketersediaan Pangan di Kota Gunungsitoli Tahun 2023- 2029

No	Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan	Konversi Ketersediaan Pangan dan Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2023- 2029 (103 Juta Kkal)						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Peternakan	1.558	1.552	1.537	1.528	1.424	1.409	1.380
2	Perkebunan	1.642	1.494	1.357	1.351	1.329	1.328	1.302
3	Perikanan	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321
4	Pertanian	16.762	16.545	16.476	16.364	16.205	16.195	16.122
5	Pertanian Lahan kering	41.659	41.362	40.721	40.614	40.206	39.624	39.169
Total		**67.942**	**67.274**	**66.412**	**66.178**	**65.710**	**65.485**	**64.294**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Gunungsitoli

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total ketersediaan pangan dalam energi (Kkal) pada Tahun 2023 sebesar 67.942 (103 Juta Kkal). Proyeksi ketersediaan pangan dilakukan untuk dapt memperkirakan nilai dari ketersediaan pangan di Kota Gunungsitoli hingga akhir tahun perencanaan hingga tahun 2029. Sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan apakah dapat atau tidak dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kota Gunungsitoli. Ketersediaan bahan pangan dapat dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Sehingga dalam memperhitungkan perubahan bahan pangan di Kota Gunungsitoli dilakukan dengan mengasumsikan bahwa adanya perubahan produksi bahan pangan akan sejalan terhadap perubahan penggunaan lahan di Kota Gunungsitoli. Perubahan produksi tanaman pangan yaitu khususnya padi, diasumsikan akan sejalan dengan perubahan luas sawah. Lalu perubahan produksi bahan pangan dari hortikultura, seperti tanaman pangan selain padi, tanaman sayuran, buah-buahan, serta biofarmaka diasumsikan akan sejalan dengan perubahan luas pertanian lahan kering. Produksi bahan pangan dari perkebunan diasumsikan sejalan dengan perubahan luas lahan perkebunan, sedangkan perubahan produksi bahan pangan dari peternakan, terutama ternak besar, diasumsikan sejalan dengan perubahan luas lahan perkebunan, mengingat peternakan direncanakan akan terintegrasi dengan perkebunan. Produksi komoditas

pangan dari perikanan diasumsikan tetap karena luasan perairan laut yang merupakan salah satu sumber perikanan tidak mengalami perubahan.

3) Potensi Timbulan Sampah

Perhitungan timbulan sampah di Kota Gunungsitoli dihitung dengan menghitung dan memproyeksikan jumlah penduduk di tahun 2023 hingga tahun 2029 kemudian dikalikan dengan besaran timbulan sampah berdasarkan kategori kota. Pada tahun 2023 jumlah penduduk kota gunungsitoli berjumlah 142.890 jiwa sehinga termasuk kota sedang. Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Gunungsitoli di tahun 2023 hingga tahun 2029 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.25
Proyeksi Timbulan Sampah di Kota Gunungsitoli Tahun 2023– 2029

No	Tahun	Jumlah dan Proyeksi Penduduk	Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan kategori Kota Sedang		Timbulan sampah		
		(jiwa)	(L/k/hari)	(kg/k/hari)	L/hari	m^3/hari	(kg/k/hari)
1	2023	142.890	2,75	0,70	392.947,50	392,95	100.023,00
2	2024	145.476	2,75	0,70	400.059,00	400,06	101.833,20
3	2025	148.109	2,75	0,70	407.299,75	407,30	103.676,30
4	2026	150.790	2,75	0,70	414.672,50	414,67	105.553,00
5	2027	153.520	2,75	0,70	422.180,00	422,18	107.464,00
6	2028	156.298	2,75	0,70	429.819,50	429,82	109.408,60
7	**2029**	**159.127**	**2,75**	**0,70**	**437.599,25**	**437,60**	**111.388,90**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Gunungsitoli

Timbulan sampah di Kota Gunungsitoli meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2029. Peningkatan timbulan sampah tersebut meningkat seiring dengan adanya peningkatan penduduk di Kota Gunungsitoli sampai dengan tahun 2029. Timbulan sampah terbesar berada pada tahun 2029 dengan volume sebesar 437.599,25 l/hari atau 437,60 m3/hari dan berat sebesar 111.388,90 kg/k/hari. Rendahnya pengelolaan dan penanganan sampah ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah kota untuk mengangkut sampah. Untuk memaksimalkan pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli, dibutuhkan alat-alat pengangkut sampah seperti dump truck dan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara yang tersebar di berbagai penjuru kota.

Selain sampah domestik, pengelolaan limbah B3 juga merupakan salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan. Limbah B3 merupakan limbah yang membutuhkan penanganan dan perlakuan khusus. Untuk itu, pengelolaan limbah B3 dilakukan secara mandiri oleh RSUD maupun industri di Kota Gunungsitoli. Permasalahan lain yang ada di Kota Gunungsitoli terkait dengan persampahan adalah masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola dan membuang sampah secara bertanggungjawab. Hal ini diketahui dari banyaknya timbulan sampah yang ada disepanjang pinggir pantai dan aliran sungai. Perilaku masyarakat yang seperti ini sangat disayangkan karena selain merusak estetika alam, juga dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap ekosistem darat maupun laut. Karena Kota Gunungsitoli berada di Pulau Nias, maka dampak yang paling terasa adalah dari ekosistem laut. Sampah maupun limbah yang dibuang secara tidak bertanggungjawab akan mengalir ke laut bebas. Setelah sampai ke laut, sampah tersebut sangat sulit untuk terurai secara alami, khususnya sampah plastik. Sampah plastik tersebut apabila tidak terdampar kembali ke daratan, maka akan tersimpan di lautan dan merusak ekosistem terumbu karang, tempat berburu ikan, dan dasar laut.

4) Timbulan lumpur tinja

Dampak dan risiko lingkungan lain yang disebabkan oleh penduduk adalah timbulan lumpur tinja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2017 pada Lampiran II halaman 92 digunakan dengan pendekatan persentase pelayanan 60% dari jumlah penduduk yang ada didaerah layanan. Data proyeksi timbulan lumpur tinja Kota Gunungsitoli dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.26
Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029

No	Tahun	Jumlah dan Proyeksi Penduduk	Persentase Pelayanan	Debit timbulan lumpur tinja	Timbulan Air limbah	
		(jiwa)	%	L/k/hari	L/hari	(m^3/hari)
1	2023	142.890	60	0,5	42.867,00	42,867
2	2024	145.476	60	0,5	43.642,80	43,6428
3	2025	148.109	60	0,5	44.432,70	44,4327
4	2026	150.790	60	0,5	45.237,00	45,237
5	2027	153.520	60	0,5	46.056,00	46,056
6	2028	156.298	60	0,5	46.889,40	46,8894
7	**2029**	**159.127**	**60**	0,5	**47.738,10**	**47,7381**

5) Timbulan air limbah

Perhitungan timbulan air limbah domestik dihitung dengan mengasumsikan bahwa 80% dari kebutuhan air bersih yang akan menjadi air limbah. Proyeksi timbulan air limbah hingga tahun 2029 pada periode 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029

No	Tahun	Jumlah dan Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Faktor Timbulan air limbah	Timbulan Air limbah
		(jiwa)	(m^3/tahun)	%	(m^3/tahun)
1	2023	142.890	7.823.227,50	80	6.258.582,00
2	2024	145.476	7.964.811,00	80	6.371.848,80
3	2025	148.109	8.108.967,75	80	6.487.174,20
4	2026	150.790	8.255.752,50	80	6.604.602,00
5	2027	153.520	8.405.220,00	80	6.724.176,00
6	2028	156.298	8.557.315,50	80	6.845.852,40
7	**2029**	**159.127**	**8.712.203,25**	**80**	**6.969.762,60**

Sumber : KLHS RPJMD Kota Gunungsitoli

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pada era modern ini, isu ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan semakin menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta mendukung perekonomian suatu negara. Ketahanan energi mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sedangkan ketahanan air berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata. Sementara itu, kemandirian pangan merupakan upaya untuk memproduksi pangan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Ketiga hal ini saling terkait dan menjadi kunci utama dalam menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik

Listrik merupakan salah satu prasarana wilayah yang dibutuhkan dalam kehidupan penduduk. Tersedianya prasarana listrik yang memadai akan memacu pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Sebaliknya, kekurangan energi listrik

akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan energi listrik. Listrik memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan penduduk, maka dari itu fungsi listrik memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang kegiatan yang berjalan di suatu wilayah. Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian. Penetapan kawasan pembangkit tenaga listrik ditetapkan dengan maksud:

a. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Kota Gunungsitoli;
b. Peningkatan kuantitas dan penambahan jaringan listrik pada wilayah yang sedang berkembang dan pada daerah yang diarahkan untuk perkembangan kota baik pada kawasan permukiman baru maupun perdagangan dan jasa
c. Memastikan keamanan kawasan pembangkit terhadap kegiatan lain yang dapat menganggu fungsi kawasan.

Rencana kawasan pembangkit tenaga listrik Energi dalam Kota Gunungsitoli direncanakan pada kondisi eksisting dengan luas 15,76 Ha, meliputi:

a. Kecamatan Gunungsitoli dengan luas 0,77 Ha
b. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas 14,99 Ha.

2) Kawasan Badan Air

Badan air yaitu peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang difungsikan sebagai penampungan air permukaan dapat berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Adapun rencana pola ruang kawasan lindung badan air berupa sungai – sungai yang melintasi wilayah Kota Gunungsitoli.

Sungai merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah daripada permukaan tanah di sekitarnya dan menjadi media alir air menuju laut, danau atau rawa. Sungai menjadi bagian yang sulit dilepaskan dari kehidupan sehari- hari, baik bagi makhluk hidup maupun bagi lingkungan sehingga badan air berupa sungai perlu dilindungi. Rencana badan air di Kota Gunungsitoli tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas badan air kurang lebih 258,36 hektar, meliputi:

a. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli dengan luas kurang lebih 17,79 Ha
b. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan luas kurang lebih 33,95 Ha
c. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli Barat dengan luas kurang lebih 19,98 Ha
d. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas kurang lebih 36,61 Ha

e. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dengan luas kurang lebih 58,18 Ha
f. Badan Air di Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas kurang lebih 91,84 Ha

3) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Tipologi untuk kawasan tanaman pangan adalah pertanian lahan basah (sawah) yang berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan pengembangan perekonomian Wilayah Kota Gunungsitoli. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan diarahkan pada :

a. Area lahan dengan kemiringan lahan < 8 % serta kawasan-kawasan yang sudah memiliki irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana dan tadah hujan;
b. Mempertahankan lahan basah yang ada (penggunaan lahan eskisting adalah sawah);
c. Meningkatkan pengelolaan areal-areal persawahan yang terlantar;
d. Meningkatkan kualitas daerah pelayanan irigasi;
e. Pengalihgunaan lahan rawa untuk pertanian lahan basah;

Berdasarkan kriteria diatas, maka di Kota Gunungsitoli masih terdapat beberapa kawasan pertanian tanaman pangan yang dapat dipertahankan meliputi :

a. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Gunungsitoli Utara (Afia di Lasara Sowu, Gawu-gawu Bo'uso dan Togi Lauri di Gawu-gawu Bo'uso, To'o Hilimbowo di Hilimbowo Olora, Sowu di Hambawa, Sinoto/Bodalu dan Hiligafia di Tetehosi Afia, Lewuombanua di Teluk Belukar);
b. Kecamatan Gunungsitoli (Bangowo di Dahana, Madula di Madula, Bodowu di Madolaoli);
c. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (Bira di Tuhegeo I - Dahana, Bawambua di Dahana, Atua Si'ite di Tuhegeo I, Laezoyo di Hilimbawodesolo – Bawodesolo, Laehuwa di Fadoro, Hunambou di Binaka);
d. Kecamatan Gunungsitoli Barat (Dawaya dan Tumori di Sihareo Saiwahili, Lazasebolo di Tumori - Sihareo Saiwahili - Tumori Balohili);
e. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (nazalou Lolowua dan Sowu di nazalou Lolowua, Bo zilimo di Fadaro You, Samiri, Megana di nazalou Alo'oa);dan

f. Kecamatan Gunungsitoli Selatan (Idano Gana'a dan Laezoyo di Ononamolo I Lot, Sawuwu Si'o dan Namo Sebolo di Hiligodu Ombolata, Dahadano di Lololakha, Mate-mate dan Laehuwa di Mazingo, Sahondro di Lolofaoso).

Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 49,53 pada tahun 2020 menjadi 66,12 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan, meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gunungsitoli telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ketahanan pangan di tingkat kota, meskipun tantangan tetap ada. Berikut perkembangan capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli:

Tabel 2.28
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	49,53	45,67	43,7	65,13	66,12

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan. Tujuan Skor PPH adalah menilai keragaman konsumsi pangan, mengidentifikasi ketidakseimbangan konsumsi antar kelompok pangan dan menjadi acuan dalam kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Berikut Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.29

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Gunungsitoli

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan		76	73,4	69,6	73,4

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Gunungsitoli secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Sasarannya adalah untuk:

a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
b. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Jenis dan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Gunungsitoli terdiri dari:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung
b. Kawasan Perlindungan Setempat, antara lain meliputi : kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sempadan mata air;
c. Kawasan ekosistem mangrove;
d. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)

Tabel 2.30
Proyeksi Air Limbah Domestik Kota Gunungsitoli Tahun 2023-2029

Kawasan	Sub Kawasan	Kecamatan	Luas (Ha)
Badan Air	Badan Air	Gunungsitoli	17,79
		Gunungsitoli Alo'oa	33,95
		Gunungsitoli Barat	19,98
		Gunungsitoli Idanoi	36,61
		Gunungsitoli Selatan	58,18
		Gunungsitoli Utara	91,84
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	Gunungsitoli Alo'oa	261,38
		Gunungsitoli Barat	1.653,01
		Gunungsitoli Idanoi	627,50
		Gunungsitoli Selatan	406,32
		Gunungsitoli Utara	157,28
Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	Gunungsitoli	100,20
		Gunungsitoli Alo'oa	177,19
		Gunungsitoli Barat	102,91
		Gunungsitoli Idanoi	189,39
		Gunungsitoli Selatan	148,59
		Gunungsitoli Utara	281,93

Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove	Gunungsitoli Utara	64,84
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	Gunungsitoli	335,81
		Gunungsitoli Idanoi	462,14
		Gunungsitoli Selatan	297,79
		Gunungsitoli Utara	37,34
	Taman Kota	Gunungsitoli	5,40
		Gunungsitoli Idanoi	1,00
		Gunungsitoli Utara	0,04
	Pemakaman	Gunungsitoli	6,05
		Gunungsitoli Idanoi	0,28
		Gunungsitoli Selatan	3,02
		Gunungsitoli Utara	2,69
Grand Total		Kota Gunungsitoli	5.580,49

Sumber : RTRW Kota Gunungsitoli

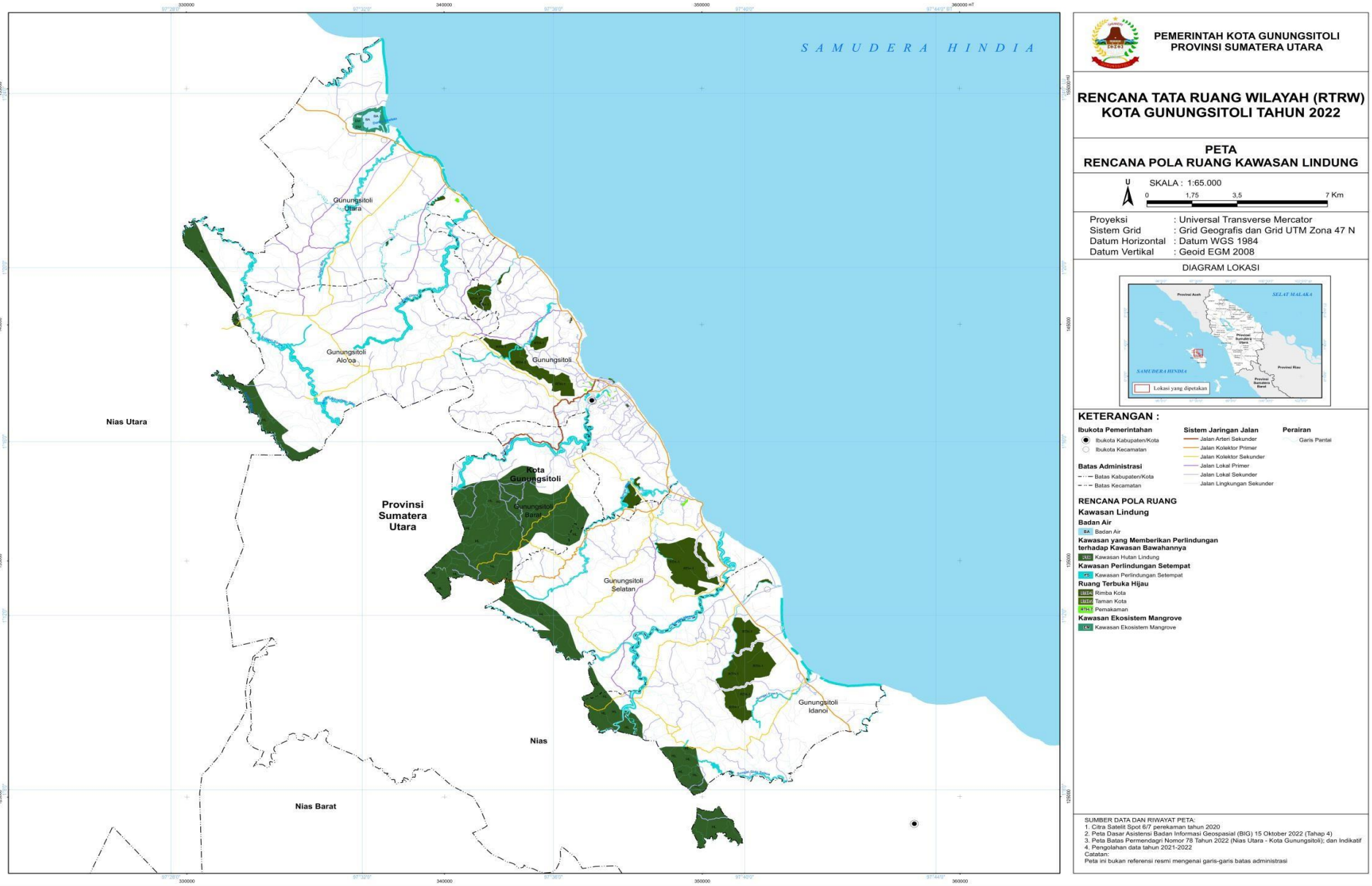
SAMUDERA HINDIA
Gunungsitoli Utara
Gunungsitoli Alo'oa
Gunungsitoli
Nias Utara
Kota Gunungsitoli
Provinsi Sumatera Utara
Gunungsitoli Barat
Gunungsitoli Selatan
Gunungsitoli Idanoi
Nias
Nias Barat
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022
PETA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
SKALA : 1:65.000
0 1,75 3,5 7 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
SELAT MALAKA
SAMUDERA HINDIA
Provinsi Riau
Lokasi yang dipetakan
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/Kota
Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten/Kota
Batas Kecamatan
Sistem Jaringan Jalan
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Sekunder
Perairan
Garis Pantai
RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
Badan Air
BA Badan Air
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
HL Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Perlindungan Setempat
PS Kawasan Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau
RTH1 Rimba Kota
RTH2 Taman Kota
RTH3 Pemakaman
Kawasan Ekosistem Mangrove
EM Kawasan Ekosistem Mangrove
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Spot 6/7 perekaman tahun 2020
2. Peta Dasar Asistensi Badan Informasi Geospasial (BIG) 15 Oktober 2022 (Tahap 4)
3. Peta Batas Permendagri Nomor 78 Tahun 2022 (Nias Utara - Kota Gunungsitoli); dan Indikatif
4. Pengolahan data tahun 2021-2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Penentuan kawasan hutan lindung di Kota Gunungsitoli mengacu kepada SK Menhut 6609 tahun 2021 yang merupakan surat keputusan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk wilayah sumatera. Berdasarkan surat keputusan Menteri dimaksud tersebut maka luas Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kota Gunungsitoli seluas kurang lebih 3.105,50 Ha meliputi :

a. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan luas sekitar 261,38 Ha.
b. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Gunungsitoli Barat dengan luas sekitar 1.653,01 Ha.
c. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas sekitar 627,50 Ha.
d. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Gunungsitoli Selatan dengan luas sekitar 406,32 Ha.
e. Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas sekitar 157,28 Ha.

Dalam rangka menjaga kawasan lindung agar tetap dilestarikan, rencana perwujudan kawasan hutan lindungnya, meliputi:

a. Pencegahan alih fungsi kawasan hutan lindung;
b. Pengaturan pemanfaatan kawasan hutan lindung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Pemanfaatan kawasan terbangun di kawasan hutan lindung disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

2) Kawasan Perlindungan Setempat

Rencana kawasan perlindungan setempat di Kota Gunungsitoli terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan situ, danau, embung, dan waduk dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.000,22 Ha.

A. Kawasan Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai penting untuk dikembangkan dimana tujuan pengembangan sempadan pantai adalah untuk melindungi kondisi fisik pantai dan mengurangi tingkat abrasi pantai serta sebagai kawasan penyangga (sabuk pohon) dari terjangan gelombang air laut. Kota Gunungsitoli yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan pesisir pantai dan telah terbangun. Adapun fungsi penggunaan lahan yang berada di kawasan pesisir pantai Kota Gunungsitoli pada Tahun 2021 meliputi:

a. Kegiatan perkantoran dan pemerintahan;
b. Kegiatan perdagangan dan jasa;
c. Kegiatan sosial;
d. Kegiatan permukiman penduduk;dan
e. Kegiatan pariwisata kota.

Adapun penentuan garis sempadan pantai ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan, serta kondisi eksisting lahan sekarang. Adapun penetapan garis sempadan pantai mulai dari 20 meter – 100 meter dari titik pasang tertinggi. Berdasarkan karakteristik sempadan pantai yang ada, maka rencana kawasan sempadan pantai di Kota Gunungsitoli hanya ditetapkan terdapat pada kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kawasan sepadan pantai tersebut meliputi :

a. Desa Teluk Belukar, Desa Afia, Desa Olora di Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas 51,15 Ha; dan
b. Desa Bawodesolo, Desa Hilimbawodesolo, Desa Dahana, Desa Tuhegeo I, Desa Simanaere, Desa Humene, Desa Siwalu Banua II, Desa Fowa, Desa Idano Tae, Desa Binaka di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan luas 70,02 Ha.

Untuk kawasan sempadan yang telah bertampalan dengan fungsi lain, ketentuan pemanfaatan lahannya harus disesuaikan dan diberi ketentuan tambahan berupa ketentuan khusus baik pada kawasan yang sudah terbangun dan yang mungkin akan berkembang dengan tetap memperhatikan keandalan bangunan dan mitigasi bencana atau sesuai dengan ketentuan peraturan bangunan gedung yang berlaku di Kota Gunungsitoli.

B. Sempadan Sungai

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria:

a. Garis sempadan sungai/anak sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
b. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
c. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
d. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
e. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
f. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
g. Untuk daerah Kota daerah aliran sungai di Kota Gunungsitoli direncanakan akan dilakukan pengendalian berupa membatasan pembangunan yang mengarah ke bibir sungai. Hal ini berguna untuk mencega banjir dan sedimentasi di sekitar sungai.

C. Sempadan Situ, Danau, Embung, Dan Waduk

Banjir yang melanda di berbagai daerah belakangan ini mengingatkan kembali akan pentingnya situ, danau, embung, dan waduk untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah secara alami (ekodrainase). Ini sekaligus juga untuk meredam banjir secara signifikan.

Sempadan situ, danau, embung, dan waduk adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan air yang berfungsi sebagai kawasan pelindung situ danau, embung, dan waduk tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, jarak sempadannya sejauh 50 meter, yang dihitung dari muka air tertinggi, dan bebas bangunan. Fungsi utamanya meliputi pelepasan air tanah pada mata air, pengaliran

air, pengendali banjir, penampungan air, irigasi pertanian, pariwisata air, serta habitat biota air. Untuk perlindungan dan optimalisasi fungsi situ dan sejenisnya, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menetapkan garis sempadan dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi eksisting, maka rencana kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk di Kota Gunungsitoli hanya ditetapkan terdapat pada kecamatan Gunungsitoli Utara.

Pentingnya penetapan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, maka perlu upaya bersama melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait pentingnya perlindungan dan optimalisasi fungsi Situ Danau Embung Waduk (SDEW). Dengan melindungi fungsi SDEW dari pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti penyusutan luas badan air, pendangkalan/sedimentasi SDEW, okupasi tepi badan air, tumbuhnya eceng gondok, pencemaran badan air oleh limbah/sampah/pakan ikan; dan hancurnya keanekaragaman hayati endemik di SDEW sebagai dampak dari menurunnya kualitas air.

3) Ruang Terbuka Hijau

Kawasan ruang terbuka hijau selain berfungsi sebagai paru-paru kota, berfungsi sebagai salah satu unsur pembentuk struktur tata ruang kota dan dalam pola ruang merupakan kawasan yang dapat berfungsi menunjang fungsi lindung. Pengelolaan kawasan/ruang terbuka hijau ini secara umum meliputi :

a. Pembatasan pendirian bangunan-bangunan, kecuali yang memiliki fungsi sangat vital atau bangunan-bangunan yang merupakan penunjang dan menjadi bagian dari kawasan ruang terbuka hijau.
b. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan taman-taman kota/ lingkungan
c. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman.

Untuk menghitung kebutuhan luas RTH publik Kota Gunungsitoli digunakan metode perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan persentase yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan yang terbaru yaitu Undang-undang no. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 20 (dua puluh) persen ruang

terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat. Maka perhitungan RTH adalah sebagai berikut :

a. Luas daratan wilayah Kota Gunungsitoli
b. Standar : UU no.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Luas RTH = 20% dari luas perkotaan).
c. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Lindung) Kota Gunungsitoli sesuai standar UU no. 26 Tahun 2007: 30% dari 28.634,74 = 8.590,42 Ha.
d. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Privat) Kota Gunungsitoli sesuai standar UU no. 26 Tahun 2007: 10% dari 28.634,74 Ha = 2.863,47 Ha.
e. Kebutuhan luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Publik) Kota Gunungsitoli sesuai standar UU no. 26 Tahun 2007: 20% dari 28.634,74 Ha = 5.726,95 Ha.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Hutan mangrove sendiri adalah salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya, hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sepanjang garis pantai dan subtropis. Adapun fungsi hutan mangrove yang paling utama adalah mencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang laut. Selain itu, hutan mangrove juga dapat mengurangi 10% (sepuluh persen) hingga 31% (tiga puluh satu persen) pelepasan emisi karboni tahunan dari sektor penggunaan lahan di Indonesia, serta mempunyai beberapa keterikatan dan kontribusi dalam pemenuhan manusia, baik dalam penyediaan bahan pangan, papan, atau kesehatan. Untuk itu, upaya pelestarian hutan mangrove sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem.

Ekosistem mangrove adalah ekosistem pantai yang disusun oleh berbagai jenis vegetasi yang mempunyai bentuk adaptasi biologis dan fisiologis secara spesifik terhadap kondisi lingkungan yang cukup bervariasi. Ekosistem mangrove umumnya didominasi oleh beberapa spesies mangrove khusus antara lain Rhizophora sp, Avicennia sp, Bruguiera sp, dan Sonneratia sp. Spesies ini dapat tumbuh dengan baik pada ekosistem perairan dangkal karena adanya bentuk perakaran yang dapat membantu untuk beradaptasi terhadap lingkungan perairan.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem peralihan antara daratan dan lautan yang menjadi mata rantai yang sangat penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Serta sebagai tempat berlindung dan

memijah berbagai jenis udang, ikan, berbagai biota laut dan juga habitat satwa seperti burung, primata, reptilia dan lainnya. Di Kota Gunungsitoli kondisi eksisting hutan mangrove kurang lebih seluas 152 Ha tersebar di wilayah pesisir Kota Gunungsitoli. Akan tetapi dalam rencana pola ruang kondisi eksisting hutan mangrove yang ditetapkan sebagai pola ruang Kawasan Ekosistem Mangrove adalah seluas 64,84 Ha yang terdapat pada Kecamatan Gunungsitoli Utara.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan, isu keseimbangan lingkungan, saat ini menjadi titik fokus dalam pembangunan global. Dimana kualitas lingkungan hidup menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam program-program perencanaan pembangunan. Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Gambaran umum capaian indikator urusan lingkungan hidup untuk periode 2024 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Realisasi Indikator Lingkungan Hidup

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
Indeks Lingkungan Hidup	Indeks	60,18	66,25	65,37

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, 2024

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kota Gunungsitoli merupakan kawasan rawan bencana. Berdasarkan keadaan yang pernah dialami maka dalam perencanaan ini akan diarahkan sebuah jalur mitigasi dalam mengurangi resiko bencana jika sewaktu-waktu akan datang dengan tiba-tiba. Perlunya pembangunan prasarana atau petunjuk arah kelokasi yang lebih aman. Dari beberapa kejadian bencana yang pernah dialami, bencana tsunami merupakan ancaman yang paling besar memakan korban jiwa. Apalagi topogafi kawasan kota gunungsitoli yang berada pada daerah yang datar dengan kelerengan 0-15 % di sebelah timur kota Gunungsitoli atau pesisir pantai. Sehingga perlu direncanakan jalur evakuasi bencana.

Adapun jalur evakuasi bencana di Kota Gunungsitoli dengan memanfaatkan jaringan jalan yang strategis sebagai jalur evakuasi yang mengarah ke arah ke perbukitan yaitu meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana di Kecamatan Gunungsitoli, meliputi ruas Jalan Batas Kota Gunung Sitoli - Tetehosi - Gunungsitoli - Afia - Tuhemberua, ruas jalan Bawadesolo - Iraonolase, ruas jalan Faekhu - Dahana Tabaloho - Sihare'o Siwahili, ruas jalan Gunungsitoli - Hilina'a - Lolomoyo Tuhemberua - Batas Kota, ruas jalan Hilina'a - nazalou Alo'oa - Fadoro You - Batas Kota, ruas jalan Ilir - Mudik - Dahana Tabaloho, ruas jalan Ilir - Sisobahili Tabalaho, ruas jalan Ilir - Sisobahili Tabaloho - Sihare'o II Tabaloho - Miga, ruas jalan Miga - Lolowua - Ononamolo II lot - Batas Kota, ruas jalan Miga - Sihare'o II Tabaloho (Pastoran), ruas jalan Saewe - Iraono Lase, ruas jalan Saombo - Sifalaete Ulu, ruas jalan Sifalaete Tabaloho - Sihare'o II Tabaloho, ruas jalan Sifalaete Tabaloho
b. Sisobahili Tabaloho, ruas jalan Simp. Lamahoe - Simandraolo, dan ruas jalan Sisobahili Tabalohao - Dahana Tabaloho (TK Pesat);
c. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, meliputi ruas jalan Afia - Gawo-gawo Bo'uso - Lasara Sowu - niko'o Otano Dao - nazalou Lolowua - Batas Kota, ruas jalan Afia
d. Loloana'a Lolomoyo - niko'otano Dao, ruas jalan Bawadesolo - Iraonolase, ruas jalan Hilina'a - nazalou Alo'oa - Fadoro You - Batas Kota, ruas jalan nazalou Lolowua - nazolou Alo'oa, ruas jalan niko'o Otano Dao - Banua Sibohou, ruas jalan Saewe - Iraono Lase, dan ruas jalan Tetehosi Afia - Hambawa - nazalou Lolowua;
e. Kecamatan Gunungsitoli Barat, meliputi ruas Jalan Faekhu - Dahana Tabaloho
f. Sihare'o Siwahili, ruas jalan Faekhu - Lololakha - Sisobahili II Tanoseo, ruas jalan Gada - Onozikho - Batas Kota, ruas jalan Gunungsitoli - Hilina'a - Lolomoyo Tuhemberua - Batas Kota, ruas jalan Hiligodu Ombolata - Gada, ruas
g. jalan Miga - Lolowua - Ononamolo II lot - Batas Kota, ruas jalan Tumori - Gada
h. Ononamolo II lot, ruas jalan Tumori - Hilinakhe – Onozikho;
i. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, meliputi ruas jalan Batas Kota Gunung Sitoli - Tetehosi - Gunungsitoli - Afia - Tuhemberua, ruas jalan Dahana - Hilimbawadesolo, ruas jalan Foa - Samasi - Ombolata Idanoi - Onowaembo Idanoi - Batas Kota, ruas jalan Helefanikha - Tetehosi II, ruas jalan Hilimbawadesolo - Ononamolo I Lot, ruas jalan Hilimbawadesolo - Onowaembo Idanoi, ruas jalan Jl. Hilimbowo - Tuhegeo II - Batas Kota, ruas jalan Samasi - Tuhegeo II - Batas Kota, ruas jalan Simanaere - Helefanikha, ruas jalan Siwalubanua I - Hilihambawa, ruas jalan Siwalubanua II - Siwalubanua I;
j. Kecamatan Gunungsitoli Selatan, meliputi ruas Jalan Batas Kota Gunung Sitoli - Tetehosi - Gunungsitoli - Afia - Tuhemberua, ruas jalan Faekhu - Dahana Tabaloho -

Sihare'o Siwahili, ruas jalan Faekhu - Lololakha, ruas jalan Faekhu - Lololakha - Sisobahili II Tanoseo, ruas jalan Foa - Samasi - Ombolata Idanoi - Onowaembo Idanoi - Batas Kota, ruas jalan Hiligodu Ombolata - Gada, ruas jalan Hiligodu Ombolata - Hiligara, ruas jalan Hilimbawadesolo - Ononamolo I Lot, ruas jalan Lolomboli - Onowaembo Idanoi, ruas jalan Luaha Laraga - Faekhu, ruas jalan Miga - Lolowua - Ononamolo II lot - Batas Kota, ruas jalan Ononamolo I Lot - Jembatan Gantung, ruas jalan Ononamolo I Lot - Mazingo Tabaloho; dan

k. Kecamatan Gunungsitoli Utara, meliputi ruas Jalan Afia - Gawo-gawo Bo'uso - Lasara Sowu - niko'o Otano Dao - nazalou Lolowua - Batas Kota, ruas jalan Afia

l. Loloana'a Lolomoyo - niko'otano Dao, ruas jalan Batas Kota Gunung Sitoli - Tetehosi - Gunungsitoli - Afia - Tuhemberua, ruas jalan Bawadesolo - Iraonolase, ruas jalan Hambawa - Batas Kota, ruas jalan Lasara Sowu - Hambawa, ruas jalan niko'o Otano Dao - Banua Sibohou, ruas jalan Teluk Belukar - Hoya, ruas jalan Tetehosi Afia - Hambawa - nazalou Lolowua

Tempat evakuasi bencana di Kota Gunungsitoli direncanakan berada pada bangunan, fasilitas sosial, lapangan terbuka dan bangunan yang dapat menampung masyarakat di ketinggian meliputi :

a. Tempat evakuasi dalam Kecamatan Gunungsitoli, meliputi:
   1. Bukit Golkar,
   2. Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Gunungsitoli,
   3. Gereja BnKP Hatisiona,
   4. SD negeri 070987 Fadoro,
   5. SD negeri 070989 Hilina'a,
   6. SD negeri 077779 Sisobahili Tabaloho, dan
   7. SMK negeri 2 Gunungsitoli.

b. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, meliputi
   1. SMK negeri 1 Alo'oa, dan
   2. SMP negeri 3 Gunungsitoli Alo'oa;

c. Kecamatan Gunungsitoli Barat, meliputi
   1. Gereja BnKP Onozikho,
   2. SD negeri 071008 Gada dan
   3. SMP negeri 1 Gunungsitoli;

d. Tempat evakuasi dalam Kecamatan Gunungsitoli Selatan, meliputi:
   1. Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten nias,

2. SD negeri 077270 Simanaere, dan
3. SMP negeri 4 Gunungsitoli.

e. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi meliputi:
1. Balai Desa Siwalubanua I,
2. Bandara Bhinaka,
3. SD negeri 071064 Helefanikha,
4. SD negeri 071065 Hilimanaze, dan
5. SMK Swasta Kristen Tomosa I.

Kota Gunungsitoli merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, longsor dan banjir. Berdasarkan data dari BNPB bahwa Kota Gunungsitoli termasuk dalam indeks bencana tinggi. Adapun perkembangan Indeks Resiko Bencana Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32
Indeks Resiko Bencana Kota Gunungsitoli

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	Indeks	215,60	215,60	215,60	213	199,01

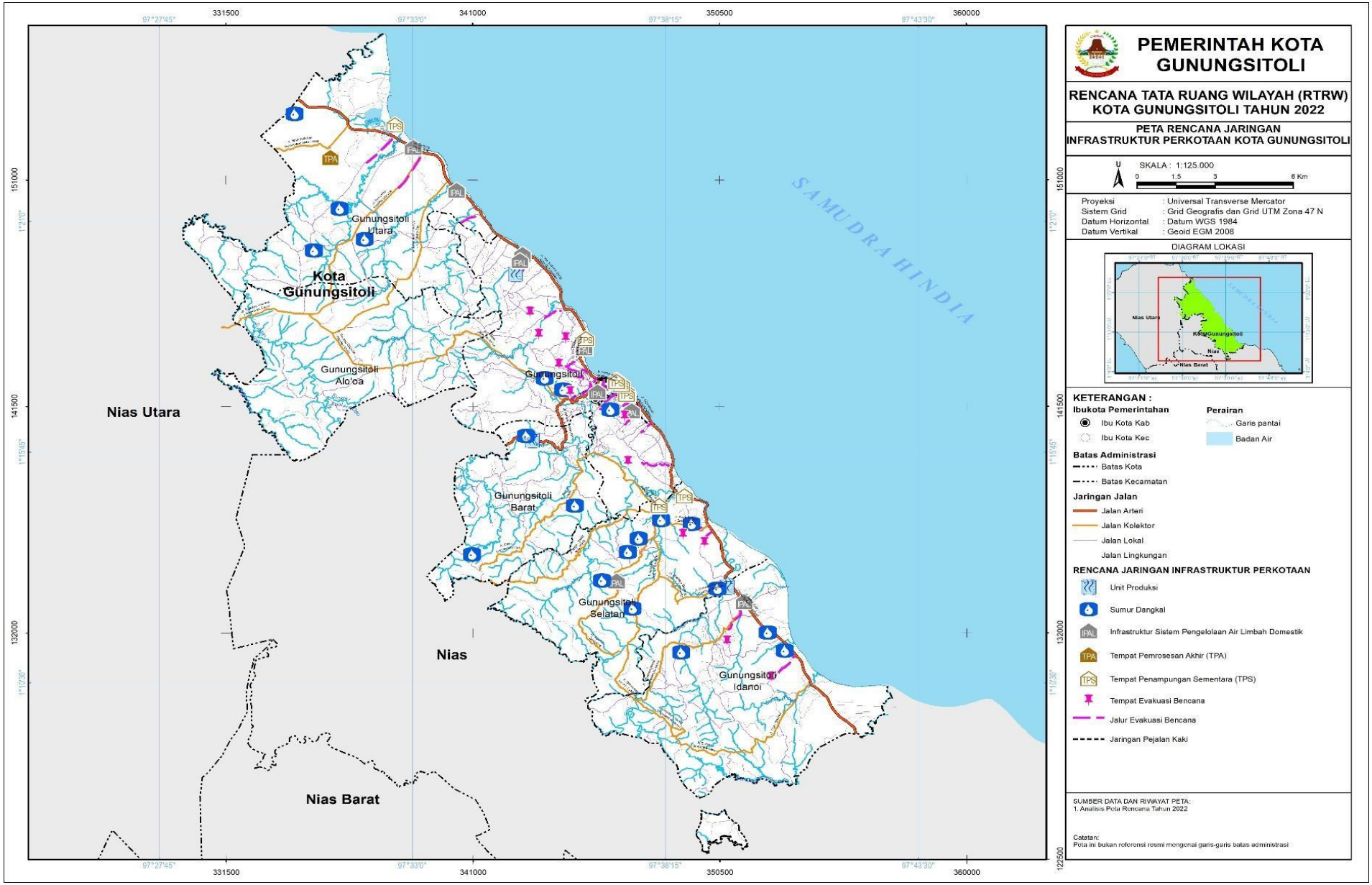
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022
PETA RENCANA JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KOTA GUNUNGSITOLI
SKALA : 1:125.000
0 1.5 3 6 Km
Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
Ibu Kota Kab
Ibu Kota Kec
Perairan
Garis pantai
Badan Air
Batas Administrasi
Batas Kota
Batas Kecamatan
Jaringan Jalan
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan
RENCANA JARINGAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Unit Produksi
Sumur Dangkal
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Evakuasi Bencana
Jalur Evakuasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Analisis Peta Rencana Tahun 2022
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi
SAMUDRA HINDIA
Nias Utara
Kota Gunungsitoli
Gunungsitoli Utara
Gunungsitoli Alo'oa
Gunungsitoli Barat
Gunungsitoli Selatan
Gunungsitoli Idanoi
Nias
Nias Barat
TPA
TPS
IPAL
331500
341000
350500
360000
151000
141500
132000
122500

2.1.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebanyak 138.297 jiwa yang terdiri atas 67.192 jiwa penduduk laki-laki dan 71.105 jiwa penduduk perempuan. Data lengkap jumlah dan struktur penduduk Kota Gunungsitoli diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.33
Jumlah Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunungsitoli	30.648	32.270	62.606
2	Gunungsitoli Selatan	7.216	7.615	14.850
3	Gunungsitoli Utara	8.960	9.663	18.652
4	Gunungsitoli Idanoi	12.174	12.957	25.036
5	Gunungsitoli Alo'oa	3.920	4.182	8.076
6	Gunungsitoli Barat	4.274	4.418	8.704
Total Penduduk		**67.192**	**71.105**	**138.297**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2020-2025 sebesar 1,71% dan mengalami penurunan pada periode tahun 2020-2024 sebesar 1,75%, dengan laju pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa sebesar 2,44%. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan wilayah kecamatan kurun waktu 2020-2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2025

No	Kecamatan	2023	2024	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2025 (%)
1	Gunungsitoli Idanoi	23.674	25.491	25.945	1,92
2	Gunungsitoli Selatan	14.806	15.805	16.052	1,70
3	Gunungsitoli Barat	8.007	8.544	8.677	1,69
4	Gunungsitoli	63.655	67.268	68.147	1,45
5	Gunungsitoli Alo'oa	7.781	8.547	8.743	2,44
6	Gunungsitoli Utara	18.094	19.578	19.952	2,05
Kota Gunungsitoli		**136.017**	**145.233**	**147.516**	**1,71**

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2025

Dinamika Penduduk merupakan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Berikut tabel yang menggambarkan kondisi dinamika penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.35
Jumlah Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan s.d tahun 2024

No	Jenis Dokumen	Satuan	Jumlah Yang Diterbitkan				% Kepemilikan Dokumen Kependudukan
			2021	2022	2023	2024	
1	KTP	Jiwa	88.105	89.539	90.188	92.538	97,60
2	KK	Jiwa	34.906	33.773	36.400	36.710	99,76
3	KIA	Jiwa	-	20.011	23.407	26.850	61,75
4	Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	Jiwa	51.380	47.960	47.098	46.298	99,41
5	Akta Kematian	Jiwa	1.151	8.482	9.618	10.540	100
6	Akta Perkawinan	Jiwa	41.369	41.732	44.286	45.279	89,66
7	Akta Perceraian	Jiwa	163	169	219	258	83,23

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli

Distribusi dan persebaran penduduk merupakan bentuk dari merata atau tidaknya penyebaran penduduk di suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Faktor yang menyebabkan persebaran dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis serta faktor kebudayaan dan teknologi.

Berdasarkan data tahun 2024, distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Gunungsitoli yaitu sebesar 46,20% dari total jumlah penduduk yang ada dengan tingkat kepadatan mencapai 624,69 jiwa/km^2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah dan hanya terpusat pada satu Kecamatan sehingga berdampak pada munculnya kawasan kumuh serta permasalahan pada pengelolaan lingkungan perkotaan. Berikut tabel yang mengambarkan distribusi dan sebaran penduduk Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.36
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km^2)
1	Gunungsitoli	46,20	624,69
2	Gunungsitoli Selatan	10,88	282,36
3	Gunungsitoli Utara	13,53	250,24
4	Gunungsitoli Idanoi	17,59	192,50
5	Gunungsitoli Alo'oa	5,93	145,21
6	Gunungsitoli Barat	5,88	302,33

Sumber : BPS Kota Gunungsitoli

Komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Bila ditinjau dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Gunungsitoli berumur 15 tahun ke atas adalah lulusan SD sebanyak 34.953 jiwa, SMA sebanyak 18.939 jiwa serta lulusan SMP sebanyak 18.835 jiwa.

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sekolah Dasar atau lebih rendah	34.953
2	Sekolah Menengah Pertama	18.835
3	Sekolah Menengah Atas	18.939
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	11.786
5	Diploma I/II/III/Akademi	2.678
6	Universitas	11.686
	Total	**98.877**

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka

Selanjutnya berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli tahun 2024, jumlah penduduk menurut agama yang dianut, terbesar adalah agama Kristen Protestan sebesar 124.312 orang.

Tabel 2.38
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2024

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Gunungsitoli Idanoi	1.811	16.863	2.377	-	-
2	Gunungsitoli Selatan	256	14.963	1.136	-	-
3	Gunungsitoli Barat	-	12.935	360	-	-

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
4	Gunungsitoli	11.350	50.392	5.634	-	275
5	Gunungsitoli Alo'oa	-	14.802	152	-	-
6	Gunungsitoli Utara	7.969	14.357	704	-	-
	Kota Gunungsitoli	**21.386**	**124.312**	**10.363**	-	**275**

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli

Sementara perkembangan jumlah tempat ibadah di Kota Gunungsitoli Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Jumlah Tempat Ibadah Agama Tahun 2020-2024

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mesjid	30	30	30	30	30
2	Mushola	30	30	30	30	30
3	Gereja Kristen	219	230	237	271	280
4	Gererja Katolik	29	29	29	29	29
5	Vihara/Kuil	1	1	1	1	1
6	Pura	-	-	-	-	-

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) atau juga menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tahun 2024 PDRB Kota Gunungsitoli atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp.7.321,91 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp.6.924,47 miliar. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

sebesar Rp.2.047,05 miliar, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp.1.448,73 miliar, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.1.058,06 miliar.

Tabel 2.40
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	864,51	895,93	967,87	1.011,28	1.058,06
B. Pertambangan dan Penggalian	159,97	166,57	176,96	185,90	192,51
C. Industri Pengolahan	10,32	10,98	11,88	12,97	13,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,35	5,63	6,01	6,30	6,59
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,23	6,38	6,49	6,69	6,96
F. Konstruksi	1171,83	1213,92	1303,52	1389,98	1.448,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1533,26	1633,85	1775,37	1903,60	2.047,05
H. Transportasi dan Pergudangan	482,21	489,86	505,11	646,13	677,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	217,77	240,27	240,27	283,23	303,46
J. Informasi dan Komunikasi	89,63	95,29	103,70	119,95	125,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	178,25	189,97	204,50	234,27	249,24
L. Real Estate	292,98	313,57	324,77	359,84	381,29
M. Jasa Perusahaan	17,75	18,59	19,26	22,63	23,95
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	303,94	316,21	315,44	330,50	355,37
O. Jasa Pendidikan	279,08	293,13	302,89	331,48	346,38
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,05	47,05	47,24	54,76	58,68
Q. Jasa lainnya	19,51	20,68	21,09	24,99	26,25
Produk Domestik Regional Bruto	**5.513,92**	**5.776,11**	**6.017,55**	**6.924,47**	**7.321,91**

Sumber: BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2025

Sementara untuk PDRB Kota Gunungsitoli atas dasar harga konstan 2024 menurut lapangan usaha sebesar Rp.3.906,89 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 3.762,59 miliar. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun.

Tabel 2.41
Produk Domestik Regional Bruto Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	499,32	507,94	519,33	529,74	540,33
B. Pertambangan dan Penggalian	90,00	92,11	94,24	96,87	98,96
C. Industri Pengolahan	6,10	6,29	6,49	6,87	7,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	4,26	4,46	4,60	4,76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,64	3,70	3,74	3,82	3,90
F. Konstruksi	681,68	691,20	697,52	711,93	739,73
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	989,82	1026,20	1062,41	1106,86	1.158,91
H. Transportasi dan Pergudangan	282,57	286,49	307,34	332,80	348,30
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126,34	126,22	134,02	142,75	148,65
J. Informasi dan Komunikasi	79,53	84,59	90,37	94,75	98,76
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	109,96	114,33	118,81	124,96	129,53
L. Real Estat	162,80	163,25	168,60	172,79	178,59
M. Jasa Perusahaan	9,59	9,83	10,26	10,66	11,06
N. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	163,38	163,25	163,23	167,96	178,59
O. Jasa Pendidikan	198,30	204,74	211,48	217,55	223,02
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,59	23,39	24,55	25,38	26,71
Q. Jasa lainnya	10,94	11,05	11,67	12,29	12,69
Produk Domestik Regional Bruto	**3.441,65**	**3.519,13**	**3.628,53**	**3.762,59**	**3.906,89**

Sumber: BPS, Gunungsitoli Dalam Angka Tahun 2025

2) PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita ADHB Kota Gunungsitoli
Tahun 2020 s.d. 2024

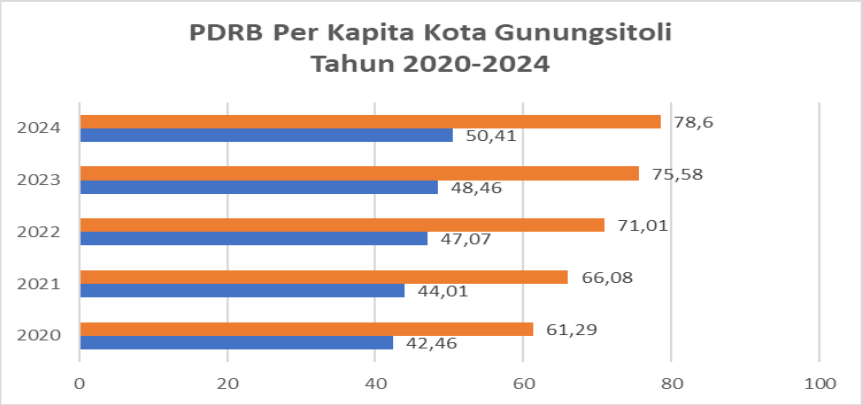

3) Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Dalam 5 tahun terakhir, koefisien Gini Rasio Kota Gunungsitoli diposisi tingkat ketimpangan moderat (0,3 s.d 0,5). Gini Ratio pada Tahun 2024 sebesar 0,277.

Grafik 2.2
Indeks Gini Kota Gunungsitoli
Tahun 2020 s.d. 2024

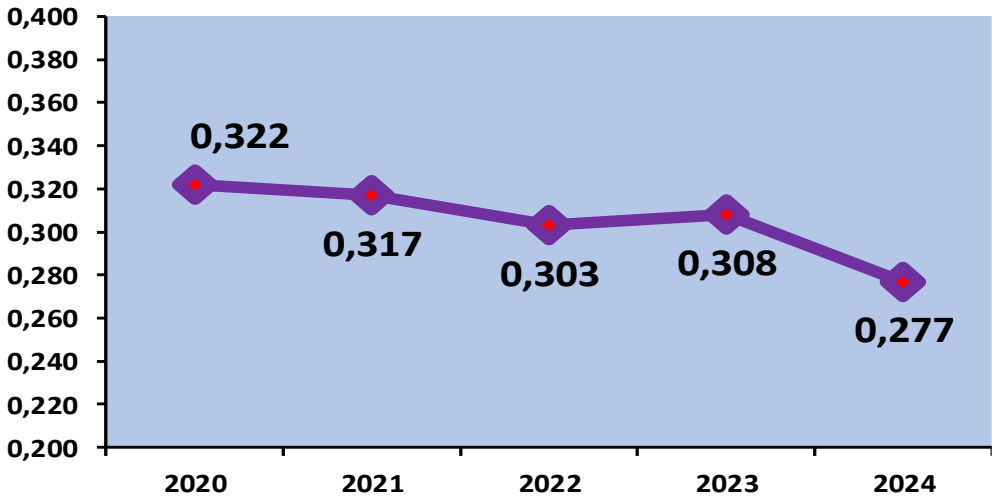

4) Laju Inflasi

Sejak Bulan Januari tahun 2020, Kota Gunungsitoli telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu kota pengukuran inflasi daerah di Sumatera Utara disamping Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Perkembangan Laju inflasi 5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42
Perkembangan Laju Inflasi
5 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Kota	Inflasi Kumulatif Tahunan (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Gunungsitoli	5,32	0,54	5,74	2,35	3,10

Sumber : BPS, Seri Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2025

5) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi meliputi laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi dan menggambarkan berbagai tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2020 berada pada angka 0,38% sebagai akibat/dampak Pandemi *Covid-19,* selanjutnya bertumbuh pada tahun 2021 sebesar 2,25%, pada tahun 2022 sebesar 3,11%, pada tahun 2023 3,69% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,84%. Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2024.

Grafik 2.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2024 (persen)

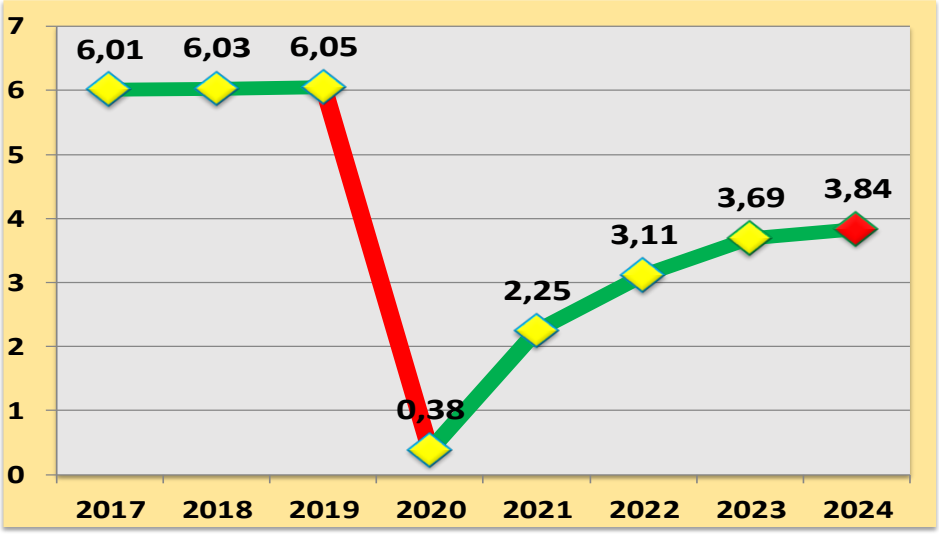

Sumber : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka

Tabel 2.43
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nias	1,80	2,21	3,06	3,82	3,89
2	Mandailing Natal	-0,94	3,20	4,34	4,93	4,83
3	Tapanuli Selatan	0,39	3,24	4,78	5,11	5,12
4	Tapanuli Tengah	-0,76	2,56	4,18	4,23	4,15
5	Tapanuli Utara	1,50	3,54	4,25	4,75	4,77
6	Toba	-0,27	2,92	4,24	4,93	4,84
7	Labuhanbatu	0,09	3,85	4,80	5,03	5,06
8	Asahan	0,21	3,73	4,66	4,87	4,68
9	Simalungun	1,01	3,70	4,68	5,07	4,89
10	Dairi	-0,94	2,05	4,21	5,04	4,97

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
11	Karo	-0,80	2,25	4,22	5,06	4,22
12	Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36
13	Langkat	-0,86	3,08	4,69	4,93	4,98
14	Nias Selatan	0,61	2,02	3,08	3,65	3,82
15	Humbang Hasundutan	-0,13	2,02	4,21	4,38	4,79
16	Pakpak Bharat	-0,18	2,54	4,27	5,10	5,02
17	Samosir	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02
18	Serdang Bedagai	-0,44	2,87	4,46	5,03	5,01
19	Batu Bara	-0,31	2,35	4,07	4,08	4,12
20	Padang Lawas Utara	1,14	3,26	4,12	4,92	4,99
21	Padang Lawas	1,18	3,83	4,61	5,14	5,02
22	Labuhanbatu Selatan	0,80	3,82	4,74	4,94	4,89
23	Labuhanbatu Utara	0,27	3,83	4,62	4,76	4,24
24	Nias Utara	1,58	2,02	3,03	3,79	3,64
25	Nias Barat	1,66	2,26	3,01	3,72	3,89
26	Sibolga	-1,36	2,10	4,15	4,2	3,92
27	Tanjungbalai	-0,47	2,35	3,94	4,86	4,91
28	Pematangsiantar	-1,89	1,25	3,47	4,22	4,61
29	Tebing Tinggi	-0,70	2,51	4,01	3,98	3,37
30	Medan	-1,98	2,62	4,71	5,04	5,07
31	Binjai	-1,83	2,23	4,18	4,75	4,66
32	Padangsidimpuan	-0,73	2,75	4,77	5,09	5,01
33	Gunungsitoli	0,38	2,25	3,11	3,69	3,84
	Sumatera Utara	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**5,03**
	Nasional	**-2,07**	**3,70**	**5,31**	**5,05**	**5,03**

6) Persentase Penduduk Miskin

Pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 22.160 orang atau sebesar 14,72% terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli mengalami penurunan bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 14,78%.

Grafik 2.4
Trend Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli
Tahun 2018-2024 (Persen)

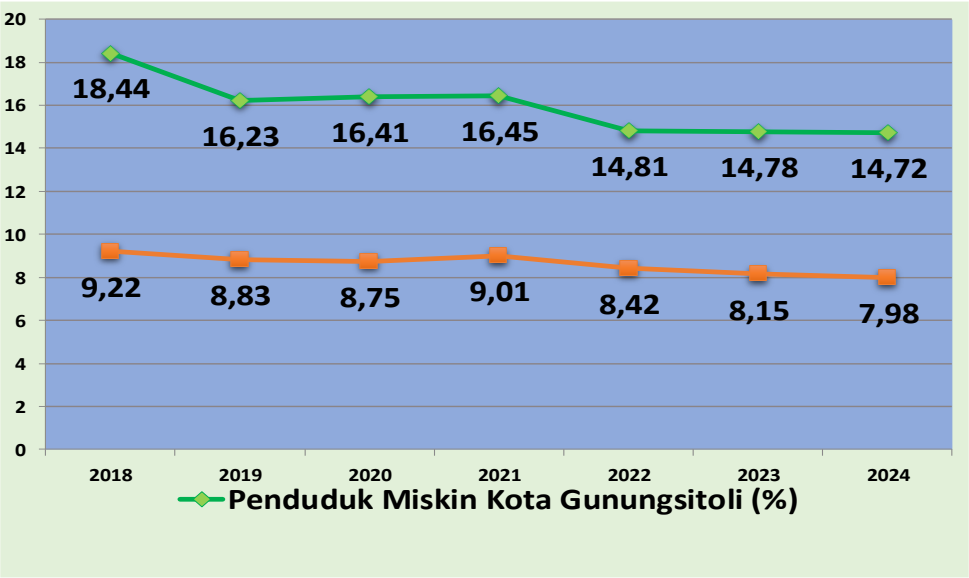

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Tahun 2025

Garis Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebesar Rp.493.644/Kapita/ Bulan, meningkat jika dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2023 sebesar 459.787/kapita/tahun, atau sebesar 7,3%. Berikut gambaran perkembangan garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 2.44
Perkembangan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	370.967	408.190	426.349	459.787	493.644
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	1,74	2,66	2,24	2,24	1,99
3	Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks)	0,3	0,68	0,55	0,46	0,38

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Tahun 2025

2.1.2.2 Kesehatan untuk semua

Kesehatan masyarakat merupakan hal mutlak untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Beberapa cara untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat adalah diantaranya melalui Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran

Hidup. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45
Realisasi Indikator Urusan Kesehatan Kota Gunungsitoli
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,03	74,23
2	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	183	173,81
3	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	13	8,69
4	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	2,66	1,69
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Persentase	5.43	4,82
6	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,18	0,35
7	Persentase Faskes (Puskesmas, RS Terakreditasi)	Persentase	100	100
8	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persentase	32,53	40,46
9	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persentase	52	49,26
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,36	0,43
11	Rasio paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	4,05	4,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2024

Peningkatan sarana dan prasarana maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus terus diupayakan oleh pemerintah, karena sarana dan prasarana kesehatan tersebut sangatlah diperlukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup. Untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, pemerintah Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun terus membangun sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Klinik/Balai Kesehatan. Selain pemerintah, pihak swasta juga turut serta dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli. Pada tahun 2024 jumlah sarana kesehatan di Kota Gunungsitoli yaitu 8 Unit Puskesmas, 19 Unit Puskesmas Pembantu, 39 Unit Pos Kesehatan Desa, 8 Unit Poliklinik, 40 Unit Praktek Dokter. Berikut jumlah fasilitas kesehatan di Kota Gunungsitoli tahun 2020-2024.

Tabel 2.46
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Puskesmas	8	8	8	8	8
2	Puskesmas Pembantu	18	18	20	19	19
3	Pos Kesehatan Desa	39	39	39	39	39
4	Poliklinik	3	6	8	8	8
5	Praktek Dokter (Umum/Spesialis)	36	36	40	40	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2024

Tabel 2.47
Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Gunungsitoli
Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pos Kesehatan Desa	Poliklinik	Praktek Dokter (umum/ spesialis)
1	Gunungsitoli	2	4	5	8	40
2	Gunungsitoli Idanoi	2	3	11	-	-
3	Gunungsitoli Selatan	1	6	3	-	-
4	Gunungsitoli Barat	1	2	5	-	-
5	Gunungsitoli Alo'oa	1	1	8	-	-
6	Gunungsitoli Utara	1	3	7	-	-
	Jumlah	**8**	**19**	**39**	**8**	**40**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2024

Tenaga kesehatan di Kota Gunungsitoli masih sangat terbatas jumlahnya, terutama Dokter Spesialis. Tahun 2024, Dokter Spesialis sebanyak 3 orang, Dokter Umum sebanyak 39 orang, Dokter Gigi sebanyak 5 orang, Perawat sebanyak 191 orang, Bidan sebanyak 421 orang dan Perawat Gigi sebanyak 8 orang yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Gunungsitoli. Berikut perkembangan jumlah Tenaga Medis di Kota Gunungsitoli :

Tabel 2.48
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Spesialis	2	2	3	3	3
2	Dokter Umum	32	31	38	39	39

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Dokter Gigi	5	6	6	7	5
4	Perawat	174	175	176	197	191
5	Bidan	286	348	363	401	421
6	Perawat Gigi	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2024

Tabel 2.49
Perkembangan Tenaga Medis Kota Gunungsitoli Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Perawat Gigi
1	Gunungsitoli	2	12	2	67	140	2
2	Gunungsitoli Idanoi	-	6	1	38	73	2
3	Gunungsitoli Selatan	1	7	0	29	57	1
4	Gunungsitoli Barat	-	5	1	15	49	1
5	Gunungsitoli Alo'oa	-	4	0	16	37	1
6	Gunungsitoli Utara	-	5	1	26	65	1
	Jumlah	**3**	**39**	**5**	**191**	**421**	**8**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, 2024

Angka Kematian Ibu

Tabel 2.50
Angka Kematian Ibu (AKI) di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup
1	Gunungsitoli	Orang	0	802
2	Gunungsitoli Idanoi	Orang	2	302
3	Gunungsitoli Selatan	Orang	0	188
4	Gunungsitoli Barat	Orang	0	102
5	Gunungsitoli Utara	Orang	1	232
6	Gunungsitoli Alo'oa	Orang	0	101
Jumlah Total			3	1.727

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2024 jumlah kematian ibu karena kerena kehamilan, persalinan dan masa nifas yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) kasus kematian ibu, dengan jumlah sasaran kelahiran hidup sebanyak 1.727 orang. 3 (tiga) kasus kematian ibu yang ditemukan disebabkan terjadinya perdarahan post partum dan masalah kesehatan ibu pasca melahirkan.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menghadapi kesulitan finansial. Dengan konsep UHC *(Universal Health Coverage),* layanan promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif diberikan secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Pencapaian UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Cakupan kepesertaan terus meningkat, memperluas akses ke fasilitas kesehatan di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil. Dengan sistem yang kuat, UHC diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Sampai dengan Juli 2025, pencapaian UHC Kota Gunungsitoli sebesar 99,66 %.

2.1.2.3 Pendidikan yang berkualitas dan merata

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan pendidikan berkualitas, yang semakin merata dan mudah di akses oleh masyarakat. Program-program pembangunan di bidang pendidikan diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap kecamatan serta tersedianya beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi. Untuk menangani urusan pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun telah memberikan hasil positif bagi masyarakat. Berikut tabel yang menguraikan realisasi urusan pendidikan dari Tahun 2024.

Tabel 2.51
Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kota Gunungsitoli
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Indeks Pendidikan	Indeks	80,60	93,20
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,94	8,76
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,82	13,79
4	APM SD	Persentase	94,86	98,08
5	APM SMP	Persentase	85,46	80,26

6	Rasio ruang kelas kategori baik SD	Persentase	84,23	91,68
7	Rasio ruang kelas kategori baik SMP	Persentase	70,45	85,17
8	Nilai rata-rata UN SD	Nilai	84,84	82,66
9	Nilai rata-rata UN SMP	Nilai	72,20	84,69
10	APM PAUD	Persentase	100	30,29
11	APM Pendidikan Kesetaraan	Persentase	100	44,29

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2024

1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2019 sebesar 52,77%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 62,13%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTS Tahun 2019 Rasio Ketersediaan Sekolah sebesar 42,39% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 40,73%.

Tabel 2.52
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	115	115	115	117	117
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	19.253	17.188	18.510	18.720	18.720
1.3	**Rasio**	**59,69**	**59,81**	**60,5**	**62,13**	**62,13**
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	40	40	39	39	39
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.148	9.226	9.229	9.953	9.953
2.3	**Rasio**	**43,73**	**43,36**	**42,59**	**40,73**	**40,73**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2024

2. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Rasio Guru/Murid untuk jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2019 sebesar 14,26, menurun menjadi 12,56 pada Tahun 2023. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Tahun 2019 Rasio Guru/Murid sebesar 14,16, menurun menjadi 12,65 pada Tahun 2023.

Tabel 2.53
Jumlah Guru dan Jenjang Pendidikan Guru
Kota Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.487	1.384	1.327	1.309	1.309
1.2	Jumlah Murid	18.942	17.188	19.120	16.440	16.440
1.3	**Rasio**	**12,74**	**12,4**	**14,41**	**12,56**	**12,56**
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	758	691	668	711	711
2.2	Jumlah Murid	9.959	9.229	9.088	8.992	8.992
2.3	**Rasio**	**13,14**	**13,36**	**13,60**	**12,65**	**12,65**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2024

Tabel 2.54
Jumlah Kualifikasi Guru Yang Berkualifasi Pendidikan Menurut Jenjang Sekolah Di Wilayah Kota Gunungsitoli s.d. Tahun 2024

No	Jenjang Sekolah	Jenjang Pendidikan								
		SD	SMP	SMA/ Sederajat	D-1	D-2	D-3	S1	S2	S3
1	TK Negeri/ Swasta	-	-	209	3	7	7	123	1	-
2	SD Negeri/ Swasta	-	-	91	0	50	9	1.169	8	-
3	SMP Negeri/ Swasta	-	-	-	2	5	13	639	9	-
Jumlah Total		**0**	**0**	**300**	**5**	**62**	**29**	**1.931**	**18**	**-**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2024

Tabel 2.55
Jumlah Guru Aktif Yang Telah Memiliki Sertifikasi Pendidik Menurut Jenjang Sekolah Di Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Jenjang Sekolah	Status Guru		Jumlah Guru (Orang)
		PNS	Non PNS	
1	TK Negeri/Swasta	13	11	24
2	SD Negeri/Swasta	470	25	495
3	SMP Negeri/Swasta	228	26	254
Jumlah Total		**711**	**62**	**773**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan manusia di Kota Gunungsitoli terus mengalami peningkatan. IPM Kota Gunungsitoli meningkat dari 71,55 pada tahun 2023 menjadi 72,30 pada tahun 2024. Berikut grafik yang menggambarkan Perkembangan IPM Kota 4 Tahun terakhir.

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli
Tahun 2019-2024

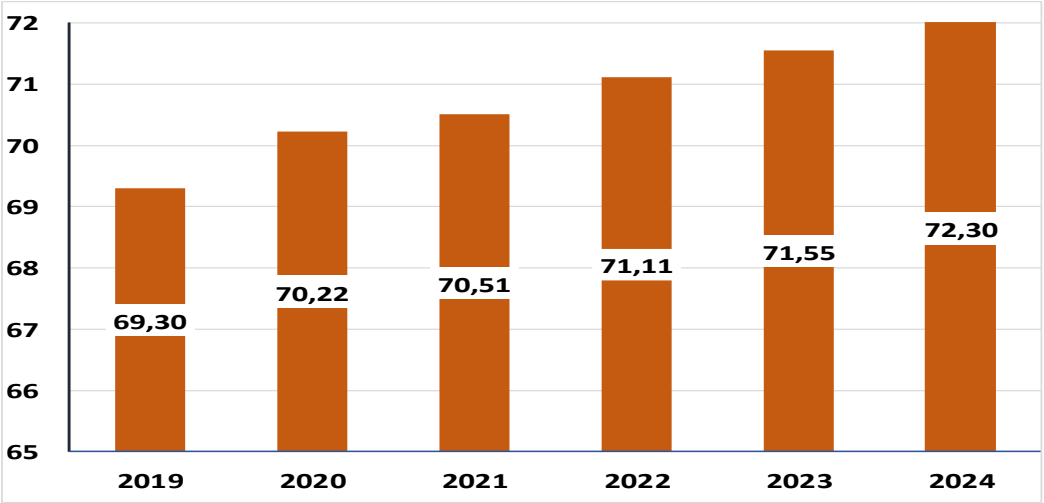

Sumber data : BPS Kota Gunungsitoli, 2024

Meskipun IPM Kota Gunungsitoli menunjukkan tren yang positif, tantangan besar masih ada dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah.

Infrastruktur yang belum merata, aksesibiltas terhadap pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, serta rendahnya pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi beberapa tantangan utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan IPM, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyediakan akses yang lebih baik menuju fasilitas layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata dan industri rumah tangga juga dapat membuka peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, perhatian terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemerataan ekonomi, diharapkan dapat terus meningkatkan IPM Kota Gunungsitoli dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh Masyarakat.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli telah menempuh pendidikan hingga 8,76 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas III.

Tabel 2.56
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2020	8,61
2021	8,62
2022	8,64
2023	8,65
2024	8,76

Sumber data : BPS, Gunungsitoli Dalam Angka

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ekspektasi jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh anak-anak yang

baru lahir, berdasarkan kondisi saat ini. Indikator ini menggambarkan seberapa besar peluang generasi mendatang untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih lama, yang tentunya berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Kota Gunungsitoli mencapai 13,78 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir di tahun tersebut diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga D1, bahkan mungkin lebih tinggi lagi, bergantung pada keberlanjutan program pendidikan dan kebijakan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Tabel 2.57
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2020	13,74
2021	13,75
2022	13,77
2023	13,78
2024	13,79

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Budaya Lokal

Kebudayaan memiliki peran strategis dalam membentuk identitas dan karakter bangsa, serta berkontribusi langsung terhadap berbagai aspek pembangunan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penghitungan indeks budaya lokal merupakan suatu tolok ukur dalam memetakan kemajuan pembangunan kebudayaan di setiap daerah. Indeks budaya lokal diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatau daerah mengelola, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan budayanya. Sehingga, indikator ini akan menjadi instrumen penting dalam merumuskan strategi kebudayaan daaerah dan dapat semakin berkontribusi dalam menjaga warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam di Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.58
Perkembangan Indeks Budaya Lokal Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Budaya Lokal (Indeks)
2020	*
2021	*
2022	57,23
2023	67,87
2024	68,85

Secara umum, perkembangan indeks budaya lokal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator ini diukur dari rata-rata persentase pelaksanaan festival seni dan budaya dalam satu tahun dengan persentase jumlah sanggar seni budaya dan persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Peningkatan indeks ini mengindikasikan bahwa adanya penguatan terhadap program-program pembangunan kebudayaan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dapat mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan yang mendukung pelestarian nilai budaya, peningkatan akses terhadap fasilitas budaya, atau peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. IPG menghitung sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya yang mendukung pembangunan. Peningkatan laju kenaikan IPG menunjukkan bahwa Kota Gunungsitoli dapat mengimplementasikan kebijakan atau program yang mendukung kesetaraan gender.

Tabel 2.59
Perkembangan Indeks Pembangunan Kota Gunungsitoli
Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Budaya Lokal (Indeks)
2020	*
2021	*
2022	89,69
2023	89,69
2024	89,92

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan daerah lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam berbagai aspek yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan perekonomian wilayah tersebut. Daya saing ini mencakup berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, sumber daya alam, inovasi, kualitas pendidikan, lingkungan usaha, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi dan sosial.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh perkembangan para pencari kerja. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Untuk itu, peningkatan produktivitas SDM sangat penting untuk memperkuat daya saing daerah.

Tabel 2.60
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Kota Gunungsitoli Tahun 2024

Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan *Educational Attainment*	Jenis Kelamin/*Sex*		Jumlah *Total*
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah *No Schooling*	-	-	-
Tidak/Belum Tamat SD *Not Yet Completed Primary School*	-	-	-
Sekolah Dasar/*Primary School*	-	-	-
Sekolah Menengah Pertama *Junior High School*	-	-	-
Sekolah Menengah Atas *Senior High School*	27	14	41
Sekolah Menengah Atas Kejuruan *Vacation Senior High School*	28	14	42
Sekolah Teknik Menengah Atas *Technical High School*	-	-	-
Diploma I/*Diploma I*	-	-	-
Diploma II/*Diploma II*	-	-	-
Diploma III/*Diploma III*	3	3	6
Diploma IV/*Diploma IV*	-	-	-
S1/*Bachelor Degree*	5	12	17
S2/*PostGraduate*	-	-	-
Doktor/*Doctor*	-	-	-
Jumlah/*Total*	**63**	**43**	**106**

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2024

Kecamatan/*District*	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gunungsitoli Idanoi	177	40	26	21
Gunungsitoli Selatan	96	40	17	13
Gunungsitoli Barat	123	42	24	12
Gunungsitoli	517	77	97	48
Gunungsitoli Alo'oa	102	32	19	5
Gunungsitoli Utara	140	25	22	11
Jumlah/*Total*	**1.155**	**256**	**205**	**110**

https://gunungsitolikota.bps.go.id

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1) Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Adapun perkembangan industri pengolahaan di Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61
Perkembangan Industri Pengolahan di Kota Gunungsitoli

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Miliar Rp	10,32	10,98	11,88	12,97	13,87
PDRB ADHK	Miliar Rp	6,10	6,29	6,49	6,87	7,16
Kontribusi	Persen	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
Pertumbuhan	Persen	1,53	3,09	3,30	5,82	4,26

2) Kontribusi Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dapat memberikan manfaat pembangunan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat namun sangat rentan dengan adanya perubahan global yang akan berdampak pada kegiatan kepariwisataan pada suatu daerah. Beberapa potensi wisata yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli diharapkan mampu untuk dapat berdaya saing. Namun, saat ini memiliki kontribusi yang relatif masih rendah yang selanjutnya dapat dilihat dalam perkembangan kontribusi sektor akomodasi makan minum. Kondisi ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan dan juga peluang yang mestinya perlu di antisipasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perkembangan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Kota Gunungsitoli adalah :

Tabel 2.62
Perkembangan Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kota Gunungsitoli

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Miliar Rp	240,27	240,27	258,80	283,23	303,46
PDRB ADHK	Miliar Rp	126,34	126,22	134,02	142,75	148,65
Kontribusi	Persen	4,16	3,99	4,00	4,09	4,14
Pertumbuhan	Persen	4,02	-0,10	6,18	6,51	4,13

3) Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebesar 71,794 orang. Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar

71,12%. Peningkatan TPAK mengindikasikan penambahan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja.

Peningkatan jumlah angkatan kerja juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Penduduk yang bekerja pada tahun 2024 mencapai 69.424 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 sebesar 3,30%.

Tabel 2.63
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas
Menurut Jenis Pekerjaan/Kegiatan di Kota Gunungsitoli

No	Kegiatan Utama	Tahun	
		2023	2024
1	Angkatan Kerja (Jiwa)	**67.013**	**71.794**
	Bekerja	64.552	69.424
	Pengangguran Terbuka	2.461	2.370
2	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	**31.864**	**29.154**
3	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	**98.877**	**100.948**
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**67,77**	**71,12**
5	Tingkat Pengangguran (%)	**3,67**	**3,30**

4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di daerah sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan secara riil dapat diukur dengan ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menunjang aksesibilitas masyarakat di bidang ekonomi.

Pembangunan pada bidang kebinamargaan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di bidang infrastruktur khususnya pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka tercapainya indikator kinerja daerah. Fokus utama pembangunan yaitu peningkatan infrastruktur kawasan strategis di masing-masing kecamatan, penuntasan pembangunan jalan lingkar luar Kota Gunungsitoli serta pengembangan sistem pengelolaan air minum/air bersih yang melayani jaringan Sambungan Rumah (SR) khususnya di Wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Utara.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunungsitoli, panjang jalan keseluruhan menurut jenisnya pada Tahun 2024 yaitu

mencapai 596,01 km yang meliputi Jalan Nasional dengan panjang 21,843 km, Jalan Provinsi 28,620 km dan Jalan Kota dengan panjang 545,54 km. Berikut adalah tabel dan grafik panjang jalan menurut status jalan pada Tahun 2024 :

Tabel 2.64
Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kota Gunungsitoli
Tahun 2024

No	Uraian	Panjang (Km)
1	Jalan Nasional	21,843
2	Jalan Provinsi	28,620
3	Jalan Kota	545,54

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

Jaringan infrastruktur jalan dengan kondisi baik merupakan salah satu indikator utama peningkatan daya saing daerah. Kondisi infrastruktur jalan memiliki dampak yang signifikan terhadap aksesbilitas masyarakat dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan. Kondisi infrastruktur jalan dengan di Kota Gunungsitoli Tahun 2024, meliputi Jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 16,11 km, Jalan Provinsi dalam kondisi baik sepanjang 15,28 km, dan Jalan Kota dalam kondisi baik sepanjang 293,39 km. Berikut tabel yang mengambarkan proporsi panjang kondisi jalan dalam kondisi baik di Wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.65
Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Panjang Jalan Nasional						
	- Kondisi Baik	16.112	16.112	16.112	16.112	16.112	m
	- Kondisi Sedang	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798	m
	- Kondisi Rusak Ringan	942	933	933	933	933	m
	- Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-	m
2	Panjang Jalan Provinsi						
	- Kondisi Baik	14.820	14.820	15.280	15.280	15.280	m
	- Kondisi Sedang	6.500	6.500	6.789	6.789	6.789	m
	- Kondisi Rusak Ringan	4.800	4.800	4.110	4.100	4.100	m
	- Kondisi Rusak Berat	2.500	2.500	2.441	2.441	2.441	m

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	Panjang Jalan Kab/Kota						
	- Kondisi Baik	255.545	260.412	267.201	277.986	293.387	m
	- Kondisi Sedang	97.178	96.481	96.021	108.988	110.265	m
	- Kondisi Rusak Ringan	106.311	101.053	98.310	74.028	72.750	m
	- Kondisi Rusak Berat	21.784	21.784	18,198	84.542	69.141	m

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

Berdasarkan jenis permukaan jalan di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 jaringan jalan dengan jenis permukaan aspal/hotmix sepanjang 157,41 Km, disusul jaringan jalan dengan permukaan lapen sepanjang 229,08 Km, dan permukaan japat sepanjang 74,23 Km. Kondisi permukaan jalan di wilayah Kota Gunungsitoli sebagian besar dalam kondisi baik, namun demikian beberapa wilayah terutama di sentra-sentra produksi masyarakat, pusat-pusat pelayanan publik, serta daerah yang relatif terisolir, memiliki kondisi jenis permukaan jalan yang masih kurang memadai.

Tabel 2.66
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan
Tahun 2020-2024

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aspal/Hotmix	km	408,202	131,57	137,42	157,41	157,41
2	Beton	km	61,140	297,84	249,08	229,08	229,08
3	Kerikil/Telford	km	10,389	82,29	84,23	74,23	74,23
4	Tanah	km	-	33,84	74,82	84,82	84,82

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

2. Proporsi jembatan dalam kondisi baik

Proporsi jembatan dalam kondisi baik di Kota Gunungsitoli tahun 2024 sebanyak 71 Unit, kondisi rusak sedang sebanyak 30 Unit, kondisi rusak ringan sebanyak 4 buah serta kondisi rusak berat sebayak 1 Unit. Gambaran umum kondisi jembatan di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.67
Kondisi Jembatan di Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No	Jenis Permukaan Jembatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kondisi Baik	Unit	64	71	50	50	50
2	Kondisi Sedang	Unit	9	10	32	32	32
3	Kondisi Rusak Ringan	Unit	5	5	4	4	4
4	Kondisi Rusak Berat	Unit	1	2	1	1	1

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Capaian indikator pembangunan urusan pekerjaan umum yaitu persentase jalan mantap, persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi, persentase jalan kondisi baik, persentase penduduk yang mengakses air minum, persentase drainase dalam kondisi baik dan persentase penduduk yang mengakses sanitasi layak. Berikut tabel yang mengambarkan capaian indikator kinerja urusan wajib Pekerjaan Umum Tahun 2024.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024	
			Target	Capaian
1	Persentase jalan mantap	persen	68,36	73,99
2	Persentase daerah Irigasi terlayani jaringan irigasi	persen	41,53	45,90
3	Persentase jalan kondisi baik	persen	33,06	58,78
4	Persentase penduduk yang mengakses air minum (perpipaan dan bukan perpipaan)	persen	37,69	42,83
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	95,59	98,17
6	Persentase penduduk yang mengakses sanitasi layak	persen	36,63	42,48

Sumber : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

4. Penataan Ruang

Capaian indikator untuk bidang penataan ruang diantaranya meliputi persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dan persentase ruang terbuka hijau/publik yang tertata. Pada tabel berikut diuraikan capaian indikator urusan penataan ruang dari tahun 2024.

Tabel 2.69
Indikator Urusan Wajib Penataan Ruang Kota Gunungsitoli
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	KinerjaTahun 2024	
			Target	Capaian
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*
1	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persen	80	77,41
2	Persentase ruang terbuka hijau/ publik yang tertata	Persen	43,02	43,02

Sumber data : Dinas PUTR Kota Gunungsitoli, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.70
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum		**TUNTAS UTAMA**			**97,65%**
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari					95,30%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				75,82%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			94,77%
			Jumlah rumah tangga terlayani			961
			Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli			1.014
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				19,48%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97,39%
	1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari	1.014	961	53	94,77%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM (satuan Rumah Tangga)				
	2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau (satuan Rumah Tangga)	1.014	961	53	94,77%
	3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM (satuan rumah tangga)	0	0	0	100,00%
	4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai	0	0	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau (satuan rumah tangga)				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik					100,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			100,00%
			Jumlah rumah tangga terlayani pengolahan air limbah domestik			1.016
			Jumlah rumah tangga di Kota Gunungsitoli			1.016
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80,00%
	1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	1.016	1.016	0	100,00%
	2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas	0	0	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T (satuan rumah tangga)				
	3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar (satuan rumah tangga)	0	0	0	100,00%

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli, 2024

5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan memiliki peran dalam penentuan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai pembangunan sarana dan prasarana permukiman di Wilayah Kota Gunungsitoli.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yakni dari 78,73% tahun 2020 menjadi 83,69% tahun 2024. Demikian juga halnya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 21.805 Unit tahun 2020 menjadi 23.233 Unit tahun 2024.

Tabel 2.71
Rumah Layak Huni Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah layak huni	Persen	78,73	82,44	81,03	82,38	83,69
2	Rumah layak huni	Unit	21.805	22.677	22.462	22.871	23.233

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel Berikut ini :

Tabel 2.72
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat		**TUNTAS PARIPURNA**			100,00%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana					100,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah unit rumah korban bencana yang tertangani			100,00%
			Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n			0
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			3
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	-	100,00%
	2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	100,00%
	3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	-	-	-	100,00%
	4	Bantuan akses rumah	-	-	-	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		sewa layak huni bagi korban bencana				
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah					100,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah rumah tangga penerima Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah			100,00%
			Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni			-
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			-
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	-	-	-	100,00%
	a	Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	-	-	-	100,00%
	b	Proses sosialisasi kepada masyarakat	-	-	-	100,00%
	c	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	-	-	-	100,00%
	2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	-	-	-	100,00%
	3	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub	-	-	-	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)				

Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota Gunungsitoli, 2024

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi diarahkan agar hadirnya birokrasi sebagai jembatan terhadap dampak, yang menyasar pada percepatan penyelesaian masalah masalah utama pembangunan. Semangatnya, regulasi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, bukan justru menjadi beban dalam penyelesaian masalah (KemenpanRB RI, 2024). Indeks reformasi birokrasi sebagai alat ukur sejauh mana instansi mampu menerjemahkan visi melalui langkah-langkah strategis tata kelola yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.73
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	CC	B

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Guungsitoli menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2024. Peningkatan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan yang secara bertahap dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli. Hal ini menandakan bahwa berbagai aspek tata kelola pemerintahan seperti manajemen kinerja, pelayanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas kelembagaan mengalami perbaikan yang terukur dan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kategori “baik” dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai hasil dari komitmen pimpinan daerah, perbaikan sistem digitalisasi administrasi, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi. Ke depan, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi kualitas birokrasi dalam upaya memastikan bahwa perbaikan sistem benar-

benar dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan responsif.

2) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum relatif kondusif. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum lebih ditekankan pada upaya preventif melalui pendekatan persuasif. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait serta peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di Wilayah Kota Gunungsitoli, menjadi fokus program keamanan dan ketertiban. Gambaran umum perkembangan pencapaian indikator kinerja urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024	
			Target	Capaian
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	68,93	85
2	Tingkat Keamanan	Persentase	75,04	100
3	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	99,19	100
4	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	32,56	55

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Gunungsitoli
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Total Pencapaian
Total Capaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**TUNTAS UTAMA**	**93,48%**
Kategori Indeks Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**TUNTAS UTAMA**	**95,17%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi					95,17%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			100,00%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materil dan layanan pengobatan			1
			Jumlah Warga Negara yang mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti			1
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				15,17%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	75,83%
	1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	6	6	0	100,00%
	2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	1	1	0	100,00%
	3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	40	22	18	55,00%
	4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal				
	5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100,00%
	6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	1	1	0	100,00%
1	**Kategori Indeks Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah**		**TUNTAS MADYA**			**85,28%**
	Pelayanan informasi rawan bencana					85,91%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				71,92%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			89,90%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			124.228
			Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan informasi rawan bencana			138.184
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				13,99%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	69,95%
	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100,00%
	2	Identifikasi dan	138.184	124.228	13.956	89,90%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana				
	3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	138.184	124.228	13.956	89,90%
	4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0,00%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					81,92%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				71,92%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			89,90%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			124.228
			Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			138.184
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				10,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50,00%
	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	1	1	0	100.00 %
	2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)				
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					88,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100,00%
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			5.695
			Jumlah Warga Negara yang seharusnya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			5.695
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				8,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	40,00%
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	0	0	0	0.00 %
	2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (satuan)	5.695	5.695	0	100.00 %
	3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	0	0	0	0.00 %
	4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		(terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)				
	5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	0	0.00 %
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran		**TUNTAS PRATAMA**			**100,00%**
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					100,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap			100,00%
			Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Gunungsitoli pada Tahun berkenaan dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Perangkat Daerah yang menangani Sub Urusan Kebakaran + relawan kebakaran (Balakar,Satlakar,dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Perangkat Daerah yang menangani Sub Urusan Kebakaran)			17
			Jumlah kejadian kebakaran di Kota Gunungsitoli pada Tahun berkenaan			17
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00%
	1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	17	17	0	100,00%
	2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	27	27	0	100,00%
	4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	48	48	0	100,00%
	5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	0	0	0	100,00%
	6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0	0	0	100,00%

Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir relatif mengalami mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun terakhir, telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan terkait

dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa program dan kegiatan pembangunan dimaksud antara lain, pemberian bantuan, pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembinaan bagi penyandang cacat, dan pemberian bantuan bagi korban bencana.

Gambaran Umum Pencapaian pembinaan terhadap PMKS Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76
Capaian Pembinaan PMKS Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

No	PMKS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak Balita Terlantar	0	3	90	1	1
2	Anak Terlantar	93	84	0	103	103
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	13	0	0	0	0
4	Anak Jalanan	15	0	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	121	89	87	159	159
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan salah	6	0	0	4	4
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	2	0	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	816	181	183	296	296
9	Penyandang Disabilitas	1315	636	657	1065	1065
10	Tuna Susila	2	0	0	0	0
11	Gelandangan	6	1	1	2	2
12	Pengemis	4	2	2	4	4
13	Pemulung	35	47	47	53	53
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	1	1
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	15	0	0	0	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	3	3	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	0	0	3	3
18	Korban Trafficking	1	0	0	1	1
19	Korban Tindak Kekerasan	1	1	1	1	1
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	18	0	0	0	0
22	Korban Bencana Sosial	0	0	0	0	0

No	PMKS	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	224	0	0	47	47
24	Fakir Miskin	17.094	25.612	26.612	25.268	25.268
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0	1	1
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0

Adapun perkembangan jumlah Fasilitas Sosial di Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.77
Perkembangan Fasilitas Sosial Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

NO	FASILITAS SOSIAL	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panti Asuhan	13	15	15	15	15
2	Panti Jompo	1	1	1	1	1
3	Lembaga Rehabilitasi	3	3	3	4	4
4	Karang Taruna	1	1	1	1	1
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1
	JUMLAH	19	21	21	22	22

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2025

Capaian indikator kinerja program berdasarkan target RPJMD Tahun 2021-2026 pada urusan wajib sosial yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.78
Capaian Indikator Bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2024	
			Target	Capaian
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*
1	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	36,92	83
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	35	51,15
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	40	75

4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	30	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.79
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM Sosial		**TUNTAS MUDA**			**63,86%**
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial					64,63%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				51,49%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			64,37%
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			513
			Populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			797
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				13,13%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	65,67%
	1	Layanan data dan pengaduan (Layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)				
	2	Penyediaan permakanan (Layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	610	142	468	23,28%
	3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (Merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	0	0	0	0,00%
	4	Penyediaan sandang (Berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	27	35	-8	100,00%
	5	Penyediaan alat bantu (Kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk	39	23	16	58,97%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)				
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan(Obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	27	35	-8	100,00%
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis))	27	194	-167	100,00%
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat	27	35	-8	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0,00%
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (Fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	27	35	-8	100,00%
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (Pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	7	5	2	71,43%
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (Pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	6	9	-3	100,00%
	13	Layanan rujukan (Layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0	0	0	100,00%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial					40,85%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				35,31%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			44,14%
			Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			64
			Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			145
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				2,71%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	13,53%
	1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0,00%
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	0	0	0	0,00%
	3	Penyediaan permakanan	145	64	81	44,14%
	4	Penyediaan sandang	145	0	145	0,00%
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	145	0	145	0,00%
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	145	64	81	44,14%
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	145	64	81	44,14%
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0,00%
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0,00%
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0,00%
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0,00%
	12	Layanan rujukan	0	0	0	0,00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial					63,39%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				56,08%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			70,10%
			Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			136
			Populasi lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			194
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				7,31%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	36,55%
	1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0,00%
	2	Penyediaan layanan kedaruratan /layanan reaksi cepat	0	0	0	0,00%
	3	Penyediaan permakanan	155	117	38	75,48%
	4	Penyediaan sandang	155	0	155	0,00%
	5	Penyediaan alat bantu	39	19	20	48,72%
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	0	0	0,00%
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	155	117	38	75,48%
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	155	117	38	75,48%
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	0	0	0,00%
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0,00%
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	100,00%
	13	Layanan rujukan	0	0	0	100,00%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial					62,41%%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				57,87%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			72,34%
			Jumlah tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial			34
			Populasi tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial			47
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1	Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0,00%
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	0	0	0,00%
	3	Penyediaan permakanan	47	10	37	21,28%
	4	Penyediaan sandang	47	7	40	14,89%
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	47	0	47	0,00%
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	47	10	37	21,28%
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	47	7	40	14,89%
	8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		Anak/ Bukti dokumen kependudukan				
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0,00%
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	0	0	0	0,00%
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	100,00%
	12	Layanan rujukan	0	0	0	100,00%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota					88,00%
	A	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80,00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			100,00%
			Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			20
			Populasi korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana			24
	B	Persentase Capaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				8,00%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	40,00%
	1	Penyediaan permakanan (Penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	20	24	-4	100,00%
	2	Penyediaan sandang (Pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus	0	0	0	0,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (Tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/ alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	0	0	0	0,00%
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (Merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	0	0	0	0,00%
	5	Pelayanan dukungan Psikososial (Upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian	20	24	-4	100,00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
		diri terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)				

Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2021-2026

RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 yaitu terwujudnya Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan upaya pembangunan yang terintegrasi dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat dengan penekanan pada terciptanya struktur ekonomi daerah yang semakin berdaya saing secara berkelanjutan dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan potensi sumber daya alam berbasis perdagangan, jasa dan industri secara lestari dan ramah lingkungan.

Visi dan misi pembangunan Kota Gunungsitoli dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dimana telah ditetapkan indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada dokumen RKPD Kota Gunungsitoli dengan capaian realisasi kinerja.

1. Capaian Kinerja Misi I : Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul

Misi pertama memiliki satu tujuan yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul yang diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun ketiga RPJMD pada range 70,91 poin dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 72,30, kondisi indikator ini tercapai menunjukkan tujuan misi pertama ini sudah tercapai.

Sasaran pada misi pertama ini terdiri dari (1) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan yang diukur melalui indikator Indeks Pendidikan dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 80,60 dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 93,20 tahun dengan status tercapai; (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) dengan target

tahun ketiga RPJMD sebesar 72,03 Tahun dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 74,23 Tahun, dengan status tercapai; (3) Meningkatnya kesetaraan gender yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target tahun ketiga RPJMD sebesar 89,51 persen dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 89,92 persen, dengan status tercapai.

2. Capaian Kinerja Misi II : Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal

Misi kedua memiliki satu tujuan yaitu Mewujudkan peningkatkan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan yang diukur dengan Pertumbuhan ekonomi pada tahun ketiga RPJMD pada 6,03 persen dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 3,84 persen dan indeks gini pada tahun ketiga RPJMD 0,30 persen dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,277, kondisi indikator ini tercapai menunjukkan tujuan misi kedua ini sudah tercapai.

Sasaran pada misi kedua ini terdiri dari (1) Meningkatnya aktivitas perekonomian sektor unggulan yang diukur melalui indikator PDRB Per Kapita dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka Rp. 51.050.320,- dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka Rp. 50.410.000,- dengan status tercapai; indikator Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 15,17 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 14,45 persen dengan status tidak tercapai; indikator Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 3,19 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 4,70 persen dengan status tercapai; indikator Nilai investasi dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka Rp.18.828.191.813,- dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka Rp.47.798.669.296,- persen dengan status tercapai; indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 3,09 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 3,30 persen dengan status tidak tercapai. (2) Menurunnya jumlah penduduk miskin yang diukur melalui indikator Persentase penduduk miskin dengan target tahun ketiga RPJMD sebesar 12,81 persen dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 14,72 persen, dengan status tidak tercapai; (3) Menurunnya masalah kesejahteraan sosial yang diukur melalui indikator persentase PMKS yang tertangani dengan target tahun ketiga RPJMD sebesar 36,92 persen dan realisasi pada tahun

2024 adalah sebesar 83,00 persen, dengan status tercapai. (4) Meningkatnya kemandirian desa yang diukur melalui indikator Indeks Desa Membangun dengan target tahun ketiga RPJMD sebesar 0,6202 dan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,6470, dengan status tercapai.

3. Capaian Kinerja Misi III : Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Misi ketiga memiliki satu tujuan yaitu Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkeadilan, berkualitas dan berwawasan lingkungan yang diukur dengan Tingkat pembangunan infrastruktur pada tahun ketiga RPJMD pada 61,95 persen dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 64,63 persen kondisi indikator ini tercapai menunjukkan tujuan misi ketiga ini sudah tercapai. Sasaran pada misi ketiga ini terdiri dari (1) Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah yang diukur melalui Persentase jalan kondisi baik dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 33,06 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 58,78 persen dengan status tercapai; indikator Persentase ketersediaan fasilitas sarana perhubungan dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 65 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 50,76 persen dengan status tidak tercapai; indikator Persentase kawasan non kumuh perkotaan dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 99,01 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 98,89 persen dengan status tidak tercapai; (2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks kualitas lingkungan hidup dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 54,83 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 65,37 persen dengan status tercapai; (3) Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana yang diukur melalui indikator Persentase bencana yang tertangani dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 100 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 100 persen dengan status tercapai; indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 74,87 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 74,4 persen dengan status tidak tercapai.

4. Capaian Kinerja Misi IV : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

Misi keempat memiliki satu tujuan yaitu Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang diukur dengan indikator Indeks reformasi birokrasi pada tahun keempat RPJMD nilai B dan realisasi pada tahun 2024 sebesar B kondisi indikator ini tercapai menunjukkan tujuan misi keempat ini sudah tercapai. Sasaran pada misi keempat ini terdiri dari (1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang diukur melalui Indeks pengelolaan keuangan daerah dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 55 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 78,26 persen dengan status tercapai; indikator Nilai SAKIP dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka B dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka CC dengan status tidak tercapai; indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 58 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 74,78 persen dengan status tercapai; (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM baik dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 82 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 97,60 persen dengan status tercapai; (3) Meningkatnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur melalui indikator Nilai Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 2,46 dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 2,46 dengan status tercapai.

5. Capaian Kinerja Misi V : Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum

Misi kelima memiliki satu tujuan yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius dan berbudaya yang diukur dengan indikator Indeks harmoni sosial pada tahun keempat RPJMD dengan nilai 74,68 persen dan realisasi pada tahun 2024 sebesar 76,92 persen, kondisi indikator ini tercapai menunjukkan tujuan misi kelima ini sudah tercapai. Sasaran pada misi kelima ini terdiri dari (1) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang diukur melalui Indeks Ketentraman dan Ketertiban dengan target tahun ketiga RPJMD pada angka 68,93 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 85 persen dengan status tercapai; (2) Terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal yang diukur melalui Indeks budaya lokal dengan target tahun ketiga

RPJMD pada angka 58,25 persen dan realisasi di tahun 2024 berada pada angka 68,85 persen dengan status tercapai.

2.6.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Waki Kota dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.80
Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Gunungsitoli

No	INDKATOR	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Tercapai/ Tidak Tercapai
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,11	70,23	70,51	71,55	70,91	72,30	71,71	Tercapai
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,01	3,11	6,02	3,69	6,03	3,84	6,05	Tidak Tercapai
3	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,30	0,30	0,308	0,30	0,277	0,29	Tercapai
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	15,21	14,81	14,01	14,78	12,81	14,72	10,41	Tidak Tercapai
5	Laju Inflasi	Persentase	4,28	5,74	3,76	2,35	3,24	3,10	2,2	Tercapai
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	B	CC	B	B	BB	Tercapai
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	64,88	5,00	69,78	76,44	74,68	76,92	81,72	Tercapai
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	59,29	64,96	60,62	67,57	61,95	64,63	64,61	Tercapai

2.6.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilihat capaian indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan target tersebut bersumber dari RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026. IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Berikut capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dikutip berdasarkan dokumen Laporan LKPJ Kota Gunungsitoli, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.81

Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Gunungsitoli

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Aspek Pelayanan Umum													
Urusan Wajib Pendidikan													
1	Indeks Pendidikan	Indeks	77,83	86,25	79,21	84,65	80,60	93,20	83,37	93,20	111,79	Tercapai	Dinas Pendidikan
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,74	8,64	8,84	8,65	8,94	8,76	9,14	8,76	95,84	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,78	13,77	13,80	13,78	13,82	13,79	13,86	13,79	99,49	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persentase	91,20	99,21	93,03	99,01	94,86	98,08	98,52	98,08	99,55	Tercapai	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persentase	81,57	82,88	83,51	78,51	85,46	80,26	89,35	80,26	89,83	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
6	Rasio ruang kelas kategori baik SD	Persentase	84,03	89,94	84,13	90,25	84,23	91,68	84,43	91,68	108,59	Tercapai	Dinas Pendidikan
7	Rasio ruang kelas kategori baik SMP	Persentase	69,45	80,88	69,95	84,65	70,45	85,17	71,45	85,17	119,20	Tercapai	Dinas Pendidikan
8	Nilai Rata-rata UN SD	Persentase	81,44	82,23	83,14	82,26	84,84	82,66	88,25	82,66	93,67	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
9	Nilai Rata-rata UN SMP	Persentase	66,56	80,78	69,38	83,91	72,20	84,69	77,85	84,69	108,79	Tercapai	Dinas Pendidikan
10	Angka Partisipasi Murni (APM) Paud	Persentase	100,00	51,25	100,00	63,39	100,00	30,29	100	30,29	30,29	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
11	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan	Persentase	100,00	60,62	100,00	41,25	100,00	44,29	100	44,29	44,29	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat target Indikator Kinerja Urusan Wajib Pendidikan Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 yang belum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dimana target untuk indikator ini sebesar 8,94. Berdasarkan Surat BPS Kota Gunungsitoli nomor B-0069/1278/PK.320.01/2025, rata-rata lama sekolah di kota Gunungsitoli untuk tahun 2024 sebesar 8,76.
2. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dimana untuk indikator ini sebesar 13,82. Berdasarkan Data BPS Kota Gunungsitoli, harapan lama sekolah di Kota Gunungsitoli untuk tahun 2024 sebesar 13,79.
3. Nilai rata-rata ujian nasional SD/nilai yang disetarakan yaitu nilai yang diperoleh oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan rata-rata hasil ujian mata pelajaran dibagi dengan banyaknya jumlah mata pelajaran yang diujikan, dimana target untuk indikator ini sebesar 84,84.
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, dimana target pada indikator ini sebesar 85,46%.
5. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama berdasarkan hasil perhitungan, bahwa jumlah siswa usia 13-15 Tahun pada jenjang SMP/MTs sebanyak 7.100 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Gunungsitoli sebanyak 8.846 Orang. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai APM SMP sebesar 80,26%, sehingga target indikator tidak tercapai.
6. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa jumlah siswa usia 3-6 tahun pada jenjang PAUD sebanyak 4.166 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 3-6 tahun di Kota Gunungsitoli sebanyak 13.572 Orang. Berdasarkan data tersebut APM PAUD sebesar 30,29% sehingga target indikator tidak tercapai.
7. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, jumlah siswa usia 7-18 tahun pada jenjang Pendidikan kesetaraan sebanyak 407 orang, dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun sebanyak 919 orang. Dapat dijelaskan bahwa kelompok usia 7-18 tahun adalah jumlah penduduk yang belum mengikuti sekolah formal

baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sehingga, dapat diperoleh nilai APM Pendidikan Kesetaraan sebesar 44,29 %. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Kecamatan.

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Kesehatan													
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,61	71,71	71,82	74,03	72,03	74,23	72,45	74,23	102,46	Tercapai	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	205,00	112,87	194,00	175,34	183,00	173,81	180	173,81	96,56	Tercapai	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	13,50	22,01	13,25	19,87	13,00	8,69	12,75	8,69	68,16	Tercapai	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1.000 KH	2,70	4,36	2,68	3,4	2,66	1,69	2,64	1,69	64,02	Tercapai	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	Persen	5,50	6,80	5,47	6,18	5,43	4,82	5,4	4,82	89,26	Tercapai	Dinas Kesehatan
6	Indeks Keluarga Sehat (KIS)	Indeks	0,16	0,31	0,17	0,37	0,18	0,35	0,2	0,35	175,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
7	Persentase Faskes (Puskesmas, RS Terakreditasi)	Persen	100,00	75,00	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
8	Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen	30,43	35,60	31,48	36,50	32,53	40,46	34,62	40,46	116,87	Tercapai	Dinas Kesehatan
9	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	48,00	37,94	50,00	36,74	52,00	49,26	56	49,26	87,96	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
10	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	0,33	0,35	0,35	0,34	0,36	0,43	0,4	0,43	107,50	Tercapai	Dinas Kesehatan
11	Rasio Paramedis per satuan penduduk	Per 1.000 pddk	3,98	4,40	4,01	4,50	4,05	4,58	4,12	4,58	111,17	Tercapai	Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data bahwa terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai sesuai target yakni Persentanse Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat. Pada tahun 2024 di Kota Gunungsitoli, jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat yakni sebanyak 167 sarana, sedangkan jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di Kota Gunungsitoli sebanyak 339 sarana, sehingga dengan demikian capaian indikator kinerja Persentanse Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 adalah 49,26%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan yakni 52%. Tidak tercapainya target Persentanse Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa variabel yakni sebagai berikut :

1. Gedung dan bangunan yakni lokasi yang tidak terhindar dari debu, ruang yang tidak memiliki toilet, tidak ada ruang karyawan dan ruang administrasi, pintu tidak membuka ke arah luar.
2. Fasilitas sanitasi yakni kurangnya ketersediaan air bersih, tidak tersedia toilet, tempat sampah tidak terdapat di setiap ruang yang menghasilkan sampah dan tidak diangkut, tidak tersedia tempat cuci tangan, tempat mencuci peralatan tidak tersedia air panas dan tidak tersedia 3 bilik pencucian, tempat pencucian bahan makanan tidak mengandung larutan cuci hama, serta tidak terdapat alat pencegah masuk serangga dan tikus.
3. Tidak terdapat penyimpanan makanan panas pada dapur, ruang makan dan gudang bahan makanan, tidak ada cerobong asap dan tidak terdapat tulisan hygiene bagi penjamah makanan, pada ruang makan tidak terdapat pintu masuk yang buka tutup secara otomatis.
4. Kurang tersedia pelabelan di tempat sarana tempat pengelolaan pangan.
5. Tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi tidak disimpan sesuai dengan jenis makanan pada rak.
6. Cara menyajikan dan membawa makanan tidak dilakukan secara tertutup.
7. Kurangnya pemahaman keamanan pangan.
8. Tenaga Kerja tidak memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
9. Kurangnya hygiene penjamah pangan seperti merokok pada saat menjamah pangan.
10. Pekerja tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Pekerjaan Umum													
1	Persentase Jalan Mantap	Persentase	65,70	65,77	67,03	70,93	68,36	73,99	71,02	73,99	104,18	Tercapai	Dinas PUPR
2	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	38,87	39,60	40,20	45,9	41,53	45,90	44,19	45,90	103,87	Tercapai	Dinas PUPR
3	Persentase jalan kondisi baik	Persentase	32,30	46,23	32,68	50,96	33,06	58,78	33,82	58,78	173,80	Tercapai	Dinas PUPR
4	Persentase Penduduk yang mengakses air minum (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	35,03	37,04	36,36	39,31	37,69	42,83	40,35	42,83	106,15	Tercapai	Dinas PUPR
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	95,13	95,17	95,36	97,60	95,59	98,17	96,05	98,17	102,21	Tercapai	Dinas PUPR
6	Persentase Penduduk yang mengakses sanitasi layak	Persentase	33,97	34,57	35,30	38,78	36,63	42,48	39,29	42,48	108,12	Tercapai	Dinas PUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Penataan Ruang													
1	Persentase Rekomendasi Pemanfaat Ruang yang sesuai dengan peruntukannya	Persentase	76,00	78,79	78,00	85,29	80,00	77,41	84	77,41	92,15	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
2	Persentase ruang terbuka hijau/publik yang tertata	Persentase	42,68	48,46					43,24				Dinas PUPR
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	81,02	81,03	82,35	82,38	83,68	83,69	86,34	83,69	96,93	Tercapai	Dinas PUPR
2	Persentase kawasan non kumuh perkotaan	Persentase	98,75	98,89	98,88	98,89	99,01	98,89	99,27	98,89	99,62	Tidak Tercapai	Dinas PUPR

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1	Persentase Bencana yang tertangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	BPBD
Satpol													
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	66,37	85,80	67,65	85,00	68,93	85,00	71,49	85,00	118,90	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Tingkat Keamanan	Persentase	69,44	100	72,24	100,00	75,04	100,00	80,64	100,00	124,01	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase penyelesaian pelanggaran PERDA	Persentase	98,37	100	98,78	100,00	99,19	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	31,30	57,50	31,93	55,00	32,56	55,00	33,82	55,00	162,63	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
Damkar													
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	Persentase	70,87	71,25	72,87	73,81	74,87	74,40	78,87	74,40	94,33	Tercapai	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Sosial												**4**	
1	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	56,92	45,71	46,92	87,75	36,92	83,00	16,92	83,00	490,54	Tercapai	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase	55,00	37,63	45,00	73,41	35,00	51,15	15	51,15	341,00	Tercapai	Dinas Sosial
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	60,00	100	50,00	98,48	40,00	75,00	20	75,00	375,00	Tercapai	Dinas Sosial
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase	50,00	0	40,00	0	30,00	0	10	0	-	Tercapai	Dinas Sosial

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasl Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Tenaga Kerja													
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,11	3,65	3,10	3,67	3,09	3,30	3,07	3,30	107,49	Tidak Tercapai	Dinas Perdagngan dan Tenaga Kerja
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,41	89,69	89,46	89,69	89,51	89,92	89,61	89,92	100,35	Tercapai	DP5A
3	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	50,53	49,53	51,53	65,13	51,53	66,12	54,55	66,12	121,21	Tercapai	DP5A
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,33	60,18	54,58	66,25	54,83	65,37	55,33	65,37	118,15	Tercapai	DP5A
5	Persentase ruang terbuka hijau/publik yang tertata	Persentase			43,02	43,02	54,83	65,37	43,24	65,37	151,18	Tercapai	DP5A

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase	90,33	90,35	91,89	92,13	93,43	93.86	95,05	93,86	98,75	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persentase	90,33	94,21	91,89	99,90	91,89	99.76	95,05	99,76	104,96	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	Persentase	99,19	96,36	99,20	93,40	99,21	97.60	99,23	97,60	98,36	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	40,00	43,72	50,00	52,54	97,80	61.75	98,15	61,75	62,91	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100,00	100,00	100,00	0,00	60,00	100,00	70	100,00	142,86	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran	Persentase	100,00	98,18	100,00	99,07	100,00	99,41	100	99,41	99,41	Tidak Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	Persentase	96,00	100,00	96,50	100,00	97,00	100,00	98	100,00	102,04	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Persentase Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6026	0,6113	0,6114	0,6271	0,6202	0,6470	0,6378	0,6470	101,44	Tercapai	Dinas PMD
Urusan Wajib Perhubungan													
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Persentase	25,00	47,98	50,00	50,26	65,00	50,76	95	50,76	53,43	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika													
1	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,02	2,01	2,24	2,13	2,46	2,23	2,9	2,23	76,90	Tercapai	Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
1	Persentase koperasi aktif	Persentase	65,22	56,67	66,22	57,02	67,22	16,13	69,22	16,13	23,30	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,80	2,60	3,00	3,34	3,30	3,43	3,9	3,43	87,95	Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
Urusan Wajib Penanaman Modal													
1	Nilai Realisasi Investasi	Miliar	17,00	54,70	17,90	94,00	18,80	47,70	4,00	47,70		Tercapai	Dinas Penanaman Modal
2	Jumlah Investor	Investor	1	3	1	13	1	23	6	23	383,33	Tercapai	Dinas Penanaman Modal
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perizinan	Persentase	80,00	92,58	81,00	95,87	82,00	97,60	84	97,60	116,19	Tercapai	Dinas Penanaman Modal
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga													
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pariwisata
2	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	5,00	5,00	6,00	10,00	7,00	8,00	9	8,00	88,89	Tercapai	Dinas Pariwisata
3	Jumlah kegiatan organisasi pemuda	kegiatan	7,00	10,00	9,00	9,00	11,00	11,00	15	11,00	73,33	Tercapai	Dinas Pariwisata
Urusan Wajib Kebudayaan													
1	Indeks Budaya Lokal	Indeks	48,62	57,23	57,43	67,87	58,25	68,85	67,56	68,85	101,91	Tercapai	Dinas Pariwisata
2	Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun	Persentase	50,00	75,00	75,00	100,00	75,00	100,00	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Pariwisata

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Persentase jumlah sanggar seni dan budaya	Persentase	71,00	95,00	72,00	77,14	74,00	77,14	76	77,14	101,50	Tercapai	Dinas Pariwisata
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase	24,86	1,71	25,30	26,47	25,76	29,41	26,69	29,41	110,19	Tercapai	Dinas Pariwisata
Urusan Wajib Perpustakaan													
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	2,27	3,88	2,39	8,36	2,51	8,33	2,75	8,33	303,07	Tercapai	Dinas Perpustakaan
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	34,00	43,61	36,00	44,35	38,00	45,87	42	45,87	109,21	Tercapai	Dinas Perpustakaan
Urusan Wajib Kearsipan													
1	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase	50,00	43,70	55,00	48,20	57,50	48,73	62,5	48,73	77,97	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan													
1	Rata-rata Nilai Tukar Nelayan	Persentase	99,00	100,97	100,00	100,00	101,00	101,00	102	101,00	99,02	Tercapai	Dinas Perikanan
2	Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya	ton	95,00	41,00	96,50	24,69	97,50	25,68	99	25,68	25,94	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
3	Peningkatan Produksi perikanan	ton	10,23	10,53	14,34	14,64	20,05	15,61	17,58	15,61	88,79	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan
4	Kelompok usaha perikanan yang	Persentase	5,45	5,45	8,48	8,48	11,52	10,91	17,58	10,91	62,06	Tidak Tercapai	Dinas Perikanan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	berkualitas												
Urusan Pilihan Pertanian													
1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	15,07	14,94	15,12	14,60	15,17	14,45	15,27	14,45	94,63	Tidak Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi	ton/Ha	5,20	5,60	5,30	5,68	5,40	5,68	5,6	5,68	101,43	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
3	Peningkatan Populasi Tanaman Holtikultura Tahunan	batang	2.525	3.598	2.777	7.065	3.055	6.306	3.696	6.306	170,62	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura Semusim	ton	231	366,44	234	389,90	236	545,22	241	545,22	226,23	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
5	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	ton	1.965	2.702	1.985	2.323	2.004	2.323	2.043	2.322,65	113,69	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
6	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	ekor	242.901	894.577	264.983	859.293	287.065	775.524	331.229	775.524	234,14	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
7	Persentase cakupan bina kelompok tani	Persentase	9,28	27,00	10,14	12,10	11,00	14,00	12,72	14,00	110,06	Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
8	Cakupan peningkatan kelas kelompok tani lanjut dan madya	Persen	13,17	11,95	14,50	13,33	15,76	11,00	18,1	11,00	60,77	Tidak Tercapai	Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian
Urusan Pilihan Perdagangan													
1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut	Persentase	3,16	3,53	3,18	4,18	3,19	4,70	3,2	4,70	146,88	Tercapai	Dinas Perdagangan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lapangan Usaha Perdagangan (Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor)												dan Ketenagakerjaan
2	Distribusi persentase lapangan usaha perdagangan dalam PDRB	Persentase	26,58	27,41	26,60	27,49	26,62	27,96	26,68	27,96	104,80	Tercapai	Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Urusan Pilihan Perindustrian													
1	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Perindustrian (Industri Pengolahan)	Persentase	1,70	3,30	1,87	5,82	1,92	4,26	2,3	4,26	185,22	Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
2	Persentase Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam PDRB berdasarkan harga berlaku	Persentase	41,00	0,18	44,00	0,19	47,00	10,91	53	10,91	20,58	Tidak Tercapai	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
Unsur Pendukung Sekretariat Daerah													
1	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (Setda)	Persentase	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi		Tercapai	Sekretariat Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,26	80	80,26	100,33	Tercapai	Sekretariat Daerah
3	Nilai SAKIP	Indeks	CC	CC	B	CC	B	B	BB	B		Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah
Unsur Pendukung Sekretariat DPRD													

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		2023		2024		Target Kondisi Akhir RPJMD	Realisasi Kondisi Akhir	Capaian Realisasi Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			T	R	T	R	T	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	90,00	95,00	90,00	92,00	90,00	92,00	90	92,00	102,22	Tercapai	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Perencanaan													
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Persentase	82,00	97,11	83,00	91,33	84,00	94,19	86	94,19	109,52	Tercapai	BAPPERIDA
Unsur Penunjang Keuangan													
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	50,00	53,10*	55,00	76,579	55,00	78,26	70	78,26	111,80	Tercapai	BPKPD
Unsur Penunjang Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan													
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	56,00	50,57*	57,00	59,49	58,00	74,78	60	74,78	124,63	Tercapai	BKPSDM
Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan													
1	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	40,63	55,88	56,25	67,65	71,88	73,52	100	73,52	73,52	Tercapai	BAPPERIDA
Unsur Penunjang Pengawasan													
1	Rata-rata hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase	60	67,43	62	67,43	65	67,43	70	67,43	96,33	Tercapai	Inspektorat
Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik													
1	Persentase potensi gangguan/konflik sosial yang tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai	Kesban

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen krusial yang harus diperhatikan secara cermat dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025 – 2029. Pengelolaan ini tidak hanya terfokus pada efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi fiskal daerah yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi fiskal merujuk pada keadaan keuangan daerah, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, serta struktur utang dan aset daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Kota Gunungsitoli, kondisi fiskal yang sehat menjadi landasan untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan kemampuan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang dijalankan selama periode RPJMD.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Analisis kondisi fiskal daerah Kota Gunungsitoli akan mencakup evaluasi terhadap kinerja keuangan masa lalu, termasuk perkembangan pendapatan, pengeluaran, dan struktur utang. Data ini menjadi dasar untuk merencanakan penyesuaian strategis dalam pengelolaan keuangan untuk lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2025-2029. Dengan memperhatikan kondisi fiskal yang terkelola dengan baik, Kota Gunungsitoli akan mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan anggaran termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan Kota Gunungsitoli tahun 2019 – 2023 berdasarkan pada data kinerja keuangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Gunungsitoli dan Laporan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada sub bab pembahasan ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja (kompenen belanja yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019), proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya bahwa perlu dilakukan peningkatan dan

perluasan basis PAD serta mengupayakan secara optimalisasi Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Selain itu, untuk peningkatan pendapatan daerah juga memerlukan Kebijakan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja.

Realisasi pendapatan daerah Kota Gunungsitoli dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi dalam pencapaiannya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut umumnya berada di bawah target yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan mencapai Rp.730.739.514.033,86 tahun 2020 menurun menjadi Rp.703.793.539.789,37, tahun 2021 pendapatan meningkat kembali menjadi Rp.709.074.723.156,57, tahun 2022 sebesar Rp.710.592.974.742,24 dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp.760.389.191.866,08. Adapun rata-rata proporsi target dan realisasi pendapatan daerah mencapai 97,98%.

Tabel 2.82
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2019-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ (berkurang)
2019	732.766.971.317,00	730.739.514.033,86	99,72	2.027.457.283,14
2020	715.112.776.051,95	703.793.539.789,37	98,42	11.319.236.262,58
2021	719.572.906.377,00	709.074.723.156,57	98,54	10.498.183.220,43
2022	724.364.631.368,00	710.592.974.742,24	98,10	13.771.656.625,76
2023	799.425.587.546,00	760.389.191.866,08	95,12	39.036.395.679,92
2024	769.383.217.929,33	739.376.035.908,16	96,10	30.007.182.021,17

Tabel 2.83
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2019-2024
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata (%)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**703.793.539.789,37**	**709.074.723.156,57**	**710.592.974.742,24**	**760.389.191.866,08**	**739.376.035.908,16**	1,07
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**25.530.252.953,37**	**21.417.950.730,57**	**25.231.747.566,24**	**27.398.988.049,08**	**23.906.167.796,16**	(2,61)
1.1.1	Pajak Daerah	11.951.902.720,00	15.305.277.374,00	19.643.473.164,00	20.808.647.138,00	17.430.695.395,00	10,38
1.1.2	Retribusi Daerah	2.591.503.580,00	2.665.237.873,10	3.499.956.408,00	3.756.353.811,80	3.209.452.685,00	14,61
1.1.3	Lain-lain PAD yang Sah	10.986.846.653,37	3.447.435.483,47	2.088.317.994,24	2.833.987.099,28	3.266.019.716,16	(24,65)
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**563.459.655.681,00**	**654.159.104.127,00**	**667.580.406.962,00**	**722.172.519.881,00**	**703.441.933.340,00**	5,82
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.252.176.779,00	630.278.972.945,00	640.384.411.087,00	690.296.861.856,00	680.945.679.902,00	5,65
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.207.478.902,00	23.880.131.182,00	27.195.995.875,00	31.875.658.025,00	22.496.253.438,00	10,21
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**114.803.631.155,00**	**33.497.668.299,00**	**17.780.820.214,00**	**10.817.683.936,00**	**12.027.934.772,00**	(39,77)
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	114.803.631.155,00	33.497.668.299,00	17.780.820.214,00	10.817.683.936,00	12.027.934.772,00	(39,77)
2	**BELANJA DAERAH**	**719.249.942.771,54**	**693.377.502.171,69**	**696.581.644.850,51**	**808.491.704.507,00**	**736.472.621.463,00**	2,79
2.1	**BELANJA OPERASI**	**436.757.404.949,54**	**413.474.510.674,69**	**425.431.833.527,51**	**500.943.824.969,00**	**481.835.639.087,00**	3,72
2.1.1	Belanja Pegawai	256.834.602.838,62	254.203.976.854,00	234.568.354.650,00	265.426.127.364,00	303.342.694.475,00	(1,98)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.244.890.360,92	148.219.237.570,69	178.920.020.317,51	221.769.320.757,00	140.490.735.458,00	13,24
2.1.3	Belanja Hibah	35.990.311.750,00	10.234.661.550,00	10.887.808.760,00	13.234.432.348,00	37.552.209.154,00	68,40
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	687.600.000,00	816.634.700,00	1.055.649.800,00	513.944.500,00	0	13,22
2.2	**BELANJA MODAL**	**145.877.614.736,00**	**148.806.251.974,00**	**145.631.533.497,00**	**176.094.346.822,00**	**122.329.502.180,00**	3,46
2.2.1	**Belanja Modal**	145.877.614.736,00	148.806.251.974,00	145.631.533.497,00	176.094.346.822,00	122.329.502.180,00	3,46
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.868.795.526,00**	**135.916.000,00**	**0,00**	**20.136.000,00**	**0**	(98,60)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.868.795.526,00	135.916.000,00	0,00	20.136.000,00	0	(98,60)

2.4	**BELANJA TRANSFER**	**131.746.127.560,00**	**130.960.823.523,00**	**125.518.277.826,00**	**131.433.396.716,00**	**132.307.480.196,00**	(0,94)
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	131.746.127.560,00	130.960.823.523,00	125.518.277.826,00	131.433.396.716,00	132.307.480.196,00	(0,94)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.935.675.160,35**	**23.122.173.332,18**	**38.831.317.554,06**	**51.842.647.445,79**	**3.740.134.804,87**	13,67
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**39.935.675.160,35**	**24.122.173.332,18**	**38.831.317.554,06**	**52.842.647.445,79**	**3.740.134.804,87**	13,67
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.935.675.160,35	24.122.173.332,18	38.831.317.554,06	52.842.647.445,79	3.740.134.804,87	13,67
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**0**	(50,00)
3.2.1	Pemberian Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0	(50,00)

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025

Pendapatan daerah Kota Gunungsitoli dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan persentase rata-rata pertumbuhan 1,07%, proporsi realisasi dari masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut :

Grafik 2.6
Proporsi Realisasi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2020 – 2024
Kota Gunungsitoli

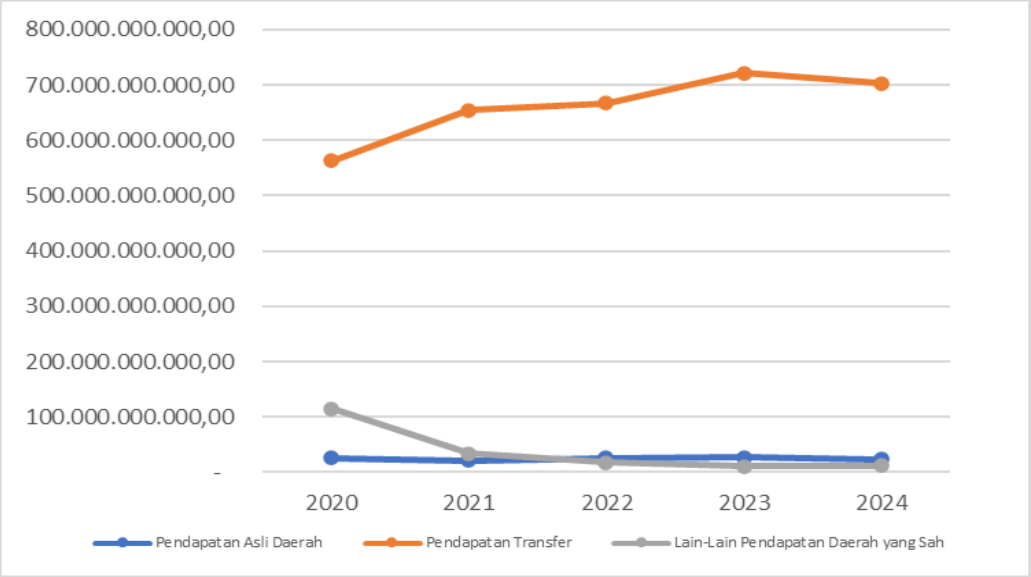

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan proporsi sumber pendapatan di atas, sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pembiayaan pembangunan di Kota Gunungsitoli masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

B. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Realisasi belanja daerah Kota Gunungsitoli dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuatif dalam pencapaiannya. Pada tahun 2019-2022 realisasi belanja mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp.732.295.074.460,60 menurun menjadi Rp.696.581.644.850,51 pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp.808.491.704.507,00, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi Rp.736.472.621.463,00. Adapun rata-rata proporsi target belanja dan realisasi belanja daerah Kota Gunungsitoli pada periode 2020-2024 sebesar 91,42%.

Tabel 2.84
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ (berkurang)
2020	753.470.570.374,30	719.249.942.771,54	95,46	34.220.627.602,76
2021	742.714.129.125,00	693.377.502.171,69	93,36	49.336.626.953,31
2022	762.371.788.922,00	696.581.644.850,51	91,37	65.790.144.071,49
2023	827.956.755.410,00	808.491.704.507,00	97,65	19.465.050.903,00
2024	774.508.269.021,20	736.472.621.463,00	95,09	38.035.647.558,20

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2024 (data diolah)

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas disentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembatuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Perangkat Daerah.

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar Rp.39.935.675.160,35 menurun pada tahun 2021 menjadi Rp.24.122.173.332,18, sementara pada tahun 2022-2023 meningkat kembali menjadi Rp.38.831.317.554,06 dan Rp.52.842.647.445,79, selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp.3.740.134.804,87.

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca daerah mengambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan mengambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajiban serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Gunungsitoli dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca T.A.2020-2024
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**	**1.624.192.685.802,31**	**1.685.790.606.804,57**	**1.891.460.623.197,09**	**1.965.195.538.417,69**	**1.974.697.486.756,20**	5,38
1.1	**ASET LANCAR**	**46.960.353.470,40**	**67.529.805.613,82**	**78.594.594.855,58**	**21.920.621.702,76**	**40.722.932.626,12**	(10,39)
1.1.1	Kas dan Setara Kas	24.141.237.343,18	38.833.116.563,06	52.842.994.079,79	3.611.686.107,87	6.644.289.448,03	
1.1.2	Piutang Pendapatan	8.650.423.779,80	14.250.917.645,97	8.224.976.768,01	9.386.837.303,01	29.208.752.309,01	
1.1.3	Penyisihan Piutang	- 2.337.366.957,99	- 2.287.264.951,55	- 1.798.276.092,74	- 2.269.440.433,21	- 2.880.308.236,98	
1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	92.886.456,79	100.058.611,62	96.252.574,08	164.040.836,43	30.932.530,35	
1.1.5	Persediaan	16.413.172.848,62	16.632.977.744,72	19.228.647.526,44	11.027.497.888,66	7.719.266.575,71	
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**3.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	27,08
1.2.1	Investasi Jangka Panjang non Permanen	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
1.3	**ASET TETAP**	**1.540.425.262.680,20**	**1.578.070.135.947,11**	**1.776.891.216.298,81**	**1.901.600.071.566,66**	**1.889.625.700.118,61**	6,18
1.3.1	Tanah	416.899.379.941,02	438.460.107.104,93	534.823.768.307,93	537.609.830.307,93	536.576.066.607,93	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	226.565.209.011,82	239.208.707.521,89	254.656.577.334,47	262.180.747.952,26	267.464.157.569,98	
1.3.3	Gedung dan Bangunan	469.596.901.592,08	511.635.483.139,76	605.048.010.554,82	652.727.351.570,28	748.405.191.751,41	
1.3.4	Jalan, jaringan dan Irigasi	1.350.710.431.745,48	1.405.837.239.474,48	1.495.579.470.068,54	1.623.861.083.289,08	1.673.219.250.378,84	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	27.756.491.832,30	30.120.997.487,00	32.463.768.179,30	33.819.084.830,22	31.050.418.844,22	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.440.846.811,00	28.518.870.763,00	34.845.060.739,29	70.022.584.049,46	7.620.980.570,38	
1.3.6	Akumulasi Penyusutan	- 980.543.998.253,50	- 1.075.711.269.543,95	- 1.180.525.438.885,54	- 1.278.620.610.432,57	- 1.374.710.365.604,15	

1.5	**ASET LAINNYA**	**33.807.069.651,71**	**36.190.665.243,64**	**31.974.812.042,70**	**36.674.845.148,27**	**39.348.854.011,47**	6,43
1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.843.743.500,00	4.843.743.500,00	1.294.161.000,00	125.000.000,00	0	
1.5.2	Aset Tidak Berwujud	835.856.400,00	835.856.400,00	838.406.400,00	692.652.540,00	692.652.540,00	
1.5.3	Aset Lain-lain	28.127.469.751,71	30.511.065.343,64	29.842.244.642,70	33.602.845.608,27	38.197.993.471,47	
1.5.4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	2.254.347.000,00	458.208.000,00	
2	**KEWAJIBAN**	**17.917.504.975,40**	**6.344.107.140,40**	**1.244.866.651,00**	**11.438.937.161,00**	**8.964.211.565,08**	228,09
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**17.917.504.975,40**	**6.344.107.140,40**	**1.244.866.651,00**	**11.438.937.161,00**	**8.964.211.565,08**	
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	36,00	151.680,00	
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	0	0	0	0	425.133.504,08	
2.1.3	Utang Belanja	12.108.183.106,00	16.750.606,00	16.750.606,00	10.210.847.183,00	7.310.836.439,00	
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.809.321.869,40	6.327.356.534,40	1.228.116.045,00	1.228.089.942,00	1.228.089.942,00	
3	**EKUITAS**	**1.606.275.180.826,91**	**1.679.446.499.664,17**	**1.890.215.756.546,09**	**1.953.756.601.256,69**	**1.965.733.275.191,12**	**5,32**
3.1	**EKUITAS**	**1.606.275.180.826,91**	**1.679.446.499.664,17**	**1.890.215.756.546,09**	**1.953.756.601.256,69**	**1.965.733.275.191,12**	
3.1.1	Ekuitas	1.606.275.180.826,91	1.679.446.499.664,17	1.890.215.756.546,09	1.953.756.601.256,69	1.965.733.275.191,12	

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, asep tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang di investasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

2.2.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan anggaran yang efektif adalah kunci utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Teori ekonomi publik menekankan pentingnya alokasi sumber daya publik yang efisien dan adil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dengan meminimalkan biaya sosial. Dalam konteks ini, proyeksi anggaran dari tahun 2025-2029 bukan hanya sebagai alat untuk meramalkan pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerapkan strategi yang terukur dan efektif dalam pengelolaan sumber daya publik. Teori manajemen keuangan publik menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi anggaran yang teliti membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang optimal serta mengalokasikan belanja dengan efisien, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks regulasi, proyeksi anggaran harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah. Keberadaan regulasi ini mengatur tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Aspek yang dapat mempengaruhi kebijakan pendapatan daerah antara lain adanya regulasi peraturan yang merupakan acuan yang dipakai dalam menggali penerimaan daerah dan struktur ekonomi/sosial masyarakat yang sangat menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi harus lebih realistis tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikan pajak dan retribusi akan tetapi juga melihat aspek lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Bertitik tolak pada kondisi tersebut, kebijakan strategis yang akan dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah bidang pendapatan dan kualitas sistem pemungutan pendapatan daerah terutama pelayanan pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah dengan sistem administrasi dan efesiensi pengunaan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
3. Meningkatakan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan eksetinfikasi sumber pendapatan daerah berdasarkan karakteristik daerah dan pendayagunaan aset daerah termasuk pendapatan pihak ketiga.
4. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan menitikberatkan pendekatan potensi sumber daya alam.
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran dana transfer ke daerah dan desa.
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan kebutuhan dasar masyrakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

3. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah.
4. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan nasional, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah Penerimaan Kembali Pemberi Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga), Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Penetapan proyeksi keuangan daerah Kota Gunungsitoli didasarkan pada kinerja pelaksanaan keuangan daerah masa lalu atau data realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, asumsi makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun ke depan. Asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penetapan target pendapatan dan belanja daerah adalah pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Penetapan targetnya berasal dari target yang telah ditetapkan pada periode lima tahunan pertama RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2045.

2.2.2.1 Proporsi Pengunaan Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi otoritas, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesusaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi penganguran dan pemborosan sumber daya, serta meingkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan data yang digunakan terkait APBD Tahun Anggaran 2020-2024 adalah data yang sudah diaudit oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi proposi penggunaan anggaran di Kota Gunungsitoli terhitung dari tahun 2020-2024 cukup dinamis, hal ini memperlihatkan bahwa APBD Kota Gunungsitoli mengoptimalkan pengurangan belanja aparatur untuk memaksimalkan pembangunan yang merata di segala bidang. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.86
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	*(b)*	*=(a)/(b)x 100%*
1	Tahun Anggaran 2020	256.834.602.838,62	720.249.942.771,54	35,66
2	Tahun Anggaran 2021	254.203.976.854,00	694.377.502.171,69	36,61
3	Tahun Anggaran 2022	234.568.354.650,00	696.581.644.850,51	33,67
4	Tahun Anggaran 2023	265.426.127.364,00	809.491.704.507,00	32,79
5	Tahun Anggaran 2024	303.342.694.475,00	736.472.621.263,00	41,19

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025

Total belanja untuk pemenuhan aparatur Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Salah faktornya dikarenakan oleh penambahan jumlah pegawai. Berdasarkan persentase proporsi kebutuhan aparatur pada Tahun Anggaran 2020 belanja daerah digunakan untuk pemenuhan belanja aparatur mencapai 35,66%, meningkat kembali di Tahun 2021 menjadi 36,61% dan selanjutnya menurun pada tahun 2022-2023 yaitu 33,67% dan 32,79% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 41,19%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kota Gunungsitoli perlu berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai untuk memaksimalkan belanja pembangunan dan optimalisasi pelayanan bagi masyarakat.

Grafik 2.7
Gambaran Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Gunungsitoli

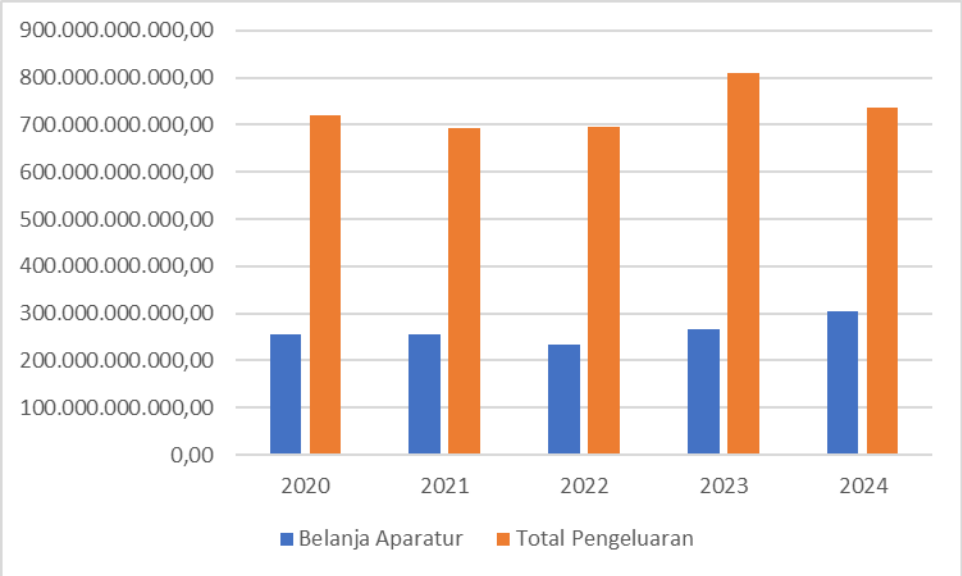

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai sumber dana untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari dua aspek utama, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah, serta penerimaan pinjaman daerah. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang, dan pembentukan dana cadangan.

Secara umum, kinerja pembiayaan daerah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Ketika realisasi pendapatan tidak cukup untuk membiayai belanja daerah, pembiayaan berperan dalam menutup defisit guna memastikan program pembangunan tetap berjalan. Sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran, pembiayaan dapat digunakan untuk alokasi strategis seperti investasi atau pengurangan kewajiban keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap pembiayaan daerah penting untuk memahami seberapa efektif pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berikut tabel yang menguraikan Defisit Rill Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Gunungsitoli tahun 2020-2024 :

Tabel 2.87
Defisit Riil Anggaran Kota Gunungsitoli Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	703.793.539.789,37	709.074.723.156,57	710.592.974.742,24	760.389.191.866,08	739.376.035.908,16
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	719.249.942.771,54	693.377.502.171,69	696.581.644.850,51	808.491.704.507,00	736.472.621.463,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0
A	**Defisit Riil**	**(16.456.402.982,17)**	**14.697.220.984,88**	**14.011.329.891,73**	**(49.102.512.640,92)**	**3.740.134.804,87**

Sumber : BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025

Dari tabel di atas, defisit riil Pemerintah Kota Gunungsitoli fluktuatif, dimana pada tahun 2021-2022 memiliki surplus rill yang cukup sebagai akumulatif dari defisit riil dengan total realisasi pembiayaan daerah. Namun, tahun 2019, 2020 dan 2023 mengalami defisit. Kondisi ini dapat mengambarkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli masih belum mencukupi untuk membiayai belanja pembangunan.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan kerangka pendanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tren penerimaan daerah, alokasi belanja, serta strategi pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi, kebijakan fiskal nasional, serta kapasitas fiskal daerah, kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan dalam memastikan bahwa setiap kebutuhan belanja dapat dipenuhi tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan.Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur (birokrasi) maupun efesiensi anggaran pendanaan pemerintah daerah berupa pengurangan anggaran yang bersifat insentif.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan aspek krusial dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan kesinambungan pembangunan serta keseimbangan fiskal daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta penerimaan lainnya menjadi faktor utama dalam menentukan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan tren ekonomi, potensi sumber daya daerah, serta kebijakan fiskal yang berlaku.

Selain itu, belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien guna mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja ini mencakup belanja operasional, belanja modal, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga strategi alokasi anggaran harus disusun secara cermat untuk menghindari defisit yang tidak terkendali.

Pendapatan daerah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika ekonomi, perubahan kebijakan fiskal, dan perkembangan teknologi. Selain itu, kebijakan fiskal nasional juga mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, seperti penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik yang berdampak pada potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), proyeksi penerimaan dari retribusi daerah yang masih belum optimal.

Beberapa arah kebijakan dan strategi pendapatan daerah yaitu

1. Optimalisasi pemungutan pajak daerah, melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok, Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perpajakan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Penguatan evaluasi kepatuhan wajib pajak dan pemutakhiran data potensi pajak secara berkala, dan Intensifikasi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi kebocoran pajak daerah.

2. Diversifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui peningkatan potensi-potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, dan Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Optimalisasi Retribusi Daerah, melalui penyempurnaan sistem retribusi daerah agar lebih efisien dan berbasis layanan publik yang berkualitas, penguatan mekanisme pemungutan retribusi serta evaluasi tarif retribusi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan daerah.
4. Peningkatan Pemanfaatan Aset Daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan aset dengan sektor swasta, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan nilai ekonomi aset.
5. Inovasi dan Digitalisasi dalam Pengelolaan Pendapatan, melalui pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital untuk meningkatkan kemudahan akses dan transparansi.
6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal Daerah, melalui penyusunan regulasi yang adaptif, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kebijakan bagi hasil pajak dan dana transfer daerah agar lebih optimal, peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan daerah.

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui kebijakan belanja yang tepat sasaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan belanja daerah dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1) Besaran proporsi belanja operasional dibanding belanja modal, yang menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur dan investasi daerah.

2) Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, yang membuat belanja daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.
3) Belum optimalnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam aspek belanja pegawai dan barang jasa yang masih memiliki ruang untuk penghematan.
4) Fluktuasi pendapatan daerah yang berdampak pada stabilitas belanja, terutama dalam merespons dinamika perekonomian regional dan nasional.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, arah kebijakan belanja daerah harus berfokus pada optimalisasi efektivitas dan efisiensi anggaran dengan menyeimbangkan antar komponen belanja sesuai ketentuan dan proporsi kebutuhan pencapaian target Pembangunan. Berikut kebijakan umum dalam pengelolaan belanja daerah antara lain:

1) Pemenuhan mandatory spending yang telah diamanatkan dalam perundang-undangan.
2) Meningkatkan alokasi belanja yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, dan percepatan pengentasan kemiskinan.
3) Pemenuhan belanja dalam rangka mewujudkan Program Prioritas guna pencapaian visi misi daerah serta dukungan terhadap pusat dan provinsi.
4) Memperkuat pengendalian belanja dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, agar lebih transparan dan berorientasi pada hasil.

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kota Gunungsitoli diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Tabel 2.88
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030
Kota Gunungsitoli

No.	URAIAN	Rata-rata (%)	Tahun (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**0,69%**	**747.181.203.087,00**	**751.330.401.178,74**	**756.166.404.418,87**	**761.683.573.646,00**	**767.932.604.808,60**	**773.210.258.830,12**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1,59%**	**36.018.363.421,00**	**36.633.730.689,42**	**37.231.446.572,52**	**37.796.020.110,82**	**38.366.018.527,71**	**38.976.475.776,89**
1.1.1.	Pajak Daerah	1,85%	30.641.363.421,00	27.497.592.291,00	31.848.020.312,52	32.421.284.678,14	32.972.446.517,67	33.582.436.778,25
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,85%	3.877.000.000,00	3.954.540.000,00	4.029.676.260,00	4.102.210.432,68	4.171.948.010,04	4.249.129.048,22
1.1.3.	Lain-lain PAD yang Sah	-5,00%	1.500.000.000,00	5.181.598.398,00	1.353.750.000,00	1.272.525.000,00	1.221.624.000,00	1.160.542.800,00
1.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**0,68%**	**698.471.438.666,00**	**702.259.097.509,32**	**706.733.698.752,97**	**711.905.917.105,48**	**717.788.637.670,50**	**722.701.242.226,01**
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,65%	678.784.662.000,00	682.178.585.310,00	686.271.656.821,86	691.075.558.419,61	696.604.162.886,97	701.132.089.945,74
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,85%	19.686.776.666,00	20.080.512.199,32	20.462.041.931,11	20.830.358.685,87	21.184.474.783,53	21.576.387.567,02
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-1,85%**	**12.691.401.000,00**	**12.437.572.980,00**	**12.201.259.093,38**	**11.981.636.429,70**	**11.777.948.610,39**	**11.560.056.561,10**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00%	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-1,85%	12.691.401.000,00	12.437.572.980,00	12.201.259.093,38	11.981.636.429,70	11.777.948.610,39	11.560.056.561,10

	Perundang-Undangan							
2.	**BELANJA DAERAH**	**0,92%**	**747.181.203.087,00**	**781.515.474.740,92**	**839.905.079.160,41**	**825.477.416.354,73**	**774.963.603.517,80**	**782.078.916.171,82**
2.1.	**BELANJA OPERASI**	**1,21%**	**491.228.046.180,13**	**524.290.707.569,06**	**505.042.400.707,53**	**510.206.105.741,17**	**515.452.316.904,88**	**521.703.090.000,79**
2.1.1.	Belanja Pegawai	0,87%	326.114.129.837,00	320.748.837.145,79	331.022.147.491,05	334.332.368.965,96	337.675.692.655,62	340.630.354.966,35
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,88%	151.490.286.563,13	189.369.906.121,27	159.860.124.895,74	161.458.726.144,70	163.073.313.406,15	166.130.938.032,51
2.1.3.	Belanja Hibah	1,93%	13.623.629.780,00	13.453.464.302,00	14.160.128.320,74	14.415.010.630,51	14.703.310.843,12	14.986.349.576,85
2.1.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00%	-	718.500.000,00	-	-	-	-
2.2.	**BELANJA MODAL**	**-1,53%**	**121.710.021.301,87**	**127.182.291.239,35**	**195.372.428.167,76**	**173.011.255.322,73**	**114.426.030.216,28**	**112.681.033.255,48**
2.2.1.	Belanja Modal	-1,53%	121.710.021.301,87	127.182.291.239,35	195.372.428.167,76	173.011.255.322,73	114.426.030.216,28	112.681.033.255,48
2.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,00%**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.4.	**BELANJA TRANSFER**	**1,98%**	**133.243.135.605,00**	**128.771.054.142,00**	**138.490.250.285,13**	**141.260.055.290,83**	**144.085.256.396,64**	**146.930.940.210,48**
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	1,98%	133.243.135.605,00	128.771.054.142,00	138.490.250.285,13	141.260.055.290,83	144.085.256.396,64	146.930.940.210,48
3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-8,06%**	**-**	**30.185.073.562,18**	**83.738.674.741,55**	**63.793.842.708,72**	**7.030.998.709,20**	**8.869.657.341,70**
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-7,13%**	**-**	**31.185.073.562,18**	**84.738.674.741,55**	**64.793.842.708,72**	**8.030.998.709,20**	**9.869.657.341,70**
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00%**	**-**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
3.2.1.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

2.2.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2025-2029. Berikut tabel yang menguraikan Kapasitas Rill keuangan daerah untuk mendanai Program prioritas untuk 5 tahun kedapan.

Tabel 2.89
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

No.	Uraian	Proyeksi (Miliar)					
		2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	2030 (Rp)
1	Pendapatan	**747.181,20**	**751.330.40**	**756.166.40**	**761.683.57**	**767.932.60**	**773.210,25**
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan	**0**	**31.185,07**	**84.738,67**	**64.793,84**	**8.030.99**	**9.869,65**
	Total Penerimaan	**747.181.20**	**782.515,47**	**840.905,08**	**826.477,42**	**775.963.60**	**783.079,92**
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	326.114.13	329.375.27	331.022.15	334.332.36	337.675.69	340.630,35
5	Pengeluaran Pembiayaan	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**421.067,07**	**431.456,21**	**433.881,92**	**434.894,06**	**437.286,91**	**441.449,56**

Tabel 2.90
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (2025 s/d 2030) Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Proyeksi (Miliar Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan**	**421.067,07**	**431.456,21**	**433.881,92**	**434.894,06**	**437.286,91**	**441.449,56**
I.1	Prioritas I	210.533,54	215.728,11	216.940,96	217.447,03	218.643,46	220.724,78
I.2	Prioritas II	126.320,12	129.436,86	130.164,58	130.468,22	131.186,07	132.434,87
1.3	Prioritas III	84.213,534	86.291,24	86.776,38	86.978,81	87.457,38	88.289,91

Kebijakan Alokasi Anggaran

Dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah perlu dialokasikan secara proporsional berdasarkan skala prioritas. Dari proyeksi kapasitas keuangan riil di atas. Prioritas I, yang mencakup 50% dari total kapasitas keuangan riil, ditujukan untuk sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program-program prioritas daerah yang mendukung visi dan misi daerah. Peningkatan alokasi pada kategori ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara itu, Prioritas II, yang mendapatkan alokasi 30% dari kapasitas keuangan riil, dapat mencakup belanja yang bersifat pendukung, seperti pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Sementara Prioritas III yang mendapatkan alokasi 20% dari kapasitas keuangan riil digunakan untuk operasional/rutin pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya keseimbangan dalam alokasi prioritas ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat memanfaatkan sumber daya keuangan optimal untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Strategi peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi dalam belanja akan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan fiskal, sekaligus memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Pembiayaan Non Pemerintah

Kebijakan pembiayaan non pemerintah perlu dilakukan untuk menyikapi ruang fiskal yang terbatas, sulit bagi pemerintah untuk membiayai berbagai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan kemiskinan serta kebutuhan pembiayaan pembangunan lainnya, sehingga pembiayaan non-pemerintah menjadi alternatif solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui berbagai skema pembiayaan ini, Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan sektor swasta dan investor, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat, ekonomi daerah semakin tumbuh, dan pelayanan publik semakin berkualitas.

Dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan mencapai target prioritas pembangunan perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, termasuk pinjaman daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pemanfaatan pinjaman daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur strategis dan program pembangunan berkelanjutan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Skema pinjaman daerah dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal, manfaat jangka panjang, serta dampak sosial-ekonomi yang luas bagi masyarakat. Regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, pinjaman daerah harus difokuskan pada pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, serta sektor-sektor prioritas lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Untuk memastikan pinjaman daerah dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memperhatikan kapasitas fiskal dan rasio utang daerah agar tetap dalam batas yang aman. Sebagai bagian dari strategi pembiayaan, pinjaman daerah harus selaras dengan program pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan serta perlu memastikan bahwa pemanfaatan pinjaman mendukung program prioritas seperti penguatan konektivitas wilayah, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pinjaman juga menjadi hal yang penting guna memastikan bahwa dana yang diperoleh memberikan manfaat maksimal dan dapat dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa membebani APBD. Dengan strategi yang tepat dan manajemen risiko yang baik, pinjaman daerah dapat menjadi instrumen pendanaan yang efektif dalam mendukung pembangunan Gunungsitoli yang hebat, maju, dan berkelanjutan.

Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah perlu mengoptimalkan obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan jangka menengah dan panjang guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah. Obligasi daerah harus difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki skema pendapatan berkelanjutan (revenue-generating projects) seperti transportasi publik, pengelolaan air bersih, dan fasilitas

layanan kesehatan dan pendidikan. Penerbitan obligasi harus selaras dengan regulasi yang berlaku, memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk proyek yang berdampak luas bagi masyarakat tanpa membebani keuangan daerah secara langsung.

Dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal, Corporate Social Responsibility (CSR) harus dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan di Kota Gunungsitoli. Peran dunia usaha tidak hanya sebatas kontribusi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam memperkuat infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui skema CSR yang terarah, pemerintah dapat menggandeng perusahaan dalam mendanai program prioritas tanpa membebani APBD, sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan. Agar CSR berjalan optimal, pemerintah perlu membangun ekosistem kolaboratif dengan dunia usaha, menyusun kebijakan insentif yang menarik, serta memastikan transparansi dalam pemanfaatannya. Program CSR harus diarahkan pada proyek yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas layanan dasar, rehabilitasi kawasan rawan bencana, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

2.3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Beberapa permasalahan pokok Kota Gunungsitoli yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kendala dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya jaminan kesehatan masyarakat dengan akar masalah yaitu cakupan kepesertaan jaminan kesehatan daerah yang belum optimal tercermin dari masyarakat yang belum menjadi memiliki kepesertaan penerima manfaat Jamkesda, JKN dan bantuan iuran BPJS kesehatan.
b. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan akar masalah yaitu terbatasnya sarana dan prasrana Puskesmas dan Puskemas Pembantu (Pustu) serta masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesahatan yang layak.
c. Belum optimalnya pemenuhan SDM tenaga kesehatan dengan akar masalah yaitu rendahnya insentif serta kompetensi kader dan tenaga kesehatan.
d. Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita dengan akar masalah yaitu terbatasnya pemberian PMT Lokal bagi Balita Stunting dan Intervensi Pemerintah dalam penyediaan air bersih dan jamban sehat.

2. Belum Optimalnya Layanan Pendidikan

Permasalahan pembangunan SDM yang berkualitas terlihat dari belum meratanya akses masyarakat di bidang pendidikan yang disebabkan oleh :

a. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dasar dan tinggi dengan akar masalah yaitu terbatasnya akses siswa miskin berprestasi mendapatkan akses terhadap satuan pendidikan dasar dan perguruan tinggi.
b. Rendahnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Kompetensi dengan akar masalah yaitu belum tersedianya sekolah unggulan di wilayah Kota Gunungsitoli yang berfokus pada pengembangan prestasi belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter yang didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik serta penyediaan fasilitas sekolah yang memenuhi standar.
c. Belum optimalnya digitaliasi sekolah dengan akar masalah yaitu masih rendahnya satuan pendidikan SD dan SMP yang mendapatkan layanan internet gratis untuk mendukung program digitalisasi sekolah.

d. Masih rendahnya kualitas lulusan perserta didik yang menguasai bahasa asing dan teknologi informasi dengan akar masalah yaitu terbatasnya sarana bimbingan belajar di wilayah Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan akses peserta didik mengakses program beasiswa dari berbagai lembaga.
e. Rapor Pendidikan yang belum tuntas dengan akar masalah yaitu belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang Pendidikan dan pemenuhan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

3. Belum Optimalnya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal

Masih rendahnya produktifitas sektor perekonomian Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penaataan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kota Gunungsitoli dengan akar masalah yaitu belum tersedianya pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional, dalam mendukung Kota Gunungsitoli sebagai pusat perdagangan di Kepulauan Nias.
b. Rendahnya pembiayaan modal dengan bunga rendah kepada pelaku usaha UMKM dengan akar masalah yaitu belum optimalnya program penyertaan modal dari APBD untuk meningkatkan kapasitas UPT Dana bergulir.
c. Belum optimalnya kontribusi lapangan usaha sektor perekonomian terhadap PDRB dengan akar masalah :
   - Laju pertumbuhan sektor perdagangan cenderung mengalami perlambatan;
   - Kontribusi sektor industri dalam PDRB dan laju pertumbuhan sektor cenderung melambat.
   - Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
   - Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah.
   - Pengembangan sektor pariwisata yang belum optimal.

4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini terjadi karena belum optimalnya adopsi teknologi digital serta belum terintegrasinya SPBE. Riset dan inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif. Permasalahan dibidang tata kelola pemerintahan meliputi :

a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan akar masalah yaitu belum optimalnya implementasi penguatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan SDM, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, serta penguatan organisasi.

b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dengan akar masalah yaitu belum terlaksananya program Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai tempat berlangsungnya aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

c. Belum optimalnya penyelenggaraan informasi publik dengan akar masalah adalah implementasi Program SATU DATA KOTA GUNUNGSITOLI berbasis DESA yang belum optimal yang memuat data demografi, data sumber daya alam, data pendidikan, data kemiskinan, data perusahaan dan lain-lain.

5. Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan pembangunan di Kota Gunungsitoli. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan. Permasalah pemenuhan pembangunan infrastrutur untuk 5 (lima) tahun kedepan :

a. Belum optimalnya pengembangan sistem konektivitas jaringan jalan dan jembatan dalam kota menuju daerah yang terisolir dengan akar masalah yaitu masih terbatasnya akses jalan yang menghubungkan seluruh desa dengan kondisi mantap serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan menuju sentra produksi pertanian/perikanan, tempat wisata, pasar/pekan desa.

b. Belum optimalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan akar masalah adalah masih rendahnya pemenuhan Pembangunan SPAM di daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan air bersih.

c. Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh dan utilitas perumahan dengan akar masalah adalah belum meratanya pembangunan rumah tidak layak huni di wilayah Kota Gunungsitoli.
d. Belum terpenuhinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dengan akar masalah adalah masih renahnya pemenuhan ruang terbuka publik, penataan jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum perkotaan.
e. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) dengan akar masalah yaitu masih belum tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang difungsikan sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sehingga beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dikurangi.

2.3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Gunungsitoli mempertimbangkan pada isu global, isu nasional, dan isu-isu pembangunan daerah yang perlu direspon dan menjadi perhatian 5 (lima) tahun kedepan.

1. Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan Kota Gunungsitoli untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Ekonomi Global

Perekonomian dunia saat ini menghadapi beberapa isu yang perlu ditinjau. Prospek pemulihan global di tahun 2024 ini masih cukup suram yang diiringi dengan inflasi, kenaikan suku bunga, dan meningkatnya ketidakpastian untuk pertumbuhan berkelanjutan sehingga memberikan tekanan pada rupiah. Dampak Pandemi COVID-19, perang, krisis iklim dan kondisi makro ekonomi yang berubah sangat cepat menjadi tantangan untuk mencapai tujuan SDGs, bahkan terdapat beberapa isu ekonomi global perlu menjadi perhatian, yaitu: (1) perekonomian dunia menghadapi risiko pertumbuhan di bawah standar yang kemungkinan terjadi secara berkepanjangan karena dampak pandemi, perang, struktur makroekonomi, lemahnya investasi, dan meningkatnya kerentanan utang; (2) inflasi yang masih sangat tinggi di banyak negara berkembang; (3) pasar tenaga kerja di banyak negara maju yang terus menunjukkan ketahanan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan kekurangan pekerja yang berulang akibat penggunaan sistem kerja jarak jauh dan

pengaturan jam kerja yang fleksibel; (4) pengetatan moneter global yang memperburuk kerentanan fiskal dan utang di negara-negara berkembang.

Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Gunungsitoli terutama dalam menghadapi permasalahan inflasi daerah. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat kontribusi sektor lapangan usaha perekonomian termasuk di sektor pertanian, perikanan dan industri kecil menengah.

b. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan dan meningkatkan harga pangan dunia. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020.

c. Geopolitik dan Geoekonomi

Ekonomi global masih berada dalam ketidakpastian dengan akumulasi dari berbagai dampak seperti pasca pandemi Covid-19, konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina dan krisis eskalasi di wilayah Timur Tengah. Dampak tersebut ditunjukkan dari munculnya krisis pangan dunia karena terganggunya rantai pasok global, kenaikan harga energi, hingga meningkatnya tingkat inflasi yang mengarah pada pengetatan kebijakan moneter global. Bank Indonesia memperkirakan bahwa ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, dipengaruhi oleh dampak risiko stabilitas sistem keuangan di negara maju.

d. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan startup. Bangkitnya *e-commerce* yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru. Perkembangan teknologi *blockchain* juga mendisrupsi sistem keuangan yang

mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan daerah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

2. Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan Kota Gunungsitoli lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020 – 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhdan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat terkuasai.

b. Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia

menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara;
2. Peningkatan efisiensi energi;
3. Penegakan penuh morotarium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut;
4. Mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati;
5. Peningkatan produktivitas lahan.

Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting untuk arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli.

c. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

d. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

e. Pemanfaatan Pontesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kinerja pariwisata nasional masih berada di bawah potensinya karena terbatasanya atraksi, aksesiblitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan yang cenderung masih rendah. Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan juga mempengaruhi. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif juga belum optimal karena kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata.

f. Optimaliasasi pemanfataan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SloC) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiata illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

g. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US$ 7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

3. Isu Strategis Provinsi

Isu Provinsi Sumatera Utara yang dipertimbangkan dalam pembangunan Kota Gunungsitoli lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh,

rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

b. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencermikan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah

kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Pola konsumsi tdak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi, serta adanya ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan serta perlu peningkatan dan inovasi pembiayan kesehatan. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non

formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Selanjutnya masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, sementara itu bantuan sosial belum sepenuhnya terintrgrasi dengan pemberdayaan ekonomi hal ini antara lain disebabkan pengguna data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi, daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia).

e. Peningkatan Konektifitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin

struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan merit system; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Isu Strategis Kota Gunungsitoli

Isu-isu daerah yang dipertimbangkan dalam pembangunan Kota Gunungsitoli lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang krusial. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kota Gunungsitoli adalah melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 (71,55 poin) masih berada di bawah capaian provinsi (75,13 poin) dan rata-rata nasional (74,39 poin). Kota Gunungsitoli masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal.

b. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Sektor produktif merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB Kota Gunungsitoli, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah sektor perdagangan dan jasa, konstruksi, serta sektor pertanian. Namun, jika melihat tren bahwa pertumbuhan ketiga sektor fluktuatif dan cenderung melambat pada lima tahun terakhir. Selain itu dari faktor sumber daya manusia utamanya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat dan serapan tenaga kerja diperlukan strategi untuk meningkatkan kapasitas usaha dan inovasi produk. Maka dari itu diperlukan upaya meningkatkan kapasitas SDM yang berorientasi entrepreneur untuk membuka peluang inovasi, pasar baru, dan dalam arti luas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Gunungsitoli memiliki sektor ekonomi potensial berbasis sumber daya lokal yang belum dioptimalkan. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta peternakan belum menunjukkan performa yang baik. Permasalahan ini dipicu oleh kapasitas kelembagaan sektor belum optimal serta operasional dan kualitas produk hasil sektor yang belum berdaya saing. Faktor penting yang

mempengaruhi produktivitas sektor pertanian adalah ketersediaan air untuk irigasi pertanian, alih fungsi lahan pertanian menjadi terbangun, dan minimnya regenerasi petani. Sektor pertanian, kelautan dan perikanan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam arti luas juga berperan untuk ketahanan pangan dan konsumsi pangan yang bergizi.

c. Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah yang Memadai

Isu strategis di bidang infrastruktur perlu mendapat perhatian adalah cakupan layanan air bersih, layanan sanitasi. Kondisi saat ini memperlihatkan 37,04% rumah tangga yang terlayani air bersih dan 34,57% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Gunungsitoli. Kegiatan penunjang seperti melakukan pembangunan pipa dan septik tank untuk sanitasi, dan pengembangan rencana induk sistem penyediaan air minum terus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga seluruh wilayah dapat tercukupi dengan baik.

Masih adanya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Gunungsiti membuat pembangunan permukiman perlu diantisipasi. Jumlah perumahan perlu dihitung dan diproyeksikan pertumbuhannya di masa mendatang sehingga tidak muncul lebih banyak rumah-rumah tidak layak huni di Kota Gunungsitoli. Program rehabilitasi kawasan kumuh menjadi salah satu solusi yang ditawarkan, namun program ini perlu dilaksanakan tepat sasaran karena kawasan kumuh yang direhabilitasi pun dapat menjadi kumuh kembali apabila tidak dikendalikan dan dikelola dengan baik.

Isu permasalahan selanjutnya adalah terbatasnya infrastruktur jalan disebabkan oleh pesatnya peningkatan volume kendaraan dan tidak sesuainya kapasitas jalan yang menyebabkan kemacetan serta masih minimnya akses jalan menuju fasilitas publik. Hal tersebut ditunjukan terbatasnya jaringan jalan dalam kondisi baik terutama menuju kawasan pemukiman masyarakat, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan sentra-sentra produksi pada tahun 2022 sebesar 46,23%. Program rekayasa lalu lintas dan pengembangan akses jaringan jalan menuju fasilitas publik masyarakat menjadi salah satu solusi mengatasi isu permasalah tersebut.

Terjadinya timbunan sampah dikarenakan oleh pengelolaan sampah dengan menggunakan sistem open dumping pada TPA Teluk Belukar dan terbatasnya lokasi tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) serta pemenuhan armada pengangkut sampah merupakan isu penting pengelolaan di bidang persampahan di

Kota Gunungsitoli yang perlu diantisipasi. Selain itu, pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan permbangunan berkelanjutan. Target permbangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional utamanya yang berkaitan dengan penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Gunungsitoli.

d. Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksanya tata kelola pemerintahanyang lebih baik lagi.

Berdasarkan data pada aspek pelayanan umum, Indikator penyusun yang perlu diperhatikan untuk mencapai Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik lagi adalah Indeks Profesionalitas ASN, persentase perangkat daerah yang pengelola arsip secara baku, Indeks SPBE, konsistensi penjabaran dokumen perencanaan, dan persentase tindak lanjut temuan BPK.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli yang telah dilantik dan disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang seterusnya dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran.

3.1 Visi

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penetapan Visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah semua elemen disetiap lini dan aras, untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam mewujudkan harapan dan cita-cita luhur membangun Gunungsitoli yang lebih baik.

Berdasarkan kajian terhadap arah pembangunan jangka panjang daerah 2025 - 2045, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Daerah Kota Gunungsitoli 2025-2029 adalah :

“ GUNUNGSITOLI HEBAT”

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut :

Kota Gunungsitoli	:	Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 47 Tahun 2008.
Hebat	:	Kota Gunungsitoli yang memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif melalui perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, perekonomian daerah yang produktif, pemerintahan yang berintegritas, dan infrastruktur yang terintegrasi sehingga menjadi daerah maju di wilayah Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumatera Utara.

Visi “Gunungsitoli Hebat” merupakan spirit bagi seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli untuk percaya diri bahwa kita bisa sejajar dengan daerah maju

setidaknya sejajar dengan saudara – saudara kita yang berada di pantai Barat Sumatera Utara. Paradigma yang selama ini membelenggu pikiran kita sebagai daerah tertinggal, daerah termiskin, daerah terisolir, sudah saatnya dibuang jauh – jauh, diubah dengan pemikiran positif bahwa kita pasti bisa menjadi daerah maju, menjadi Gunungsitoli Hebat. Gunungsitoli Hebat merupakan perwujudan dari masyarakat Gunungsitoli yang Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban.

3.2 Misi

Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun Misi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya.
2. Membangun ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif.
4. Membangun infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan Misi sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya

Misi ini merupakan upaya dalam membangun sumberdaya manusia yang tangguh serta kesehatan terjamin sehingga menjadi manusia yang produktif, kompetitif sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan. Dalam misi ini sekaligus memberikan perhatian pada jaminan kesehatan masyarakat, kualitas fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, penanganan stunting, beasiswa bagi seluruh jenjang pendidikan sampai perguruan tinggi, pembentukan sekolah unggulan dan digitalisasi sekolah, menyiapkan lulusan SMA/SMK yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perlindungan terhadap perempuan, anak dan disabilitas, terjaganya sikap dan perilaku toleransi, serta terpeliharanya nilai–nilai budaya sebagai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2. Membangun ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi cemerlang yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan produktifitas dan nilai tambah serta meningkatkan kemandirian berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dalam misi ini akan memberikan perhatian pada penataan pusat perdagangan, menciptakan UMKM tangguh dan mandiri, meningkatkan kapasitas kelembagaan Dana Bergulir, membangun kedaulatan pangan serta pengembangan pusat pembenihan bibit pertanian berkualitas.

Misi 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah menghadirkan pelayanan birokrasi berintegritas melalui optimalisasi fungsi birokrasi yang prima sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Dalam misi ini akan memberikan perhatian pada Reformasi birokrasi secara holistik, pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP), serta mempercepat pelaksanaan Satu Data Kota Gunungsitoli.

Misi 4. Membangun infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan

Misi ini merupakan upaya dalam membangun jaringan infrastruktur yang memadai melalui penyediaan sarana dan prasarana berbasis wilayah untuk mendukung kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat. Dalam misi ini akan memberikan perhatian pada konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan sistem penyediaan air bersih, pembangunan rumah tidak layak huni secara adil, penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan, serta pengelolaan persampahan terpadu.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada hakekatnya merupakan arahan pelaksanaan misi daerah, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Gunungsitoli kurun waktu 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan peningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif.
3. Mewujudkan peningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan.

Sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya dengan sasaran :
   a. Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
   b. Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas layanan sosial;
   c. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
   d. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif, dengan sasaran meningkatnya produktivitas perekonomian daerah.
3. Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran:
   a. Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah;
   b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
   c. Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana daerah.

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	**Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya**	**Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya**			**1**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**72,30**	**73,30-73,70**	**73,70-74,10**	**74,10-74,50**	**74,50-74,90**	**75,10-75,40**	**75,40 - 75,90**	**75,40-75,90**
			1.1	Meningkatnya derajat Kesehatan dan daya saing sumber daya manusia	1.1.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,77	75,05	75,32	75,60	75,88	76,16	**76,16**
					1.1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,76	8,77	8,80	8,85	8,90	8,95	9,00	**9,00**
					1.1.3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,81	13,82	13,84	13,85	13,86	13,87	**13,87**
			1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas layanan sosial	1.2.1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,37	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28	0,27	**0,27**
					1.2.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	87,75	88,25	88,75	89,25	89,75	90,25	90,75	**90,75**
			1.3	Meningkatnya kualitas ketenteraman	1.3.1	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	**91,00**

No.	Misi	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
				dan ketertiban umum serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal	1.3.2	Indeks Budaya Lokal	Persentase	68,85	69,52	70,18	70,85	71,52	72,18	72,85	**72,85**
			1.4	Meningkatnya Kemandirian Desa	1.4.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,647	0,657	0,667	0,677	0,687	0,697	0,707	0,71
2	**Membangun ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif**	**Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing kompetitif**			**2**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persentase**	**3,69**	**3,9-4,3**	**4,3-4,7**	**4,7-5,1**	**5,1-5,5**	**5,5-5,9**	**5,9-6,3**	**5,9-6,3**
					3	**Persentase penduduk miskin**	**Persentase**	**14,72**	**14,00-13,50**	**13,50-13,00**	**13,00-12,50**	**12,50-12,00**	**12,00-11,50**	**11,50-10,00**	**11,50-10,00**
					4	**Indeks Gini**	**Indeks**	**0,277**	**0,277-0,275**	**0,275-0,273**	**0,273-0,271**	**0,271-0,268**	**0,268-0,265**	**0,265-0,262**	**0,265-0,262**
					5	**Tingkat Inflasi**	**Persentase**	**3,10**	**2,90±1**	**2,70±1**	**2,50±1**	**2,30±1**	**2,10±1**	**1,90±1**	**1,90±1**
					6	**PDRB Per Kapita**	**Rp. Juta**	**48,46**	**49-51**	**51-53**	**53-55**	**55-57**	**57-59**	**59-60**	**59-60**

No.	Misi	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			2.1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	2.1.1	PDRB atas dasar harga berlaku	Rp. Juta	7.321,91	8.620,66	9.482,73	10.431,00	11.474,10	12.621,51	13.883,66	**13.883,66**
					2.1.3	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,30	3,30-3,25	3,25-3,0	3,0-2,75	2,75-2,50	2,50-2,25	2,25-2,0	**2,25-2,0**
					2.1.4	Pengeluaran Perkapita/ Tahun	Rp. Juta	9,056	9,509	9,984	10,483	11,008	11,558	12,136	**12,14**
					2.1.5	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	66,12	66-67	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	**71-72**
3	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif**	**Mewujudkan peningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif**			**7**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**B**	**B**	**B**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**
			3.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3.1.1	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	**BB**
					3.1.2	Indeks SPBE	Indeks	2,23	2,23-2,25	2,25-2,27	2,27-2,29	2,29-2,31	2,31-2,33	2,33-2,35	**2,33-2,35**
					3.1.3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,14	2,28	2,35	2,42	2,49	2,56	2,59	**2,59**

No.	Misi	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.2.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,99	3,05	3,11	3,16	3,22	3,28	3,30	**3,30**
4	**Membangun infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan**	**Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan**			**8**	**Tingkat pembangunan infrastruktur**	**Persentase**	**64,63**	**64,66**	**65,56**	**66,64**	**67,72**	**68,79**	**69,69**	**69,69**
					9	**Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**Persentase**	*****	**25-26**	**26-27**	**27-28**	**28-29**	**29-30**	**30-31**	**30-31**
			4.1	Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah	4.1.1	Persentase jalan kondisi Mantap	Persentase	58,87	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	**65,00**
					4.1.2	Persentase Penduduk yang mengakses sanitasi layak	Persentase	42,48	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	**54,00**
					4.1.3	Persentase Penduduk yang mengakses air Bersih (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	42,83	42,91	43,21	44,51	45,81	47,11	48,41	**48,41**
			4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,37	78,7	78,87	79,04	79,21	79,38	79,55	79,55

No.	Misi	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
			4.3	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana daerah	4.3.1	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	199.01	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Gunungsitoli mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kota Gunungsitoli. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapain sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya			
	1.1	Meningkatnya derajat Kesehatan dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu meliputi peralatan medis, obat – obat, dan prasarana gedung
				Perbaikan manajemen pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
				Pemenuhan tenaga Kesehatan
				Pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah Kota Gunungsitoli
				BLUD Puskesmas
				Pemberian/peningkatan insentif kader kesehatan desa dan tenaga kesehatan sukarela
				Peningkatan kompetensi kader Kesehatan desa dan tenaga kesehatan sukarela
			Penanganan stunting secara terpadu	Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan
				Pemberian makanan bergizi
				Pemantauan status kesehatan balita
				Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)
			Peningkatan kualitas pendidikan	Beasiswa cerdas bagi murid SD dan SMP
				Beasiswa bagi Mahasiswa S1
				Beasiswa S2 dan S3
				Besiswa dokter spesialis

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
				Pembentukan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP disetiap kecamatan, melalui penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan tenaga guru, peningkatan kompetensi guru, dan pengelolaan proses belajar mengajar yang mampu meningkatkan kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter siswa.
				Penataan kembali SMA Sukma sesuai cita – cita awal sebagai SMA Unggulan, melalui intervensi Pemerintah Kota Gunungsitoli (APBD) dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pembiayaan muatan unggulan yang tidak terdanai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
				Penyediaan fasilitas internet gratis di seluruh SD dan SMP
				Pengadaan Lap Top untuk guru
				Pengelolaan administrasi dan proses belajar mengajar berbasis digital.
				Bimbingan belajar gratis Bahasa inggris (bahasa asing lainnya) dan teknologi informasi bagi lulusan SMA/SMK
	1.2	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas layanan sosial	Perlindungan Sosial	Penyediaan iuran Jaminan Kesehatan dari APBD bagi seluruh masyarakat
				Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif
				Penguatan data dan informasi perlindungan sosial
			Pemberdayaan Perempuan, anak dan disabiltas	Pendirian sekolah PAUD secara masif dengan mengikutsertakan peran pemerintah desa dan lembaga keagamaan, dengan target 1 PAUD disetiap Desa

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
				Penyediaan sarana pendukung Pendidikan PAUD seperti permainan anak dan perlatan edukasi lainnya
				Pelatihan guru PAUD untuk memastikan kompetensi guru PAUD yang dikelola oleh masayarakat/Lembaga memenuhi standart
				Membangun Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan peran dan kapasitas Sekolah Luar Biasa, termasuk intervensi yang diperlukan dari APBD Kota Gunungsitoli, selama tidak tumpang tindih dengan APBD Provinsi Sumatera Utara
				Mengoptimalkan peran Lembaga – Lembaga yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui penyediaan tenaga bantuan hukum (advokasi), konsuler, pendampingan, rumah aman.
				Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga,Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar, dan pengembangan Program Data Gender dan Anak.
	1.3	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Ketahanan budaya	Pelestarian budaya lokal
				Melaksanakan festival budaya
				Pengintegrasian pendidikan multikultural dan toleransi antar umat beragama dalam kurikulum pendidikan
			Peningkatan toleransi antara umat beragama	Melaksanakan dialog antar umat beragama

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal yang produktif dan berdaya saing			
	2.1	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah	Penataan pusat perdagangan	Pembangunan pasar modern
				Revitalisasi pasar tradisional/pasar rakyat
				Pembangunan pasar penyangga untuk mengurangi kepadatan/kemacetan dalam pusat kota
				Pembangunan kawasan pergudangan
			Pelatihan, pendampingan pengelolaan produk, keuangan, strategi pemasaran, legalitas dan inovasi sehingga akan melahirkan para pelaku UMKM/pelaku ekonomi kreatif yang tangguh dan mandiri	Pelatihan dan pendampingan bagi 100 UMKM setiap tahun
				Dukungan promosi dan pemasaran di dalam dan di luar daerah
				Fasilitasi izin dan legalitas produk antaralain label Halal, Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), Izin Edar BPOM
				Bimbingan pemasaran digital (online), melalui website, marketplace, forum online
				Penyediaan fasilitas modal dengan bunga sangat rendah
			Meningkatkan kapasitas UPT Dana Bergulir	Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar Rp 2,5 Miliar – Rp 3 Miliar per tahun secara konsisten, sehingga cakupan UMKM yang mendapatkan layanan pinjaman modal dapat ditingkatkan secara signifkan
				Penyediaan Sarana dan Prasaran BLUD Dana Bergulir
				Penguatan kapasitas dan manajemen SDM BLUD Dana Bergulir
			Peningkatan peran desa dalam kemajuan daerah	Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal
				Mengenali dan memaksimalkan Produk Unggulan Desa

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
				Pembentukan Role Model Pengebangan Desa
				Pengebangan Program Desa Mandiri dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
			Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Pekerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pengembangan Koperasi dan UKM
				Peningkatan Industri Padat Karya Terampil
				Pengembangan Kewirausahaan Bagi Pemuda dan Perempuan
				Mengoptimalkan Peranan BUMD dalam Perkonomian
			Membangun kedaulatan pangan	Pemberdayaan petani, peternak dan nelayan (kelompok tani dan kelompok nelayan) yang dilakukan secara terencana, holistic (menyeluruh) dan berkelanjutan
				Pemberian pendampingan yang intensif oleh Penyuluh Pertanian
				Penataan tatakelola penyediaan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) yang mudah dijangkau dan murah
				Pengembangan sentra produksi dan optimalisasi lahan pertanian
				Pemberian bantuan peralatan pertanian/perikanan seperti hand traktor, power tresher, dryer (mesin pengering), kapal bermotor, alat tangkap ikan, cold storage dll)
				Pembangunan dan rehabilitasi irigasi
				Pembangunan jalan usaha tani
			Membangun Pusat Pembenihan Bibit Pertanian berkualitas	Pembangunan Pusat Pembibitan Ternak Babi
				Pembangunan Pusat Pembibitan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
			Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi kreatif
				Pengembangan pasar produk kreatif
			Pengembangan Pariwisata	Pengembangan destinasi wisata unggulan
				Pengembangan desa wisata berbasis keunggulan lokal
3	Mewujudkan peningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, modern, dan partisipatif			
	3.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Reformasi birokrasi	Melanjutkan reformasi birokrasi secara holistik (Manajemen Perubahan., Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas.. Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
				Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai tempat pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD, serta swasta secara terpadu sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
			Mempercepat pelaksanaan Program SATU DATA KOTA GUNUNGSITOLI berbasis DESA	Komitmen untuk mempercepat pelaksanaan SATU DATA KOTA GUNUNGSITOLI BERBASIS DESA untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan			
	4.1	Meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah	Konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Memastikan pembangunan jalan menuju beberapa desa yang masih terisolir
				Pembangunan jalan dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah
				Peningkatan lebar jalan pada beberapa ruas jalan yang sangat sempit
				Pemeliharaan jalan dan jembatan secara rutin setiap tahun
			Pembangunan Sistim Penyediaan Air Bersih	Membangun sinergi dengan PDAM Tirtanadi untuk memastikan pelayanan air minum di Kota Gunungsitoli terjamin, termasuk penjajakan peluang menjadi pemegang saham (BUMD Bersama)
				Memaksimalkan pengelolaan Unit SPAM yang sudah dibangun dari Lolomoyo yang dikelola oleh UPTD Air Minum, sekaligus pengembangan sumber air baku yang baru

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
				Pembangunan sarana air bersih di daerah pedesaan secara terencana dengan memastikan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola operasional dan pemeliharaan
			Pembangunan rumah tidak layak huni	Alokasi anggaran untuk Pembangunan rumah tidak layak huni melalui program “Rumah Kita” ditingkatkan secara signifikan, yang dilaksanakan secara adi berdasarkan kriteria yang jelas, dengan memprioritaskan pada rumah – rumah berkondisi sangat tidak layak
			Penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan	Lanjutan penataan Taman Ya’ahowu
				Pembangunan jalur pedestrian pada beberapa kawasan dalam kota
				Pembangunan toilet umum pada ruang ruang pubilk dan ruang terbuka hijau
				Pembangunan ruang terbuka hijau/ruang publik baru (penataan lapangan pelita)
				Penambahan dan Pemeliharaan Lampu Jalan
				Penataan dan pemanfaatan sarana perhubungan
	4.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Persampahan Terpadu	Pengelolaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli
			Pengelolaan Persampahan Terpadu	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sehingga tidak seluruh sampah dibawa ke TPA (mengurang beban TPA)
				Penambahan armada pengangkutan sampah termasuk alat – alat berat

Tujuan/Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan
	4.3	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana daerah	Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pendidikan dan kesadaran Bencana
				Pengembangan Sistem Peringatan Dini
				Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bencana

3.5 Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan yang merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Berikut ini pentahapan arah kebijakan tahunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Tahunan
RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029

PENTAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN				
Tahun 2025	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**
Percepatan Implementasi Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi Kesehatan Terjamin, SDM Tangguh, Ekonomi Cemerlang dan Birokrasi Berintegritas, Infrastruktur Mantap	Peningkatan Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi Kesehatan Terjamin, SDM Tangguh, Ekonomi Cemerlang, Birokrasi Berintegritas dan Infrastruktur Mantap	Optimalisasi Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi Kesehatan Terjamin, SDM Tangguh, Ekonomi Cemerlang, Birokrasi Berintegritas dan Infrastruktur Mantap	Penguatan Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi Kesehatan Terjamin, SDM Tangguh, Ekonomi Cemerlang, Birokrasi Berintegritas dan Infrastruktur Mantap	Sinergitas segala bidang serta optimalisasi pembangunan daerah untuk Perwujudan Visi dan Misi Gunungsitoli Hebat

3.6 Program Prioritas Daerah

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkanlah 5 (Lima) program prioritas daerah untuk lima tahun kedepan yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari misi pembangunan. Setiap program prioritas didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur serta sebagai fondasi menuju transformasi jangka Panjang. Berikut program prioritas daerah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Kesehatan Terjamin

Program Kesehatan terjamin merupakan program strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan usia harapan hidup.

Tujuan Program

a. Memastikan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan bantuan iuran jaminan kesehatan dari APBD bagi yang tidak mendapatkan iuran dari APBD Provinsi dan APBN.
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diseluruh fasilitas kesehatan melalui layanan “Puskesmas rasa Rumah Sakit” dan “Pustu rasa Puskesmas” disertai peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
c. Peningkatan insentif kader dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di desa – desa, disertai upaya peningkatan kompetensi.
d. Percepatan penurunan stunting sekaligus menjamin kualitas tumbuh kembang anak dengan pola asuh berkualitas selama 1.000 hari pertama kehidupan

Dampak yang Diharapkan

a. Tersedianya jaminan Kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli secara adil dan merata
b. Tersedianya fasilitas Kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan bagi seluruh Masyarakat Kota Gunungsitoli
c. Meningkatnya kompetensi tenaga Kesehatan
d. Terwujudnya percepatan penurunan stunting secara berkesinambungan

Tabel 3.4
Rencana Aksi Program Prioritas Kesehatan Terjamin

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Pendataan warga tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran JKN melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) - Sosialisasi program bantuan iuran JKN kepada Masyarakat - Pengalihan pembayaran iuran JKN dari APBD	Pengalihan pembayaran iuran JKN dari APBD	Pengalihan pembayaran iuran JKN dari APBD	Pengalihan pembayaran iuran JKN dari APBD	Penyediaan iuran Jaminan Kesehatan dari APBD bagi seluruh masyarakat
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	- Inventarisasi kebutuhan peralatan medis dan obat - Pengadaan peralatan medis dan obat sesuai standar - Rehabilitasi gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu - Pengadaan dan sertifikasi lahan untuk Pembangunan RSUD Pratama	- Inventarisasi kebutuhan peralatan medis dan obat - Pengadaan peralatan medis dan obat sesuai standar - Rehabilitasi gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu - Pembangunan infrastruktur rumah sakit	- Inventarisasi kebutuhan peralatan medis dan obat - Pengadaan peralatan medis dan obat sesuai standar - Rehabilitasi gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu - Pembangunan gedung utama- Instalasi listrik, air, dan sanitasi	- Inventarisasi kebutuhan peralatan medis dan obat - Pengadaan peralatan medis dan obat sesuai standar - Rehabilitasi gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu - Pengadaan peralatan medis dan teknologi- Instalasi peralatan medis- Pelatihan staf	- Inventarisasi kebutuhan peralatan medis dan obat - Pengadaan peralatan medis dan obat sesuai standar - Rehabilitasi gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu - Implementasi layanan kesehatan- Pembukaan rumah sakit- Evaluasi dan monitoring
3	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	- Pelatihan manajemen bagi kepala Puskesmas dan	- Pelatihan manajemen bagi kepala Puskesmas dan	- Pelatihan manajemen bagi	- Pelatihan manajemen bagi	- Pelatihan manajemen bagi

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		tenaga kesehatan - Penerapan sistem manajemen mutu - Monitoring dan evaluasi pelayanan - Pelatihan peningkatan kompetensi	tenaga kesehatan - Penerapan sistem manajemen mut - Monitoring dan evaluasi pelayanan - Pelatihan peningkatan kompetensi	kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan - Penerapan sistem manajemen mutu - Monitoring dan evaluasi pelayanan - Rekrutmen tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) - Pelatihan peningkatan kompetensi	kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan - Penerapan sistem manajemen mutu - Monitoring dan evaluasi pelayanan - Rekrutmen tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) - Pelatihan peningkatan kompetensi	kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan - Penerapan sistem manajemen mutu - Monitoring dan evaluasi pelayanan - Pelatihan peningkatan kompetensi
4	Percepatan penurunan stunting	- Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan - Pemberian makanan bergizi - Pemantauan status kesehatan balita - Pengembangan Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)	- Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan - Pemberian makanan bergizi - Pemantauan status kesehatan balita - Pengembangan Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)	- Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan - Pemberian makanan bergizi - Pemantauan status kesehatan balita - Pengembangan Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)	- Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan - Pemberian makanan bergizi - Pemantauan status kesehatan balita - Pengembangan Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)	- Perbaikan status gizi ibu sejak awal kehamilan - Pemberian makanan bergizi - Pemantauan status kesehatan balita - Pengembangan Sanitasi lingkungan (jamban dan air bersih)

Dukungan terhadap Program Prioritas Kesehatan Terjamin:

- Bantuan pembiayaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN berupa pengadaan obat, alat kesehatan, iuran jaminan Kesehatan dan penyediaan tenaga Kesehatan secara berkesinambungan.
- Penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui program pelatihan dan dukungan CSR (Corporate Social Responsibility).

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Tangguh

Program SDM Tangguh merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan merata, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tujuan Program

a. Pemberian beasiswa berprestasi untuk SD sampai Perguruan Tinggi melalui program “Beasiswa Cerdas”.
b. Merintis pembukaan sekolah unggulan di setiap kecamatan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli. Program ini berfokus pada pengembangan prestasi belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter yang didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan fasilitas sekolah yang memenuhi standart.
c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi bagi seluruh SD dan SMP melalui program “Internet Gratis dan Digitalisasi Sekolah”.
d. Menyiapkan lulusan SMA/SMK bisa menguasai bahasa asing dan teknologi informasi melalui penyediaan jasa “Bimbingan Belajar” yang dibiayai dari APBD, sehingga mereka mudah mengakses program beasiswa dari berbagai Lembaga.
e. Pemenuhan hak anak dan disabilitas serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari seluruh tindak diskriminatif dan kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.

Dampak yang Diharapkan

a. Tersedianya beasiswa berprestasi pada jenjang SD, SMP dan Perguruan Tinggi.

b. Pemerataan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli melalui pembukaan sekolah unggulan di masing-masing kecamatan.
c. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan.
d. Meningkatkan lulusan SMA/SMK di wilayah Kota Gunungsitoli yang berkualitas dalam melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
e. Terpenuhinya hak anak dan disabilitas secara adil dan merata.

Tabel 3.5
Rencana Aksi Program Prioritas SDM Tangguh

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Beasiswa cerdas	- Menyusun kriteria penerima beasiswa jenjang SD dan SMP, dan SMA - Pemberian Beasiswa bagi juara 1 umum tingkat kelas jenjang SD, SMP - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi	- Pemberian bagi juara 1-3 besar tingkat kelas jenjang SD dan SMP - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi	- Pemberian Beasiswa bagi juara kelas 9 tingkat SMP yang melanjut ke sekolah menengah atas - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi	- Pemberian bagi juara 1-5 besar tingkat kelas jenjang SD dan SMP - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi	- Pemberian bagi juara 1-5 besar tingkat kelas jenjang SD dan SMP - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi
2	Pembentukan sekolah unggulan	- Identifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk membentuk sekolah unggulan - mengidentifikasi sekolah yang dijadikan prospek sekolah unggulan pada setiap kecamatan. - Melaksanakan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, sarana prasarana dalam membentuk sekolah unggulan	- Penetapan sekolah unggulan setiap kecamatan - Pemenuhan kebutuhan sekolah unggulan, meliputi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sarana prasarana. - Melakukan seleksi peserta didik yang memenuhi kualifikasi	- Melakukan pengembangan kompetensi guru	- Apresiasi bagi guru dan peserta didik yang mencapai prestasi tertentu	- Peningkatan standarisasi manajemen mutu sekolah dalam berbagai aspek (kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan) - Membangun kerjasama dengan pihak eksternal
3	Fasilitasi Internet Gratis dan Digitalisasi Sekolah	- Pemberian bantuan laptop kepada guru - Pembentukan regulasi pemanfaatan teknologi informasi pada satuan pendidikan - Identifikasi satuan	- Pemberian bantuan laptop kepada guru - Penyediaan infrastruktur pendukung digitalisasi sekolah - pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi	- Pemberian bantuan laptop kepada guru - Penyediaan infrastruktur pendukung digitalisasi sekolah - Pembelajaran	- Pemberian bantuan laptop kepada guru - Pembelajaran berbasis online dengan memanfaatkan platform	- Pemberian bantuan laptop kepada guru - Peningkatan penjagaan keamanan data

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		pendidikan yang terakses internet dan yang belum - Identifikasi kebutuhan spesifik sekolah dalam hal digitalisasi	informasi - integrasi teknologi informasi dalam kurikulum	coding dan AI	pembelajaran digital	
4	Menyiapkan lulusan SMA/SMK bisa menguasai bahasa asing dan teknologi informasi melalui penyediaan jasa bimbingan belajar	- menjalin kerjasama dengan lembaga satuan pendidikan kesetaraan dalam pelaksaaan khusus pelatihan bahasa asing dan teknologi informasi - Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pengajar pada Lembaga penyedia bimbingan belajar	- Pelaksanaan bimbingan belajar khusus Bahasa asing dan teknologi informasi bagi lulusan SMA/SMK - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	- Pelaksanaan bimbingan belajar khusus Bahasa asing dan teknologi informasi bagi lulusan SMA/SMK - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	- Pelaksanaan bimbingan belajar khusus Bahasa asing dan teknologi informasi bagi lulusan SMA/SMK - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	- Pelaksanaan bimbingan belajar khusus Bahasa asing dan teknologi informasi bagi lulusan SMA/SMK - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala

Dukungan terhadap Program Prioritas SDM Tangguh:

- Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Gunungsitoli
- Penyediaan beasiswa afirmatif serta bantuan biaya pendidikan untuk siswa SMA, SMK, MA, dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik dijalankan melalui program peningkatan kompetensi (upskilling) dan penyelarasan kompetensi baru (reskilling) bagi guru
- Penyediaan jalur aksesibilitas fisik, ruang belajar yang adaptif, serta alat bantu pendidikan merupakan bentuk konkret dalam mewujudkan prinsip no one left behind dalam sistem pendidikan daerah di seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri.

3. Ekonomi Cemerlang

Program Ekonomi Cemerlang merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata pusat perdagangan, pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM/ekonomi kreatif yang tangguh dan mandiri, peningkatan kapasitas UPTD Dana Bergulir serta membangun kedaulatan pangan untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli sebagai pusat pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Tujuan Program

a. Penataan pusat perdagangan melalui pembangunan pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional, dalam mendukung kota Gunungsitoli sebagai pusat perdagangan di Kepulauan Nias.
b. UMKM Tangguh dan Mandiri, melalui program pelatihan, pendampingan pengelolaan produk, keuangan, strategi pemasaran, legalitas dan inovasi sehingga akan melahirkan para pelaku UMKM/pelaku ekonomi kreatif yang tangguh dan mandiri.
c. Meningkatkan kapasitas UPT Dana Bergulir melalui penambahan penyertaan modal dari APBD sehingga dapat melayani pembiayaan bagi UMKM dengan bunga yang sangat rendah, serta memfasilitasi akses permodalan dari lembaga jasa keuangan.
d. Membangun kedaulatan pangan dengan kebijakan yang memperkuat petani, nelayan dan peternak untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
e. Membangun Pusat Pembenihan Bibit Pertanian berkualitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan benih/bibit bermutu di Kepulauan Nias dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dampak yang Diharapkan

a. Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dalam menunjang aktivitas perekonomian daerah.
b. Terwujudnya pelaku UMKM/ekonomi kreatif yang mandiri dan tangguh sebagai sokoguru perekonomian daerah.
c. Meningkatnya kapasitas pembiayaan kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha.
d. Terpenuhinya kebutuhan pangan lokal di wilayah Kota Gunungsitoli.
e. Tersedianya kebutuhan bibit yang bermutu di wilayah Kepulauan Nias dan Kota Gunungsitoli secara khusus.

Tabel 3.6
Rencana Aksi Program Prioritas Ekonomi Cemerlang

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Penataan Pusat Perdagangan	- Pembangunan Pasar Modern dhi pembangunan Tahap I Pasar Eks. Gudang Garam, Perencanaan green market pasar Nou - Revitalisasi pasar dhi. pasar beringin eks terminal, pasar soliga, pasar gomo, pasar rakyat Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Alo'oa serta pasar tradisional lainnya.	- Pembangunan Pasar Modern dhi pembangunan Tahap II Pasar Eks. Gudang Garam, lanjutan Perencanaan green market pasar Nou - Lanjutan Revitalisasi pasar dhi. pasar beringin eks terminal, pasar soliga, pasar gomo, pasar rakyat Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Alo'oa serta pasar tradisional lainnya.	- Pembangunan tahap I green market pasar Nou - Lanjutan Revitalisasi pasar dhi. pasar beringin eks terminal, pasar soliga, pasar gomo, pasar rakyat Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Alo'oa serta pasar tradisional lainnya.	- Pembangunan tahap II green market pasar Nou - Lanjutan Revitalisasi pasar dhi. pasar beringin eks terminal, pasar soliga, pasar gomo, pasar rakyat Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Alo'oa serta pasar tradisional lainnya.	- Pembangunan tahap III green market pasar Nou - Lanjutan Revitalisasi pasar dhi. pasar beringin eks terminal, pasar soliga, pasar gomo, pasar rakyat Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Alo'oa serta pasar tradisional lainnya.
2	Pelatihan dan pendampingan para pelaku UMKM/ekonomi kreatif yang Tangguh dan mandiri	- Pengembangan Kapasitas dan keterampilan SDM UMKM melalui pelatihan dan workshop - Pemberdayaan para pengrajin melalui Dekranasda - Pelatihan pemasaran dan promosi produk UMKM - Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif - Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi kreatif - Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi	- Lanjutan pengembangan Kapasitas dan keterampilan SDM UMKM melalui pelatihan dan workshop - Pemberdayaan para pengrajin melalui Dekranasda - Lanjutan Pelatihan pemasaran dan promosi produk UMKM - Lanjutan Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif - Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi	- Lanjutan pengembangan Kapasitas dan keterampilan SDM UMKM melalui pelatihan dan workshop - Pemberdayaan para pengrajin melalui Dekranasda - Lanjutan Pelatihan pemasaran dan promosi produk UMKM - Lanjutan Pelatihan	- Lanjutan pengembangan Kapasitas dan keterampilan SDM UMKM melalui pelatihan dan workshop - Pemberdayaan para pengrajin melalui Dekranasda - Lanjutan Pelatihan pemasaran dan promosi produk UMKM - Lanjutan Pelatihan	- Lanjutan pengembangan Kapasitas dan keterampilan SDM UMKM melalui pelatihan dan workshop - Pemberdayaan para pengrajin melalui Dekranasda - Lanjutan Pelatihan pemasaran dan promosi produk

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan	kreatif - Lanjutan Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	bagi pelaku ekonomi kreatif - Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi kreatif - Lanjutan Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	bagi pelaku ekonomi kreatif - Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi kreatif - Lanjutan Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	UMKM - Lanjutan Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif - Penyediaan fasilitas pendukung ekonomi kreatif - Lanjutan Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
3	Peningkatan kapasitas UPTD Dana Bergulir	- Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar 1 Miliar	- Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar 1 Miliar	- Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar 1 Miliar	- Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar 1 Miliar	- Pengalokasian penyertaan modal kepada BLUD Dana Bergulir sebesar 1 Miliar

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	Membangun kedaulatan pangan	- Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat - Penanganan kerawanan pangan - Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dhi. Benih, bibit, pupuk dan alat mesin pertanian - Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner - Penyuluhan pertanian	- Lanjutan Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat - Lanjutan Penanganan kerawanan pangan - Lanjutan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian - Lanjutan Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner - Penyuluhan pertanian	- Lanjutan Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat - Lanjutan Penanganan kerawanan pangan - Lanjutan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian - Lanjutan Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner - Penyuluhan pertanian	- Lanjutan Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat - Lanjutan Penanganan kerawanan pangan - Lanjutan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian - Lanjutan Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner - Penyuluhan pertanian	- Lanjutan Diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat - Lanjutan Penanganan kerawanan pangan - Lanjutan Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian - Lanjutan Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner - Penyuluhan pertanian
5	Membangun pusat pembenihan bibit pertanian berkualitas	- Peningkatan produksi ternak dan benih/bibit tanaman	- Lanjutan Peningkatan produksi ternak dan benih/bibit tanaman	- Lanjutan Peningkatan produksi ternak dan benih/bibit tanaman	- Lanjutan Peningkatan produksi ternak dan benih/bibit tanaman	- Lanjutan Peningkatan produksi ternak dan benih/bibit tanaman

Dukungan terhadap Program Prioritas Ekonomi Cemerlang:

- Dalam rangka percepatan peningkatan daya saing daerah, maka sangat diharapkan dukungan investor dalam mengembangkan beberapa potensi investasi yang tersedia di wilayah Kota Gunungsitoli antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhotelan, Pembangunan Kawasan kepariwisataan, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan.
- Pengembangan industri pengolahan melalui kegiatan strategis Provinsi Sumatera Utara.
- Penyediaan alsintan, sarana produksi pertanian dan infrastruktur pertanian yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- Penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui program pelatihan, pemasaran dan dukungan CSR (Corporate Social Responsibility).

4. Birokrasi Berintegritas

Program Birokrasi Berintegritas merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pembentukan mal pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program satu data Kota Gunungsitoli.

Tujuan Program

a. Reformasi birokrasi secara holistik melalui penguatan pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan SDM, manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan organisasi dan penguatan tata laksana, yang didukung oleh sistim penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
b. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagai tempat berlangsungnya aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
c. Mempercepat pelaksanaan Program SATU DATA KOTA GUNUNGSITOLI berbasis DESA (data demografi, data sumber daya alam, data pendidikan, data kemiskinan, data perusahaan sebagai basis pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dampak yang Diharapkan

a. Terlaksananya reformasi birokrasi secara holistik
b. Terwujudnya Pembangunan mal pelayanan publik (MPP) dalam memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat
c. Tersedianya sistem Satu Data Kota Gunungsitoli.

Tabel 3.7
Rencana Aksi Program Prioritas Birokrasi Beritegritas

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Reformasi Birokrasi	- Penataan dan penguatan organisasi - Penataan sistem manajamen SDM ASN dan penguatan akuntabilitas - Penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan public - Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	- Lanjutan Penataan dan penguatan organisasi - Lanjutan Penataan sistem manajamen SDM ASN dan penguatan akuntabilitas - Penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik - Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	- Lanjutan Penataan dan penguatan organisasi - Lanjutan Penataan sistem manajamen SDM ASN dan penguatan akuntabilitas - Penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik - Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	- Lanjutan Penataan dan penguatan organisasi - Lanjutan Penataan sistem manajamen SDM ASN dan penguatan akuntabilitas - Penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik - Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan	- Lanjutan Penataan dan penguatan organisasi - Lanjutan Penataan sistem manajamen SDM ASN dan penguatan akuntabilitas - Penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik - Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan
2	Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)	- Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan MPP - Pembangunan Tahap I Mal Pelayanan Publik - Penandatangan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Penempatan Pelayanan dengan Instansi dan	- Pembangunan Tahap II Mal Pelayanan Publik - Pembangunan Sistem Jaringan Layanan - Penyediaan Sarana dan Prasarana - Penyusunan PERWAL tentang Operasionalisai	- Uji Operasionalisasi Penyelenggaraan MPP - Pengajuan Peresmian ke Kemenpan RB - Peresmian Gedung MPP	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP	- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		Lembaga yang ditargetkan dapat bergabung pada MPP Kota Gunungsitoli - Penyusunan Proses Bisnis Pelayanan, Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Penyusunan Tata Laksana Pelayanan	MPP			
3	Penyediaan Satu Data Kota Gunungsitoli	- Penyusunan database Satu Data Kota Gunungsitoli berbasis kecamatan/desa	- Implementasi Satu Data Kota Gunungsitoli untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan daerah	- Implementasi Satu Data Kota Gunungsitoli untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan daerah	- Implementasi Satu Data Kota Gunungsitoli untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan daerah	- Implementasi Satu Data Kota Gunungsitoli untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan daerah

Dukungan terhadap Program Prioritas Birokrasi Berintegritas:

- Penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui program pelatihan dan dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam pengembangan MPP
- Pengembangan assessment ASN yang dilaksanakan oleh BKN dan Menpan-RB
- Kolaborasi dan integrasi Satu Data Kota Gunungsitoli dengan Satu Data Indonesia

5. Infrastruktur Mantap

Program Infrastruktur Mantap merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam mewujudkan konektivitas/peningkatan infrastruktur jalan/jembatan, pembangunan sistem penyediaan air bersih, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan persampahan terpadu, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung penataan Kawasan perkotaan secara berkelanjutan.

Tujuan Program

a. Konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan memastikan terhubungnya seluruh desa dengan jalan yang mantap, infrastruktur jalan menuju sentra produksi pertanian/perikanan, tempat wisata, pasar/pekan desa terkoneksi dengan baik.
b. Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga secara bertahap kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terpenuhi.
c. Melaksanakan pembangunan rumah tidak layak huni secara adil melalui program “Rumah Kita”
d. Penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan meliputi penyediaan ruang terbuka publik, penataan jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum perkotaan.
e. Pengelolaan Persampahan Terpadu, melalui penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang difungsikan sebagai tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Sehingga beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dikurangi.

Dampak yang diharapkan

a. Terbangunnya konektivitas jaringan jalan dan jembatan di wilayah Kota Gunungsitoli dalam mendukung aksesibilitas Masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah.
b. Tersedianya kebutuhan air bersih bagi Masyarakat di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

c. Tertatanya Kawasan perumahan dan permukiman di wilayah Kota Gunungsitoli.
d. Tersedianya ruang terbuka publik/ruang terbuka hijau, jalur pedestrian dan fasilitas umum perkotaan yang representatif pada kawasan perkotaan.
e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahan yang terpadu di wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 3.8
Rencana Aksi Program Prioritas Infrastruktur Mantap

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	- Pembangunan jaringan ruas jalan/jembatan strategis menuju fasilitas publik, sentra produksi Masyarakat dan wilayah terisolir. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan jalan dan jembatan	- Lanjutan pembangunan jaringan ruas jalan/jembatan strategis menuju fasilitas publik, sentra produksi Masyarakat dan wilayah terisolir. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan jalan dan jembatan	- Lanjutan pembangunan jaringan ruas jalan/jembatan strategis menuju fasilitas publik, sentra produksi Masyarakat dan wilayah terisolir. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan jalan dan jembatan	- Lanjutan pembangunan jaringan ruas jalan/jembatan strategis menuju fasilitas publik, sentra produksi Masyarakat dan wilayah terisolir. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan jalan dan jembatan	- Lanjutan pembangunan jaringan ruas jalan/jembatan strategis menuju fasilitas publik, sentra produksi Masyarakat dan wilayah terisolir. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan jalan dan jembatan
2	Pembangunan sistem penyediaan air bersih	- Pengembangan jaringan perpipaan IPA Gamo dan IPA Nou - Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Optimalisasi UPTD Air Bersih Kota Gunungsitoli	- Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan optimalisasi UPTD Air Bersih Kota Gunungsitoli	- Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan optimalisasi UPTD Air Bersih Kota Gunungsitoli	- Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan optimalisasi UPTD Air Bersih Kota Gunungsitoli	- Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan optimalisasi UPTD Air Bersih Kota Gunungsitoli
3	Program Rumah Kita	- Pemutakhiran data base rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Pembangunan rumah tidak layak huni di setiap kecamatan	- Pemutakhiran data base rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan pembangunan rumah tidak layak huni di setiap kecamatan	- Pemutakhiran data base rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan pembangunan rumah tidak layak	- Pemutakhiran data base rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan pembangunan rumah tidak layak	- Pemutakhiran data base rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan pembangunan

No	Program Prioritas	Rencana Aksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
				huni di setiap kecamatan	huni di setiap kecamatan	rumah tidak layak huni di setiap kecamatan
4	Penataan Kawasan Perkotaan secara berkelanjutan	- Penataan jalur pedestrian pada pusat Kawasan perkotaan - Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pembangunan ruang terbuka publik di wilayah kecamatan	- Lanjutan penataan jalur pedestrian pada pusat Kawasan perkotaan - Lanjutan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pembangunan ruang terbuka publik di wilayah kecamatan	- Lanjutan penataan jalur pedestrian pada pusat Kawasan perkotaan - Lanjutan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pembangunan ruang terbuka publik di wilayah kecamatan	- Lanjutan penataan jalur pedestrian pada pusat Kawasan perkotaan - Lanjutan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pembangunan ruang terbuka publik di wilayah kecamatan	- Lanjutan penataan jalur pedestrian pada pusat Kawasan perkotaan - Lanjutan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pembangunan ruang terbuka publik di wilayah kecamatan
5	Pengelolaan Persampahan terpadu	- Perencanaan pembangunan TPST di wilayah Kota Gunungsitoli - Peningkatan sarana dan prasarana persampahan - Peningkatan pengelolaan persampahan di TPA Kota Gunungsitoli	- Penyediaan lahan TPST di wilayah Kota Gunungsitoli - Peningkatan sarana dan prasarana persampahan - Peningkatan pengelolaan persampahan di TPA Kota Gunungsitoli	- Pembangunan TPST di wilayah Kota Gunungsitoli - Lanjutan Peningkatan sarana dan prasarana persampahan - Optimalisasi pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli	- Pengolahan persampahan di TPST Kota Gunungsitoli - Lanjutan Peningkatan sarana dan prasarana persampahan - Optimalisasi pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli	- Lanjutan Peningkatan sarana dan prasarana persampahan - Optimalisasi pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli

Dukungan terhadap Program Prioritas Infrastruktur Mantap:

- Dukungan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pusat pertumbuhan perkotaan dan kawasan afirmasi melalui penyediaan layanan infrastruktur dasar (air baku, air minum, sanitasi), infrastruktur strategis yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli antara lain Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, jaringan jalan nasional.
- Dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan/peningkatan jaringan jalan Provinsi, dan penanganan Kawasan kumuh perkotaan.
- Penguatan kemitraan dengan dunia usaha melalui dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) serta instansi vertikal dalam upaya penyediaan kebutuhan energi.

Tabel 3.9
Matriks penyelarasan arah pembangunan RPJMD Kota Gunung Sitoli dengan sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2025-2029	Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah Per Provinsi)	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi	Strategi dan Arah Kebijakan			
1	Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7)	Program INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi) merupakan langkah prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terhubung, tangguh, dan ramah lingkungan. Program ini mencakup peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, kawasan perumahan dan permukiman,	Penataan kawasan perkotaan secara berkelanjutan	Sudah Sesuai		
2	Pengembangan Pelabuhan Gunungsitoli		Penataan dan pemanfaatan sarana perhubungan	Sudah Sesuai		
3	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Gunungsitoli, antara lain melalui:					

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2025-2029	Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah Per Provinsi)	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi	Strategi dan Arah Kebijakan			
-	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	khususnya di kawasan pertumbuhan ekonomi, wilayah pertanian dan energi, serta daerah afirmasi dan rawan bencana.	Percepatan Revisi RTRW Kota Gunungsitoli dan Pemetaan Potensi Permasalahan Pembangunan Kota secara Terpadu	Sudah Sesuai		
-	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau		Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air bersih di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	Sudah Sesuai		
-	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan		Pelaksanaan Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui Kerjasama Pelatihan Vokasi dan Produktifitas dengan Kementerian Ketenagakerjaan	Sudah Sesuai		
-	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan		Penetapan SK Kawasan Kumuh Kota Gunungsitoli dalam	Sudah Sesuai		
4	Pengembangan SPAM Perkotaan Gunungsitoli		Membangun sinergi dengan PDAM Tirtanadi untuk memastikan pelayanan air minum di Kota Gunungsitoli terjamin, termasuk penjajakan peluang menjadi pemegang saham (BUMD Bersama)	Sudah Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kota Gunungsitoli tahun 2025-2029	Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah Per Provinsi)	Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi	Strategi dan Arah Kebijakan			
5	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Gunungsitoli (PHTC)		Alokasi anggaran untuk Pembangunan rumah tidak layak huni melalui program "Rumah Kita" ditingkatkan secara signifikan, yang dilaksanakan secara adi berdasarkan kriteria yang jelas, dengan memprioritaskan pada rumah – rumah berkondisi sangat tidak layak	Sudah Sesuai		
6	Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)		Fasilitasi Pemberian makanan bergizi pada jenjang penidikan SD dan SMP	Sudah Sesuai		

Tabel 3.10
Dukungan Program Daerah terhadap 6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	PHTC	Program Daerah	
1	Program Unggulan Bersekolah Gratis	Pembentukan sekolah unggulan	Sudah Selaras
2	Program Berobat Gratis	Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Sudah Selaras
3	Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan	Membangun kedaulatan pangan	Sudah Selaras
4	Digitalisasi Pelayanan Publik "CERDAS"	Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Sudah Selaras
5	Infrastruktur Strategis Terintegrasi	Penataan Kawasan Perkotaan secara berkelanjutan	Sudah Selaras
6	Perlindungan Rakyat melalui Restrorative Justice	Reformasi Birokrasi	Sudah Selaras

Tabel 3.11

Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	PHTC	Program Daerah	
1	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal	Pembentukan sekolah unggulan	Sudah Selaras
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi	Pemberdayaan Perempuan, anak dan disabiltas	Sudah Selaras
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Sudah Selaras
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sudah Selaras
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah	Penataan Pusat Perdagangan	Sudah Selaras
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru	Membangun pusat pembenihan bibit pertanian berkualitas	Sudah Selaras
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal	Membangun kedaulatan pangan	Sudah Selaras
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal)	Pengembangan Pariwisata	Sudah Selaras
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Sudah Selaras
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi	Sudah Selaras

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	PHTC	Program Daerah	
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat	Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Sudah Selaras
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	Konektivitas dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Sudah Selaras
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing	Penataan dan pemanfaatan sarana perhubungan	Sudah Selaras
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana	Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sudah Selaras
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa	Sudah Selaras
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun	Ketahanan budaya	Sudah Selaras
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib	Pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif	Sudah Selaras

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Pencapaian visi misi daerah dilakukan melalui pelaksanaan program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Gunungsitoli. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta yang dijabarkan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah, Indikator Dan Pagu Indikatif
Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					235.890.375.493,000		240.207.688.699,000		241.404.810.217,000		242.780.817.635,000		244.511.805.308,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					167.122.161.743,000		170.181.016.637,000		170.999.994.126,000		171.974.694.093,000		173.174.635.839,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	167.122.161.743,000	100	170.181.016.637,000	100	170.999.994.126,000	100	171.974.694.093,000	100	173.174.635.839,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					68.768.213.750,000		70.026.672.062,000		70.404.816.091,000		70.806.123.542,000		71.337.169.469,000	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase penerima beasiswa jenjang Pendidikan Dasar (%)	0	2,00	3,00	68.768.213.750,000	5,00	70.026.672.062,000	7,00	70.404.816.091,000	9,00	70.806.123.542,000	10,00	71.337.169.469,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase sekolah unggulan jenjang pendidikan dasar (%)	0	1,42	1,42		2,84		2,84		4,26		4,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase guru penerima fasilitas pembelajaran jenjang Sekolah Dasar (%)	0	10,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase penerapan digitalisasi sekolah jenjang pendidikan dasar (%)	0	10,00	12,25		14,5		16,75		19,00		21,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Lembaga Non Formal penyedia pelatihan bahasa asing dan teknologi informasi (%)	0	7,69	15,38		30,77		38,46		46,15		53,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					95.109.525.321,000		96.850.029.636,000		97.238.577.540,000		97.252.837.433,000		98.526.283.744,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					44.665.334.641,000		45.482.710.265,000		45.675.316.900,000		45.395.666.207,000		46.280.183.703,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	44.665.334.641,000	100	45.482.710.265,000	100	45.675.316.900,000	100	45.395.666.207,000	100	46.280.183.703,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					45.071.354.031,000		45.896.159.810,000		46.062.556.819,000		46.325.113.393,000		46.672.551.774,000	
Meingkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	72,35	100	100	45.071.354.031,000	100	45.896.159.810,000	100	46.062.556.819,000	100	46.325.113.393,000	100	46.672.551.774,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	76,60	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	79,03	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	97,05	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	97,78	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	97,42	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	98,91	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	67,14	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	99,51	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	89,57	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	103,57	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	90,67	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)		10	9		8		7		6		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		50	49		48		47		46		46		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Insidensi Tuberkulosis (Kasus)	2,36	4,83	4,11		3,39		2,66		1,94		0,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)		9,20	8,40		8,00		7,60		7,20		7,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase)	5,80	5,40	5,00		4,60		4,20		3,80		3,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	64,98	90	93		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. ((%))		50	45		40		35		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)		65	68		70		73		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.570.267.562,000		4.653.903.459,000		4.679.034.537,000		4.705.705.034,000		4.740.997.822,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100	4.570.267.562,000	100	4.653.903.459,000	100	4.679.034.537,000	100	4.705.705.034,000	100	4.740.997.822,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)		80	84		86		88		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					409.855.000,000		417.355.347,000		419.609.065,000		422.000.837,000		425.165.843,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase)		100	100	409.855.000,000	100	417.355.347,000	100	419.609.065,000	100	422.000.837,000	100	425.165.843,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi (Persentase)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	49,26	50	51		52		53		54		55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					392.714.087,000		399.900.755,000		402.060.219,000		404.351.962,000		407.384.602,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	53,72	55	56	392.714.087,000	58	399.900.755,000	60	402.060.219,000	62	404.351.962,000	62	407.384.602,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)		30	28		26		24		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					145.085.843.874,200		150.194.485.945,200		153.722.828.130,200		156.389.653.160,200		162.973.762.783,200	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.913.137.958,200		13.176.673.640,200		10.844.946.605,200		10.844.946.605,200		10.844.946.605,200	

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	0	100	100	11.294.417.974,000	100	7.023.300.000,000	100	7.811.854.713,000	100	7.911.572.965,000	100	7.911.572.965,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum					3.500.000.000,000		6.034.653.656,000		2.914.371.908,000		2.814.653.656,000		2.814.653.656,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum					118.719.984,200		118.719.984,200		118.719.984,200		118.719.984,200		118.719.984,200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.777.350.000,000		12.893.075.000,000		14.094.800.000,000		19.210.675.000,000		28.600.550.000,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Tingkat pengelolaan sumber daya air (%)	45,90	47,90	49,90	5.777.350.000,000	51,90	12.893.075.000,000	53,90	14.094.800.000,000	55,90	19.210.675.000,000	57,90	28.600.550.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.481.280.016,000		3.259.716.005,000		2.494.716.005,000		3.737.716.005,000		2.087.716.005,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Tingkat Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (%)	42,83	58,26	58,56	1.481.280.016,000	59,10	3.259.716.005,000	59,65	2.494.716.005,000	60,20	3.737.716.005,000	60,74	2.087.716.005,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

														Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.400.000.000,000		500.000.000,000		5.500.000.000,000		0,000		1.190.000.000,000	
Meningkatnya layanan persampahan	Tingkat Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional ()	0	8,08	8,08	3.400.000.000,000	8,08	500.000.000,000	22,37	5.500.000.000,000	22,37	0,000	22,37	1.190.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.625.000.000,000		1.625.000.000,000		1.625.000.000,000		4.625.000.000,000		2.225.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Tingkat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (%)	42,48	44,00	46,00	1.625.000.000,000	48,00	1.625.000.000,000	50,00	1.625.000.000,000	52,00	4.625.000.000,000	54,00	2.225.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.350.000.000,000		1.374.705.000,000		1.382.128.407,000		1.390.006.539,000		1.400.431.588,000	
Meningkatnya kualitas sistem Drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	73,00	73,40	73,80	1.350.000.000,000	74,20	1.374.705.000,000	74,60	1.382.128.407,000	75,00	1.390.006.539,000	75,40	1.400.431.588,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					6.226.000.000,000		6.980.928.400,000		7.000.438.213,000		5.831.143.111,000		5.858.541.685,000	

Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	TIngkat Penataan Bangunan Gedung (%)	63,16	64,56	65,82	2.678.000.000,000	67,09	3.368.000.000,000	68,35	3.368.000.000,000	69,62	2.178.000.000,000	70,89	2.178.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	57,14	60,20	63,27	3.548.000.000,000	65,66	3.612.928.400,000	68,69	3.632.438.213,000	71,72	3.653.143.111,000	74,75	3.680.541.685,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.320.500.000,000		2.320.500.000,000		2.320.500.000,000		2.320.500.000,000		2.320.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Tingkat Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	66,65	67,10	67,70	2.320.500.000,000	68,30	2.320.500.000,000	68,90	2.320.500.000,000	69,50	2.320.500.000,000	70,10	2.320.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					105.642.575.900,000		104.563.887.900,000		105.530.298.900,000		106.579.665.900,000		107.546.076.900,000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	58,87	60,00	61,00	105.642.575.900,000	62,00	104.563.887.900,000	63,00	105.530.298.900,000	64,00	106.579.665.900,000	65,00	107.546.076.900,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					350.000.000,000		950.000.000,000		480.000.000,000		450.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Tingkat Pengembangan Jasa Konstruksi (%)	0,00	25,00	30,00	350.000.000,000	35,00	950.000.000,000	40,00	480.000.000,000	45,00	450.000.000,000	50,00	450.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.000.000.000,000		2.550.000.000,000		2.450.000.000,000		1.400.000.000,000		450.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (%)	77,41	78,13	81,25	2.000.000.000,000	84,38	2.550.000.000,000	87,50	2.450.000.000,000	87,50	1.400.000.000,000	87,50	450.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					5.435.379.000,000		5.534.846.436,000		5.564.734.606,000		5.596.453.594,000		5.638.426.995,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.034.879.000,000		3.090.417.286,000		3.107.105.539,000		3.124.816.041,000		3.148.252.161,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	3.034.879.000,000	100	3.090.417.286,000	100	3.107.105.539,000	100	3.124.816.041,000	100	3.148.252.161,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					94.500.000,000		96.229.350,000		96.748.988,000		97.300.458,000		98.030.211,000	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi warga negara korban bencana dan yangterkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	94.500.000,000	100	96.229.350,000	100	96.748.988,000	100	97.300.458,000	100	98.030.211,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.106.000.000,000		1.126.239.800,000		1.132.321.495,000		1.138.775.727,000		1.147.316.545,000	
Terpenuhinya hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	83,69	83,97	84,25	1.106.000.000,000	84,55	1.126.239.800,000	84,84	1.132.321.495,000	85,13	1.138.775.727,000	85,42	1.147.316.545,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.200.000.000,000		1.221.960.000,000		1.228.558.584,000		1.235.561.368,000		1.244.828.078,000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	49,62	51,62	53,62	1.200.000.000,000	55,62	1.221.960.000,000	57,62	1.228.558.584,000	59,62	1.235.561.368,000	61,62	1.244.828.078,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.817.116.672,000		9.994.569.297,000		10.054.885.792,000		10.118.284.450,000		10.193.946.333,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.364.532.067,000		6.481.003.004,000		6.516.000.421,000		6.553.141.623,000		6.602.290.185,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					2.881.407.472,000		2.934.137.229,000		2.949.981.570,000		2.966.796.465,000		2.989.047.438,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					3.483.124.595,000		3.546.865.775,000		3.566.018.851,000		3.586.345.158,000		3.613.242.747,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.297.140.520,000		2.339.178.192,000		2.351.809.754,000		2.365.215.069,000		2.382.954.182,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada					2.297.140.520,000		2.339.178.192,000		2.351.809.754,000		2.365.215.069,000		2.382.954.182,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					488.744.085,000		497.688.101,000		500.375.617,000		503.227.758,000		507.001.966,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	89,90	100	100	488.744.085,000	100	497.688.101,000	100	500.375.617,000	100	503.227.758,000	100	507.001.966,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					666.700.000,000		676.700.000,000		686.700.000,000		696.700.000,000		701.700.000,000	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					666.700.000,000		676.700.000,000		686.700.000,000		696.700.000,000		701.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.844.802.150,000		4.608.353.109,000		4.621.713.874,000		4.968.327.873,000		4.985.042.772,000	

1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.647.864.850,000		3.389.511.856,000		3.396.290.879,000		3.735.919.967,000		3.743.391.807,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	2.647.864.850,000	100	3.389.511.856,000	100	3.396.290.879,000	100	3.735.919.967,000	100	3.743.391.807,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					460.324.860,000		468.748.805,000		471.280.048,000		473.966.345,000		477.521.092,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di Luar Panti (Persentase)	100	100	100	460.324.860,000	100	468.748.805,000	100	471.280.048,000	100	473.966.345,000	100	477.521.092,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					581.548.280,000		592.190.614,000		595.388.443,000		598.782.157,000		603.273.023,000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di Luar Panti (%)	100	100	100	581.548.280,000	100	592.190.614,000	100	595.388.443,000	100	598.782.157,000	100	603.273.023,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					84.326.160,000		85.869.329,000		86.333.023,000		86.825.121,000		87.476.310,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di Luar Panti (%)	100	100	100	84.326.160,000	100	85.869.329,000	100	86.333.023,000	100	86.825.121,000	100	87.476.310,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					70.738.000,000		72.032.505,000		72.421.481,000		72.834.283,000		73.380.540,000	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Layanan Sosial Yang Tertangani (%)	100	100	100	70.738.000,000	100	72.032.505,000	100	72.421.481,000	100	72.834.283,000	100	73.380.540,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					442.712.092,000		482.631.040,000		488.050.248,000		494.083.848,000		554.676.977,000	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					50.000.000,000		0,000		0,000		0,000		60.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	50.000.000,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	60.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					250.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	0	100	250.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	100	300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					66.476.169,000		105.000.000,000		110.000.000,000		115.000.000,000		115.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	0	100	100	66.476.169,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	115.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					76.235.923,000		77.631.040,000		78.050.248,000		79.083.848,000		79.676.977,000	

Meningkatnya pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	0	100	100	76.235.923,000	100	77.631.040,000	100	78.050.248,000	100	79.083.848,000	100	79.676.977,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.913.155.000,000		1.102.664.000,000		1.128.324.000,000		1.156.984.000,000		1.261.644.000,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					184.736.000,000		213.690.000,000		257.350.000,000		296.010.000,000		336.670.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran parempuan dalam pembangunan	Persentase ARG (%)	1,2	2,0	2,2	184.736.000,000	2,4	213.690.000,000	2,6	257.350.000,000	2,8	296.010.000,000	3,0	336.670.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,53	71,65	71,80		71,95		72,10		72,25		72,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					191.862.000,000		249.362.000,000		210.362.000,000		215.362.000,000		259.362.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	191.862.000,000	100	249.362.000,000	100	210.362.000,000	100	215.362.000,000	100	259.362.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					0,000		9.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	175	0,000	175	9.000.000,000	175	10.000.000,000	216	10.000.000,000	216	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					22.999.000,000		23.000.000,000		23.000.000,000		23.000.000,000		23.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	0	0	100	22.999.000,000	100	23.000.000,000	100	23.000.000,000	100	23.000.000,000	100	23.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					69.945.000,000		77.945.000,000		82.945.000,000		77.945.000,000		82.945.000,000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	55,30	55,35	55,40	69.945.000,000	55,45	77.945.000,000	55,50	82.945.000,000	55,55	77.945.000,000	55,60	82.945.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.443.613.000,000		529.667.000,000		544.667.000,000		534.667.000,000		549.667.000,000	

Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	2.443.613.000,000	100	529.667.000,000	100	544.667.000,000	100	534.667.000,000	100	549.667.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	50,00	50,50	51,00		51,50		52,00		52,50		53,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.020.702.029,590		10.923.474.585,290		10.224.550.129,590		10.145.890.833,290		10.298.129.178,590	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.806.544.027,190		8.851.432.698,890		8.977.508.243,190		8.973.848.946,890		9.126.087.292,190	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	8.806.544.027,190	100	8.851.432.698,890	100	8.977.508.243,190	100	8.973.848.946,890	100	9.126.087.292,190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0,000		900.000.000,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan					0,000		900.000.000,000		0,000		0,000		0,000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					209.116.116,000		1.112.000.000,000		1.187.000.000,000		1.112.000.000,000		1.112.000.000,000	

Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	50,78	60	70	209.116.116,000	80	1.112.000.000,000	90	1.187.000.000,000	100	1.112.000.000,000	100	1.112.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					5.041.886,400		30.041.886,400		30.041.886,400		30.041.886,400		30.041.886,400	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	0	0	0	5.041.886,400	100	30.041.886,400	100	30.041.886,400	100	30.041.886,400	100	30.041.886,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					0,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan					0,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					300.000.000,000		1.000.000.000,000		0,000		1.000.000.000,000		0,000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					300.000.000,000		1.000.000.000,000		0,000		1.000.000.000,000		0,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	0	100	100	300.000.000,000	100	1.000.000.000,000	0	0,000	100	1.000.000.000,000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					9.060.110.813,000		10.855.093.223,000		10.391.258.284,000		11.551.969.543,000		10.325.378.944,000	

2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.231.833.850,000		6.750.240.530,000		6.211.555.932,000		6.196.555.932,000		6.136.555.932,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	5.231.833.850,000	100	6.750.240.530,000	100	6.211.555.932,000	100	6.196.555.932,000	100	6.136.555.932,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					0,000		0,000		50.000.000,000		200.000.000,000		0,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	100	50.000.000,000	0	200.000.000,000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					234.397.598,000		334.397.598,000		334.397.598,000		1.334.397.598,000		334.397.598,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	49,83	83,33	83,53	234.397.598,000	83,73	334.397.598,000	83,93	334.397.598,000	84,13	1.334.397.598,000	84,33	334.397.598,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95,86	84,14	84,34		84,54		84,74		84,94		85,14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					546.086.849,000		556.080.238,000		559.083.071,000		562.269.845,000		566.486.869,000	

Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati	Persentase RTH (Persentase)	0,20	0,20	0,20	546.086.849,000	0,20	556.080.238,000	0,20	559.083.071,000	0,20	562.269.845,000	0,20	566.486.869,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					57.415.936,000		57.415.936,000		57.415.936,000		57.415.936,000		57.415.936,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	23	25	27	57.415.936,000	29	57.415.936,000	31	57.415.936,000	33	57.415.936,000	35	57.415.936,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					13.500.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	4,95	13.500.000,000	9,90	90.000.000,000	14,85	90.000.000,000	19,80	90.000.000,000	24,75	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,000		18.880.000,000		22.440.000,000		25.680.000,000		30.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	0,000	100	18.880.000,000	100	22.440.000,000	100	25.680.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,000		27.000.000,000		29.000.000,000		31.000.000,000		33.000.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	10.000.000,000	100	27.000.000,000	100	29.000.000,000	100	31.000.000,000	100	33.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.961.876.580,000		3.016.078.921,000		3.032.365.747,000		3.049.650.232,000		3.072.522.609,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	30,60	30,65	30,70	2.961.876.580,000	30,75	3.016.078.921,000	30,80	3.032.365.747,000	30,85	3.049.650.232,000	30,90	3.072.522.609,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.385.112.069,000		4.731.177.785,000		4.858.740.245,000		4.939.746.404,000		5.159.678.653,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.674.779.756,000		3.742.028.226,000		3.762.235.178,000		3.783.679.919,000		3.812.057.518,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100,00	100,00	100,00	3.674.779.756,000	100,00	3.742.028.226,000	100,00	3.762.235.178,000	100,00	3.783.679.919,000	100,00	3.812.057.518,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					362.519.257,000		369.153.359,000		371.146.788,000		373.262.324,000		376.061.792,000	
Meningkatnya kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,29	6	7	362.519.257,000	8	369.153.359,000	9	371.146.788,000	10	373.262.324,000	11	376.061.792,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	61,75	65	68		71		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					100.789.856,000		261.500.000,000		295.400.000,000		322.540.000,000		351.044.000,000	

Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	100.789.856,000	100	261.500.000,000	100	295.400.000,000	100	322.540.000,000	100	351.044.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,41	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					235.733.600,000		347.000.000,000		418.400.000,000		448.640.000,000		608.804.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	235.733.600,000	100	347.000.000,000	100	418.400.000,000	100	448.640.000,000	100	608.804.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					11.289.600,000		11.496.200,000		11.558.279,000		11.624.161,000		11.711.343,000	

Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	100	100	100	11.289.600,000	100	11.496.200,000	100	11.558.279,000	100	11.624.161,000	100	11.711.343,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.138.534.704,000		8.285.639.888,000		8.329.842.345,000		8.376.752.446,000		8.438.828.088,000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.472.511.113,000		3.536.058.066,000		3.555.152.780,000		3.575.417.151,000		3.602.232.779,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					3.472.511.113,000		3.536.058.066,000		3.555.152.780,000		3.575.417.151,000		3.602.232.779,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.942.070.951,000		4.014.210.849,000		4.035.887.588,000		4.058.892.147,000		4.089.333.838,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					3.942.070.951,000		4.014.210.849,000		4.035.887.588,000		4.058.892.147,000		4.089.333.838,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					623.952.640,000		635.370.973,000		638.801.977,000		642.443.148,000		647.261.471,000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	623.952.640,000	100	635.370.973,000	100	638.801.977,000	100	642.443.148,000	100	647.261.471,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.853.319.000,000		11.944.013.000,000		10.577.513.000,000		10.682.013.000,000		10.954.613.000,000	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.798.981.000,000		7.294.600.000,000		5.928.100.000,000		6.032.600.000,000		6.185.200.000,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	4.798.981.000,000	100	7.294.600.000,000	100	5.928.100.000,000	100	6.032.600.000,000	100	6.185.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					281.059.000,000		263.832.000,000		263.832.000,000		263.832.000,000		263.832.000,000	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,58	2,55	2,55	281.059.000,000	2,54	263.832.000,000	2,53	263.832.000,000	2,52	263.832.000,000	2,51	263.832.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	8,80	7.9-0	7.2-0		7.1-0		7.0-0		6.98-0		6.96-0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	59,80	60	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.480.768.000,000		3.260.930.000,000		3.260.930.000,000		3.260.930.000,000		3.260.930.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	53,5	54	55	2.480.768.000,000	56	3.260.930.000,000	57	3.260.930.000,000	58	3.260.930.000,000	59	3.260.930.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,2	10	10		9		8		7		6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.292.511.000,000		1.124.651.000,000		1.124.651.000,000		1.124.651.000,000		1.244.651.000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	41,6	42	43	1.292.511.000,000	44	1.124.651.000,000	45	1.124.651.000,000	46	1.124.651.000,000	47,2	1.244.651.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					12.615.341.063,000		11.909.798.440,000		11.974.111.351,000		12.042.363.786,000		12.132.681.514,000	

2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.688.365.673,000		10.883.962.765,000		10.942.736.164,000		11.005.109.760,000		11.087.648.083,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					10.688.365.673,000		10.883.962.765,000		10.942.736.164,000		11.005.109.760,000		11.087.648.083,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.926.975.390,000		1.025.835.675,000		1.031.375.187,000		1.037.254.026,000		1.045.033.431,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					1.926.975.390,000		1.025.835.675,000		1.031.375.187,000		1.037.254.026,000		1.045.033.431,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.924.887.856,000		6.610.765.342,000		6.898.130.576,000		7.350.132.333,000		8.040.234.267,000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.256.387.856,000		3.571.265.342,000		3.917.630.576,000		4.298.632.333,000		4.717.734.267,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	3.256.387.856,000	100	3.571.265.342,000	100	3.917.630.576,000	100	4.298.632.333,000	100	4.717.734.267,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					323.500.000,000		344.500.000,000		365.500.000,000		386.500.000,000		407.500.000,000	

Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	0	10,00	20,00	323.500.000,000	40,00	344.500.000,000	60,00	365.500.000,000	80,00	386.500.000,000	100,00	407.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.345.000.000,000		2.695.000.000,000		2.615.000.000,000		2.665.000.000,000		2.915.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase OPD menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah (%)	70,00	70,00	75,00	2.345.000.000,000	80,00	2.695.000.000,000	85,00	2.615.000.000,000	90,00	2.665.000.000,000	100,00	2.915.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	70,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.054.182.861,000		4.148.799.478,000		4.169.717.926,000		4.216.917.817,000		4.246.294.700,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.494.806.016,000		3.558.760.966,000		3.577.978.276,000		3.598.372.752,000		3.625.360.547,000	
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.494.806.016,000		3.558.760.966,000		3.577.978.276,000		3.598.372.752,000		3.625.360.547,000	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					40.000.000,000		40.732.000,000		40.951.953,000		41.185.379,000		41.494.269,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi					40.000.000,000		40.732.000,000		40.951.953,000		41.185.379,000		41.494.269,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	0	44,69	150.000.000,000	49,12	150.000.000,000	53,54	150.000.000,000	57,96	150.000.000,000	57,96	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					100.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi					100.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					39.199.855,000		39.917.213,000		40.132.766,000		40.361.522,000		40.664.234,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri					39.199.855,000		39.917.213,000		40.132.766,000		40.361.522,000		40.664.234,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					230.176.990,000		234.389.299,000		235.654.931,000		236.998.164,000		238.775.650,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM/Koperasi yang menerima akses permodalan (%)	0	0	80	230.176.990,000	85	234.389.299,000	90	235.654.931,000	95	236.998.164,000	100	238.775.650,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.236.020.368,000		5.704.120.368,000		6.558.747.648,000		5.368.747.648,000		4.409.700.000,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.788.020.368,000		5.251.120.368,000		5.760.747.648,000		4.915.747.648,000		4.051.700.000,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	3.788.020.368,000	100	5.251.120.368,000	100	5.760.747.648,000	100	4.915.747.648,000	100	4.051.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					110.000.000,000		110.000.000,000		350.000.000,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Capaian Target Realisasi Penanaman Modal (%)	0	0	100	110.000.000,000	100	110.000.000,000	100	350.000.000,000	100	0,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0,000		0,000		100.000.000,000		100.000.000,000		0,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	100	100	0,000	100	0,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					238.000.000,000		238.000.000,000		238.000.000,000		238.000.000,000		238.000.000,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (%)	0	100	100	238.000.000,000	100	238.000.000,000	100	238.000.000,000	100	238.000.000,000	100	238.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					55.000.000,000		60.000.000,000		65.000.000,000		70.000.000,000		75.000.000,000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Capaian Pemenuhan Kewajiban Perizinan Berusaha (%)	0	28,35	38,44	55.000.000,000	48,25	60.000.000,000	57,87	65.000.000,000	67,37	70.000.000,000	76,82	75.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					45.000.000,000		45.000.000,000		45.000.000,000		45.000.000,000		45.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Penyediaan data dan Informasi pelayanan urusan penanaman modal (%)	0	100	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.897.562.323,000		1.950.789.160,000		2.004.213.658,000		2.058.745.260,000		2.113.310.850,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					597.562.323,000		600.789.160,000		604.213.658,000		608.745.260,000		613.310.850,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	0	0	0	597.562.323,000	0	600.789.160,000	0	604.213.658,000	0	608.745.260,000	0	613.310.850,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (Persentase)	0	3,14	3,14		19,00		0,08		0,08		0,08		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir (Persentase)	0	5,0	5,0		6,0		7,0		8,0		9,0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.100.000.000,000		1.150.000.000,000		1.200.000.000,000		1.250.000.000,000		1.300.000.000,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah atlit berprestasi (Orang)	30	30	40	1.100.000.000,000	50	1.150.000.000,000	60	1.200.000.000,000	70	1.250.000.000,000	80	1.300.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah pembinaan organisasi kepramukaan (Organisasi)	1	1	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	1	200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					22.500.000,000		30.000.000,000		37.500.000,000		45.000.000,000		52.500.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					22.500.000,000		30.000.000,000		37.500.000,000		45.000.000,000		52.500.000,000	

Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)	Persentase kegiatan statsitik sektoral yang memenuhi standar (%)	10,00	10,00	20,00	22.500.000,000	40,00	30.000.000,000	60,00	37.500.000,000	80,00	45.000.000,000	100,00	52.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000		10.000.000,000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase OPD menggunakan Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah (%)	5,00	5,00	20,00	10.000.000,000	40,00	10.000.000,000	60,00	10.000.000,000	80,00	10.000.000,000	100,00	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					305.000.000,000		355.000.000,000		400.000.000,000		445.000.000,000		490.000.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					150.000.000,000		170.000.000,000		180.000.000,000		190.000.000,000		200.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudavaan	Jumlah event kebudayaan daerah (Event)	3	3	4	150.000.000,000	4	170.000.000,000	4	180.000.000,000	5	190.000.000,000	5	200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					105.000.000,000		110.000.000,000		120.000.000,000		130.000.000,000		140.000.000,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	37	37	38	105.000.000,000	39	110.000.000,000	40	120.000.000,000	41	130.000.000,000	43	140.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					50.000.000,000		75.000.000,000		100.000.000,000		125.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah museum yang dibina (Museum)	1	1	1	50.000.000,000	1	75.000.000,000	1	100.000.000,000	1	125.000.000,000	1	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.048.103.537,000		4.249.292.223,000		4.455.290.343,000		4.725.832.378,000		4.952.945.306,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.923.773.723,000		4.119.962.409,000		4.325.960.529,000		4.542.258.555,000		4.769.371.483,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	3.923.773.723,000	100	4.119.962.409,000	100	4.325.960.529,000	100	4.542.258.555,000	100	4.769.371.483,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					124.329.814,000		124.329.814,000		124.329.814,000		178.573.823,000		178.573.823,000	
Meningkatnya Layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	45,87	50,87	55,87	124.329.814,000	60,87	124.329.814,000	65,87	124.329.814,000	70,87	178.573.823,000	75,87	178.573.823,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					0,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000		5.000.000,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	0	0,000	10	5.000.000,000	10	5.000.000,000	10	5.000.000,000	10	5.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					168.000.000,000		453.840.000,000		506.009.200,000		523.414.246,000		620.881.317,000	

2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					168.000.000,000		453.840.000,000		461.009.200,000		468.189.246,000		475.380.192,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	48,73	48,73	48,83	168.000.000,000	48,93	453.840.000,000	49,53	461.009.200,000	50,63	468.189.246,000	51,23	475.380.192,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0,000		0,000		45.000.000,000		45.225.000,000		135.451.125,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	45.000.000,000	0	45.225.000,000	10	135.451.125,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					0,000		0,000		0,000		10.000.000,000		10.050.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	10.000.000,000	0	10.050.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.231.598.987,000		2.272.437.249,000		2.284.708.409,000		2.297.731.247,000		2.314.964.232,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.836.598.987,000		1.939.437.249,000		1.956.708.409,000		1.969.731.247,000		1.981.964.232,000	

Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.150	7.293	7.439	1.836.598.987,000	7.588	1.939.437.249,000	7.739	1.956.708.409,000	7.894	1.969.731.247,000	8.052	1.981.964.232,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					395.000.000,000		333.000.000,000		328.000.000,000		328.000.000,000		333.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	73,52	74,00	75,50	395.000.000,000	77,00	333.000.000,000	78,50	328.000.000,000	79,30	328.000.000,000	80,10	333.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.037.104.877,000		5.803.196.243,000		8.029.354.462,000		6.055.887.120,000		6.282.431.273,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.550.000.000,000		3.600.000.000,000		3.600.000.000,000		3.600.000.000,000		3.600.000.000,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	3.550.000.000,000	100	3.600.000.000,000	100	3.600.000.000,000	100	3.600.000.000,000	100	3.600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.300.000.000,000		1.400.000.000,000		1.500.000.000,000		1.600.000.000,000		1.700.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan menjadi destinasi wisata daerah (Destinasi)	4	4	4	1.300.000.000,000	5	1.400.000.000,000	5	1.500.000.000,000	5	1.600.000.000,000	6	1.700.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					202.104.877,000		203.196.243,000		204.354.462,000		205.887.120,000		207.431.273,000	

Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah penyelenggaraan event/promosi pariwisata (Event)	1	1	3	202.104.877,000	3	203.196.243,000	3	204.354.462,000	3	205.887.120,000	3	207.431.273,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					785.000.000,000		300.000.000,000		2.325.000.000,000		150.000.000,000		175.000.000,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual (%)	0	0	6	785.000.000,000	7	300.000.000,000	7	2.325.000.000,000	7	150.000.000,000	7	175.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					200.000.000,000		300.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000		600.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif					200.000.000,000		300.000.000,000		400.000.000,000		500.000.000,000		600.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					7.402.134.728,250		7.689.460.901,000		7.798.614.540,000		7.863.533.331,000		7.935.538.234,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					51.278.014,250		54.000.000,000		57.500.000,000		60.500.000,000		63.500.000,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					51.278.014,250		54.000.000,000		57.500.000,000		60.500.000,000		63.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.594.843.660,000		3.810.712.808,000		3.895.712.808,000		3.935.712.808,000		3.975.712.808,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas Tanaman Padi (Persentase)	5,37	5,4	5,45	3.594.843.660,000	5,5	3.810.712.808,000	5,55	3.895.712.808,000	5,6	3.935.712.808,000	6,5	3.975.712.808,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Populasi Tanaman Hortikultura Tahunan (Ha)	51	60	70		80		90		100		110		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi Tanaman Hortikultura Semusim (Ton)	545,22	599,74	659,72		725,69		798,26		878,08		965,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	2.614	2.697,33	2.780,67		2.864		2.947,33		3.030,67		3.114		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	775.524	800.000	820.000		850.000		880.000		910.000		940.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	775.524	814.300	855.015		897.765		942.654		989.786		1.039.276		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.837.845.353,000		1.871.477.923,000		1.881.583.904,000		1.892.308.932,000		1.906.501.249,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan (%)	100	100	100	1.837.845.353,000	100	1.871.477.923,000	100	1.881.583.904,000	100	1.892.308.932,000	100	1.906.501.249,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					179.536.436,000		182.821.953,000		183.809.191,000		184.856.904,000		186.243.330,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	179.536.436,000	1	182.821.953,000	1	183.809.191,000	1	184.856.904,000	1	186.243.330,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					419.479.220,000		427.155.690,000		429.462.330,000		431.910.266,000		435.149.593,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	419.479.220,000	100	427.155.690,000	100	429.462.330,000	100	431.910.266,000	100	435.149.593,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.319.152.045,000		1.343.292.527,000		1.350.546.307,000		1.358.244.421,000		1.368.431.254,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh nertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut dan Madya (%)	11	12	13	1.319.152.045,000	14	1.343.292.527,000	15	1.350.546.307,000	16	1.358.244.421,000	17	1.368.431.254,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.218.865.106,000		5.371.435.406,000		5.484.235.406,000		5.617.235.406,000		5.728.235.406,000	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.153.455.406,000		4.179.435.406,000		4.213.235.406,000		4.262.235.406,000		4.314.235.406,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	4.153.455.406,000	100	4.179.435.406,000	100	4.213.235.406,000	100	4.262.235.406,000	100	4.314.235.406,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA					715.409.700,000		795.000.000,000		825.000.000,000		860.000.000,000		890.000.000,000	

DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang vang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	45,83	50,00	54,17	715.409.700,000	58,33	795.000.000,000	62,50	825.000.000,000	66,67	860.000.000,000	70,83	890.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					130.000.000,000		142.000.000,000		156.000.000,000		170.000.000,000		184.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	41,67	50,00	58,33	130.000.000,000	66,67	142.000.000,000	75,00	156.000.000,000	83,33	170.000.000,000	91,67	184.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					220.000.000,000		255.000.000,000		290.000.000,000		325.000.000,000		340.000.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutuproduk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	29,59	30,57	31,56	220.000.000,000	32,54	255.000.000,000	33,53	290.000.000,000	34,52	325.000.000,000	35,50	340.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					93.128.864,000		420.689.123,000		422.960.844,000		425.371.721,000		428.562.009,000	

3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					43.128.864,000		370.689.123,000		372.960.844,000		375.371.721,000		378.562.009,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Bina Kelompok IKM (%)	100	100	100	43.128.864,000	100	370.689.123,000	100	372.960.844,000	100	375.371.721,000	100	378.562.009,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini (%)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					33.698.481.890,000		34.315.709.689,000		34.841.888.841,000		37.246.206.690,000		35.962.997.081,000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.937.400.000,000		28.449.200.000,000		28.961.700.000,000		31.314.398.173,000		29.986.700.000,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	27.937.400.000,000	100	28.449.200.000,000	100	28.961.700.000,000	100	31.314.398.173,000	100	29.986.700.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.174.319.949,000		5.269.010.004,000		5.279.462.658,000		5.327.658.195,000		5.367.615.632,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakvat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	5.174.319.949,000	100	5.269.010.004,000	100	5.279.462.658,000	100	5.327.658.195,000	100	5.367.615.632,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					586.761.941,000		597.499.685,000		600.726.183,000		604.150.322,000		608.681.449,000	
BIDANG URUSAN /	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH**

PROGRAM / OUTCOME				2026		2027		2028		2029		2030		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	586.761.941,000	100	597.499.685,000	100	600.726.183,000	100	604.150.322,000	100	608.681.449,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					29.428.247.058,000		29.587.159.592,000		29.755.806.402,000		29.978.974.950,000		30.203.817.261,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.691.673.141,000		20.803.408.176,000		20.921.987.603,000		21.078.902.510,000		21.236.994.278,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	92,00	92,00	92,00	20.691.673.141,000	92,00	20.803.408.176,000	92,00	20.921.987.603,000	92,00	21.078.902.510,000	92,00	21.236.994.278,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					8.736.573.917,000		8.783.751.416,000		8.833.818.799,000		8.900.072.440,000		8.966.822.983,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	92,00	92,00	92,00	8.736.573.917,000	92,00	8.783.751.416,000	92,00	8.833.818.799,000	92,00	8.900.072.440,000	92,00	8.966.822.983,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.210.671.165,000		5.735.901.858,000		6.179.246.457,000		6.548.780.649,000		7.149.486.786,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.923.677.621,000		5.028.397.947,000		5.471.742.546,000		5.841.276.738,000		6.260.853.016,000	

Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100,00	100,00	100,00	4.923.677.621,000	100,00	5.028.397.947,000	100,00	5.471.742.546,000	100,00	5.841.276.738,000	100,00	6.260.853.016,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					552.338.036,000		463.059.603,000		463.059.603,000		463.059.603,000		644.189.462,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	94,19	94,66	95,13	552.338.036,000	95,61	463.059.603,000	96,09	463.059.603,000	96,57	463.059.603,000	97,05	644.189.462,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					734.655.508,000		244.444.308,000		244.444.308,000		244.444.308,000		244.444.308,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (%)	90,00	91,00	92,00	734.655.508,000	93,00	244.444.308,000	94,00	244.444.308,000	95,00	244.444.308,000	95,00	244.444.308,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					153.693.617.109,000		156.311.137.232,000		158.600.007.489,000		163.374.913.712,000		171.009.961.622,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.341.364.901,000		22.263.882.355,000		23.851.718.976,000		27.308.009.276,000		32.823.785.741,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	91	92	93	14.814.800.076,000	94	16.258.361.788,000	95	17.079.348.325,000	97	18.827.703.114,000	98	18.827.703.114,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	0	0	98	5.526.564.825,000	98	6.005.520.567,000	99	6.772.370.651,000	99	8.480.306.162,000	100	13.996.082.627,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					131.897.647.084,000		132.360.966.527,000		132.768.768.571,000		133.711.847.513,000		135.389.312.580,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	1	1	1	1.278.592.942,000	1	1.301.104.801,000	1	1.314.115.849,000	1	1.320.686.429,000	1	1.320.686.429,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah (%)	100	100	100	450.000.000,000	100	562.500.000,000	100	565.312.500,000	100	706.640.625,000	100	706.640.625,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketersediaan Dokumen / Laporan Keuangan Daerah (%)	100	100	100	398.000.000,000	100	486.411.022,000	100	488.356.666,000	100	537.192.333,000	100	537.192.333,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Belanja Darurat dan Mendesak, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Belanja Transfer					129.771.054.142,000		130.010.950.704,000		130.400.983.556,000		131.147.328.126,000		132.824.793.193,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					776.624.043,000		815.455.245,000		856.228.008,000		899.039.408,000		899.039.408,000	
Meningkatnya tata kelola barang milik daerah	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Mengelola BMD dengan Baik (%)	100	100	100	776.624.043,000	100	815.455.245,000	100	856.228.008,000	100	899.039.408,000	100	899.039.408,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					677.981.081,000		870.833.105,000		1.123.291.934,000		1.456.017.515,000		1.897.823.893,000	

Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan					677.981.081,000		870.833.105,000		1.123.291.934,000		1.456.017.515,000		1.897.823.893,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					3.757.562.785,000		3.773.477.175,000		3.790.366.405,000		3.812.715.748,000		3.835.232.711,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.947.108.785,000		2.963.023.175,000		2.979.912.405,000		3.002.261.748,000		3.024.778.711,000	
Meningkatnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	2.947.108.785,000	100	2.963.023.175,000	100	2.979.912.405,000	100	3.002.261.748,000	100	3.024.778.711,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					810.454.000,000		810.454.000,000		810.454.000,000		810.454.000,000		810.454.000,000	
Meningkatnya pengembangan kompetensi tenaga ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	13,88	13,91	13,92	810.454.000,000	13,93	810.454.000,000	13,94	810.454.000,000	13,95	810.454.000,000	13,96	810.454.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	99,37	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					644.138.996,000		647.617.347,000		651.308.766,000		656.193.581,000		661.115.033,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					644.138.996,000		647.617.347,000		651.308.766,000		656.193.581,000		661.115.033,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	0	10	11	644.138.996,000	12	647.617.347,000	13	651.308.766,000	13,50	656.193.581,000	13,60	661.115.033,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					609.294.922,000		471.843.935,000		495.436.131,000		520.207.938,000		546.218.335,000	

5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					124.042.278,000		130.244.392,000		136.756.611,000		143.594.442,000		150.774.164,000	
meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah (%)	100,00	100,00	100,00	124.042.278,000	100,00	130.244.392,000	100,00	136.756.611,000	100,00	143.594.442,000	100,00	150.774.164,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					485.252.644,000		341.599.543,000		358.679.520,000		376.613.496,000		395.444.171,000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	**INDIKATOR OUTCOME**	**BASELINE 2024**	**2025**	**TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN**										**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
				2026		**2027**		**2028**		**2029**		**2030**		
				TARGET	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	**TARGET**	**PAGU**	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya jumlah Riset/Kajian yang dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan daerah	Persentase riset/kajian yang dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan daerah (%)	0,00	100,00	100,00	359.916.442,000	100,00	209.996.531,000	100,00	220.496.357,000	100,00	231.521.175,000	100,00	243.097.234,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah (%)	100,00	100,00	100,00	125.336.202,000	100,00	131.603.012,000	100,00	138.183.163,000	100,00	145.092.321,000	100,00	152.346.937,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					5.898.873.318,000		6.006.822.699,000		6.039.259.542,000		6.073.683.321,000		6.119.235.946,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.958.876.409,000		5.049.623.847,000		5.076.891.816,000		5.105.830.099,000		5.144.123.825,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	4.958.876.409,000	100	5.049.623.847,000	100	5.076.891.816,000	100	5.105.830.099,000	100	5.144.123.825,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat

														Daerah
	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (%)	30,26	31,58	36,84		39,47		42,11		46,05		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					716.261.358,000		729.368.940,000		733.307.533,000		737.487.386,000		743.018.541,000	
Meningkatnya kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern secara efektif, independen dan profesional	Persentase capaian kapabilitas APIP sesuai target level (%)	100	100	100	716.261.358,000	100	729.368.940,000	100	733.307.533,000	100	737.487.386,000	100	743.018.541,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	82	82,5	83		83,5		84		84,5		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi (%)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					223.735.551,000		227.829.912,000		229.060.193,000		230.365.836,000		232.093.580,000	
Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase capaian maturitas SPIP di Pemerintah Daerah sesuai target level (%)	100	100	100	223.735.551,000	100	227.829.912,000	100	229.060.193,000	100	230.365.836,000	100	232.093.580,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase PD yang telah mendapatkan asistensi, verifikasi atau pembinaan SPIP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					19.062.899.450,000		19.410.176.854,000		19.523.014.951,000		19.637.850.118,000		19.756.987.208,000	

7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.116.955.799,000		18.390.460.975,000		18.480.219.676,000		18.590.170.321,000		18.703.201.064,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					6.381.092.843,000		6.497.866.842,000		6.532.955.323,000		6.570.193.168,000		6.618.469.617,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	2.592.163.880,000	100	2.571.426.016,000	100	2.576.426.016,000	100	2.586.426.016,000	100	2.591.426.016,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					2.087.683.044,000		2.136.026.990,000		2.146.897.450,000		2.168.433.786,000		2.173.699.698,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	2,99	3,05	3,11	1.813.985.622,000	3,16	1.847.181.559,000	3,22	1.857.156.339,000	3,28	1.867.742.131,000	3,30	1.881.750.197,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	64,63	64,67	64,69		64,70		64,74		64,77		64,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	2.621.015.205,000	100	2.668.979.784,000	100	2.683.392.274,000	100	2.698.687.610,000	100	2.718.927.768,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	100	100	2.621.015.205,000	100	2.668.979.784,000	100	2.683.392.274,000	100	2.698.687.610,000	100	2.718.927.768,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.689.182,000		3.756.694,000		3.776.981,000		3.798.509,000		3.826.997,000	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					2.798.862,000		2.850.081,000		2.865.472,000		2.881.805,000		2.903.418,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (%)	65	70	75	890.320,000	80	906.613,000	85	911.509,000	90	916.704,000	90	923.579,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					505.554.616,000		514.807.165,000		517.586.219,000		520.536.461,000		524.440.484,000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					504.000.000,000		513.223.200,000		515.994.605,000		518.935.775,000		522.827.793,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	64,63	64,67	64,69	1.554.616,000	64,70	1.583.965,000	64,74	1.591.614,000	64,77	1.600.686,000	64,79	1.612.691,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					150.910.929,000		170.889.898,000		190.093.939,000		190.864.763,000		191.527.499,000	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan	100	100	100	31.040.000,000	100	52.500.000,000	100	52.500.000,000	100	52.500.000,000	100	52.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

	umum (%)													
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	34.049.440,000	100	30.997.875,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	64,67	64,69	12.113.497,000	64,70	12.335.174,000	64,74	12.401.784,000	64,77	12.472.474,000	64,79	12.566.017,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	34.049.440,000	100	34.672.545,000	100	34.589.776,000	100	35.058.477,000	100	35.321.416,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	10.327.580,000	100	10.516.575,000	100	10.573.364,000	100	10.633.632,000	100	10.713.385,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					29.330.972,000		29.867.729,000		30.029.015,000		30.200.180,000		30.426.681,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					285.788.924,000		330.262.122,000		331.338.136,000		332.480.064,000		333.991.164,000	
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					88.097.408,000		89.709.591,000		90.194.022,000		90.708.128,000		91.388.439,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	63.662.840,000	100	86.000.000,000	100	86.000.000,000	100	86.000.000,000	100	86.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	26.444.928,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	100	45.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					50.560.124,000		51.485.374,000		51.763.395,000		52.058.447,000		52.448.885,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	26.544.904,000	100	27.030.676,000	100	27.176.641,000	100	27.331.548,000	100	27.536.535,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100	100	100	30.478.720,000	100	31.036.481,000	100	31.204.078,000	100	31.381.941,000	100	31.617.305,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					5.068.713.204,000		5.161.470.656,000		5.189.342.597,000		5.217.921.848,000		5.258.163.764,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.844.240.512,000		2.896.290.113,000		2.911.930.080,000		2.928.528.081,000		2.950.592.042,000	
Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum					2.844.240.512,000		2.896.290.113,000		2.911.930.080,000		2.928.528.081,000		2.950.592.042,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					740.640.204,000		754.193.920,000		758.266.567,000		762.588.686,000		768.308.101,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan					740.640.204,000		754.193.920,000		758.266.567,000		762.588.686,000		768.308.101,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					777.690.636,000		791.922.375,000		796.198.755,000		800.737.088,000		806.742.617,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	9	9	9	777.690.636,000	9	791.922.375,000	9	796.198.755,000	9	800.737.088,000	9	806.742.617,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					190.000.000,000		193.477.000,000		194.521.776,000		195.630.550,000		197.097.779,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	50	55	60	190.000.000,000	65	193.477.000,000	70	194.521.776,000	75	195.630.550,000	80	197.097.779,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					85.034.496,000		86.590.627,000		87.058.217,000		87.554.448,000		88.211.107,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat					85.034.496,000		86.590.627,000		87.058.217,000		87.554.448,000		88.211.107,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					431.107.356,000		438.996.621,000		441.367.202,000		442.882.995,000		447.212.118,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan					431.107.356,000		438.996.621,000		441.367.202,000		442.882.995,000		447.212.118,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					850.633.618.685,040		875.115.607.613,490		884.705.100.354,790		897.567.175.067,490		914.083.711.630,790	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang pada akhir masa rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja makro menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Gunungsitoli, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain itu, indikator kinerja daerah juga akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, yang telah mempertimbangkan RPJPD tahun 2025-2045 serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,30	73,30-73,70	73,70-74,10	74,10-74,50	74,50-74,90	75,10-75,40	75,40-75,90	**75,40-75,90**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,69	3,9-4,3	4,3-4,7	4,7-5,1	5,1-5,5	5,5-5,9	5,9-6,3	**5,9-6,3**
3	Persentase penduduk miskin	Persentase	14,72	14,00-13,50	13,50-13,00	13,00-12,50	12,50-12,00	12,00-11,50	11,50-10,00	**11,50-10,00**
4	Indeks Gini	Indeks	0,31	0,277-0,275	0,275-0,273	0,273-0,271	0,271-0,268	0,268-0,265	0,265-0,262	**0,265-0,262**
5	Tingkat Inflasi	Persentase	3,10	2,90±1	2,70±1	2,50±1	2,30±1	2,10±1	1,90±1	1,90±1
6	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	48,46	49-51	51-53	53-55	55-57	57-59	59-60	**59-60**
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
8	Tingkat pembangunan infrastruktur	Persentase	64,63	64,66	65,56	66,64	67,72	68,79	69,69	69,69
9	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase	*	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	**30-31**

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Kota Gunungsitoli pada awal tahun perencanaan tahun 2024 sebesar 72,30 dan diproyeksikan peningkatan target IPM Kota Gunungsitoli pada tahun 2030 sebesar 75,40 – 75,90. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS yaitu rendah jika IPM < 60, sedang 60 ≤ IPM <70, tinggi 70 ≤ IPM < 80, dan ≥ 80 sangat tinggi. Kondisi pencapaian IPM Kota Gunungsitoli pada awal tahun kinerja sebesar 72,30 adalah klasifikasi tinggi dan diproyeksikan pada tahun 2030 dengan klasifikasi tinggi.

Komponen IPM yang relatif mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pergerakan komponen lain, seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, relatif lebih lambat kenaikannya, sesuai dengan metode perhitungan dari BPS. Pengeluaran per kapita per tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional, bahkan internasional.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungstioli ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 3,69%, yang terus menigkat secara berkala sebagai dampak dari pemulihan pasca Pandemi *Covid*-19. Selanjutnya, pada tahun 2030 diproyeksikan sebesar 5,9% -6,3%. Uraian tentang Laju Pertumbuhan Ekonomi ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya :

1) Tanah dan kekayaan alam;
2) Mutu tenaga kerja dan penduduk;
3) Barang modal dan tingkat teknologi;
4) Sistem sosial dan sikap masyarakat.

c. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta benda”. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebesar 14,72% menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 14,78% dan diproyeksikan pada tahun 2030 akan mengalami penurunan menjadi 11,50%-10,00%.

d. Indeks Gini

Indeks Gini *(Gini ratio)* atau koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila *gini ratio* bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya, pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini (*gini ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gini nya makin mendekati satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Tabel Perbandingan Nilai Koefisien Gini

NILAI KOEFISIEN	DISTRIBUSI PENDAPATAN
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Rumus Gini Ratio GR = 1-Σfi [Yi+ Yi-1]

Keterangan:

Fi : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Yi : jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila GR = 0, artinya ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila GR = 1, artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

e. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan;
2. Adanya peningkatan biaya produksi;
3. Bertambahnya uang yang beredar di masyarakat;
4. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran;
5. Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspetasi;
6. Kekacauan ekonomi dan politik;

Kondisi pencapaian laju Inflasi Kota Gunungsitoli awal tahun kinerja sebesar 3,10% masih dalam kondisi inflasi ringan dan diproyeksikan pada tahun 2030 akan mengalami masih dalam kondisi inflasi ringan dengan nilai 1,90%±1%.

f. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang mengukur rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap orang di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif meskipun tantangan global dan nasional. Sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian dan sektor jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita yang lebih baik. Peningkatan PDRB per kapita ini juga mencerminkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup, infrastruktur, dan sektor ekonomi di Kota Gunungsitoli. Selanjutnya, dalam periode ke depan ini diharapkan angka ini terus meningkat, seiring dengan upaya pengembangan sektor ekonomi yang lebih beragam dan pemerataan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.

g. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Kategori nilai akhir penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 8.3
Kategori Nilai Akhir Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90-100	Istimewa
2	A	> 80-90	Memuaskan
3	BB	> 70-80	Sangat Baik
4	B	> 60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
7	C	> 30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
8	D	> 0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 mendapatkan penilaian akhir untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori B, dan pada tahun 2030 diproyeksikan akan mendapat penilaian akhir untuk Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori BB (sangat baik).

h. Tingkat Pembangunan Infrastruktur

Tingkat Pembangunan Infrastruktur wilayah meliputi 6 (enam) indikator pembangunan yang diantaranya adalah :

1. Persentase Jalan Mantap;
2. Persentase Penduduk yang Mengakses Air Minum;
3. Persentase Rumah Layak Huni;
4. Persentase Kawasan non Kumuh Perkotaan;
5. Persentase Penduduk Mengakses Sanitasi Layak;
6. Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi.

i. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan isu global yang semakin mendesak. Peningkatan emisi GRK karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) di atmosfer. Hal ini menyebabkan dampak lingkungan, termasuk pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan pemanasan global dengan efek pantulan dan penyerapan gelombang panjang yang bersifat panas. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas ini menahan panas di atmosfer, sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi.

Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca yaitu aktivitas pembakaran bahan bakar fosil yang dihasilkan oleh batu bara, minyak bumi dan gas alam. Proses pembakaran ini menghasilkan CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer dan berkontribusi pada peningkatan efek rumah kaca. Penggunaan kendaraan bermotor, terutama yang berbahan bakar bensin dan diesel, menjadi penyumbang emisi CO2 terbesar dari sektor transportasi. Mesin pembakaran dalam kendaraan mengkonsumsi bahan bakar fosil dan menghasilkan emisi CO2 serta polutan lainnya ke udara. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor dan kurangnya infrastruktur transportasi berkelanjutan menjadi tantangan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Pada tahun 2030, persentase penurunan emisi gas rumah kaca diproyeksikan sebesar 30-31 persen.

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indicator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 tahun 2020. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Aspek kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek pelayanan umum; dan 3. Aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Gunungsitoli dijabarkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Target Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,30	73,30-73,70	73,70-74,10	74,10-74,50	74,50-74,90	75,10-75,40	75,40-75,90	75,40-75,90
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,69	3,9-4,3	4,3-4,7	4,7-5,1	5,1-5,5	5,5-5,9	5,9-6,3	5,9-6,3
3	Persentase penduduk miskin	Persentase	14,72	14,00-13,50	13,50-13,00	13,00-12,50	12,50-12,00	12,00-11,50	11,50-10,00	11,50-10,00
4	Indeks Gini	Indeks	0,277	0,277-0,275	0,275-0,273	0,273-0,271	0,271-0,268	0,268-0,265	0,265-0,262	0,265-0,262
5	Tingkat Inflasi	Persentase	3,10	2,90±1	2,70±1	2,50±1	2,30±1	2,10±1	1,90±1	1,90±1
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,23	2,23-2,25	2,25-2,27	2,27-2,29	2,29-2,31	2,31-2,33	2,33-2,35	2,33-2,35
7	Tingkat pembangunan infrastruktur	Persentase	64,63	64,66	65,56	66,64	67,72	68,79	69,69	69,69
8	PDRB AHB Kota Gunungsitoli	Rp. Juta	7.321,91	8.620,66	9.482,73	10.431,00	11.474,10	12.621,51	13.883,66	13.883,66
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	48,46	49-51	51-53	53-55	55-57	57-59	59-60	59-60
10	Kontribusi PDRB Pertanian,	Persentase	14,60	15,10-15,16	15,16-15,21	15,21-15,27	15,27-15,32	15,32-15,38	15,38-15,41	15,38-15,41

	Kehutanan dan Perikanan									
B. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1)	**Urusan Pendidikan**									
11	Rapor Pendidikan	Skor	60,50	62,50	65,00	67,50	70,00	75,00	80,00	80,00
12	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,76	8,77	8,80	8,85	8,90	8,95	9,00	9,00
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,81	13,82	13,84	13,85	13,86	13,87	13,87
14	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase	75,39	71,12	74,15	77,19	80,23	83,20	86,17	86,17
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persentase	98,68	99,05	99,31	99,58	99,84	100,00	100,00	100,00
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	20,46	31,11	40,01	44,45	48,89	53,34	57,78	57,78
2)	**Urusan Kesehatan**									
17	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,23	74,77	75,05	75,32	75,60	75,88	76,16	76,16

18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
19	Prevalensi Stunting	Persentase	4,82	4,77	4,72	4,68	4,63	4,58	4,08	4,08
20	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	3	3	3	2	2	2	2
21	Jumlah Kematian Bayi	Orang	15	20	19	18	17	16	15	15
22	Jumlah Kematian Balita	Orang	17	25	23	21	19	18	17	17
23	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
24	Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	25,85	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	70,00	70,00
26	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	35,00
3)	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
27	Persentase jalan kondisi Mantap	Persentase	58,87	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00

28	Persentase Penduduk yang mengakses sanitasi layak	Persentase	42,48	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	54,00
29	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	45,90	45,97	46,64	47,97	49,30	50,64	52,64	52,64
30	Persentase Penduduk yang mengakses air Bersih (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	42,83	58,26	58,56	59,10	59,65	60,20	60,74	60,74
31	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase	77,41	78,13	81,25	84,38	87,50	87,50	87,50	87,50
32	Persentase Ruang Terbuka Publik, Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase	66,65	67,10	67,70	68,30	68,90	69,50	70,10	70,10
33	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase	*	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
4)	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
34	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan	Persentase	83,69	83,97	84,25	84,55	84,84	85,13	85,42	85,42

	terjangkau									
35	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	73,00	73,40	73,80	74,20	74,60	75,00	75,40	75,40
36	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase	98,89	98,99	99,09	99,19	99,29	99,39	99,49	99,49
37	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	57,14	60,20	63,27	65,66	68,69	71,72	74,75	74,75
5)	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
38	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	199,01	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180	199-180
39	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	5.695	500	400	400	400	400	400	400
41	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00

42	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	99,19	99,29	99,39	99,49	99,59	99,69	100,00	100,00
43	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Tingkat waktu tanggap (response time rate) dalam layanan manajemen kebakaran	Persentase	94,12	94,62	95,12	95,62	96,12	96,62	97,12	97,12
46	Cakupan Jumlah dan jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	Persentase	74,40	74,90	75,40	75,90	76,40	77,40	77,40	77,40

6)	**Urusan Sosial**									
49	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Yang Tertangani	Persentase	83,00	86,00	90,00	92,00	95,00	98,00	98,00	98,00
50	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di Luar Panti	Persentase	13,19	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
51	Layanan Sosial yang tertangani	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7)	**Urusan Tenaga Kerja**									
52	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,67	3,25	3,0	2,75	2,50	2,25	2,0	2,0
53	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	27,49	27,50	27,75	28,00	28,25	28,50	29,00	29,00
54	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	18,74	20,00	25,00	30,00	35,00	50,00	50,00	50,00
55	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	45,83	50,00	54,17	58,33	62,50	66,67	70,83	70,83
56	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	29,59	30,57	31,56	32,54	33,53	34,52	35,50	35,50

57	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	91,67
8)	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
58	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,24	90,35	90,45	90,55	90,65	90,75	90,85	90,85
59	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,368	0,330	0,318	0,305	0,294	0,283	0,272	0,272
60	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Persentase	50,00-63,74	50,00-63,74	50,00-63,74	50,00-63,74	50,00-63,74	63,75-77,24	63,75-77,24	63,75-77,24
61	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	54,20	54,20	54,30	54,40	54,50	54,60	55,00	55,00
62	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	601,00	601,00	601,00
9)	**Urusan Pangan**									
63	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,40	76,00	79,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
10)	**Urusan Lingkungan Hidup**									
64	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,37	78,70	78,87	79,04	79,21	79,38	79,55	79,55

65	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	61,10	62,95	63,58	64,22	64,86	65,51	66,16	66,16
66	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase	23	25,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	35,00
67	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase	*	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	30-31	30-31
11)	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
68	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	82,00	85,00	87,00	89,00	90,00	92,00	93,00	93,00
69	Persentase Dokumen kependudukan yang diterbitkan	Persentase	93,86	67,75	68,75	69,75	70,50	71,00	71,50	71,50
70	Persentase Pemenuhan Informasi Data Kependudukan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12)	**Urusan Pemberdayaan**									

	Masyarakat dan Desa									
71	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,647	0,657	0,667	0,677	0,687	0,697	0,707	0,707
72	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	98	98	98	98	98	98	98	98
73	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	0	0	1	5	10	15	20	20
74	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
13)	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
75	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,71	64,71	64,73	64,75	64,77	64,79	65,00	65,00
76	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri Plus	Persentase	80,19	81,18	82,17	83,16	84,15	85,14	86,13	86,13
14)	**Urusan Perhubungan**									
77	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	58,55	63,51	68,80	72,24	76,57	83,47	90,98	90,98

78	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	1.327	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750	1.750
79	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	50,76	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
15)	**Urusan Komunikasi dan Informatika**									
80	Persentase OPD menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	Persentase	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,000
81	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	*	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
82	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Persentase	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00

	Daerah									
16)	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
83	Rata-rata pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Persentase	8,35	8,44	8,52	8,61	8,69	8,78	8,87	8,87
84	Peningkatan Modal Usaha Mikro Melalui Badan Layanan Umum daerah (BLUD)	Rp. Miliar	*	*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
85	Persentase koperasi Aktif	Persentase	16,13	60,66	62,05	63,47	64,92	66,41	66,41	66,41
17)	**Urusan Penanaman Modal**									
86	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	-13,52	5	5	5	5	5	5	5
87	Jumlah Investasi	Miliar	40,97	43,02	45,17	47,43	49,80	52,29	54,90	54,90
88	Jumlah investor	Investor	5	6	7	8	9	10	11	11
89	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	Persentase	94,21	94,96	95,71	96,46	97,21	97,96	98,26	98,26
18)	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**									

90	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
91	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00
92	Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda	Kegiatan	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00
19)	**Urusan Statistik Daerah**									
93	Persentase kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar	Persentase	10,00	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
20)	**Urusan Persandian**									
94	Persentase OPD menggunakan Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	5,00	5,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
21)	**Urusan Kebudayaan**									
95	Indeks budaya lokal	Indeks	68,85	69,52	70,18	70,85	71,52	72,18	72,85	72,85
96	Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
97	Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Persentase	77,14	78,14	79,14	80,14	81,14	82,14	83,14	83,14

98	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persentase	29,41	30,41	31,41	32,41	33,41	34,41	35,41	35,41
22)	**Urusan Perpustakaan**									
99	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,33	8,35	8,37	8,39	8,42	8,42	9,33	9,33
100	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	45,87	50,87	55,87	60,87	65,87	70,87	75,87	75,87
23)	**Urusan Kearsipan**									
101	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase	48,73	48,73	48,83	48,93	49,53	50,63	51,23	51,23
102	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	50,00	50,00	50,00	50,00	57,50	60,00	62,50	62,50
24)	**Urusan Kelautan dan Perikanan**									
103	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00	107,00	107,00
104	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persentase	25,68	30,68	35,68	40,68	45,68	50,68	55,68	55,68

105	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	Ton	7.210	7.354	7.501	7.651	7.728	7.805	7.961	7.961
106	Jumlah Hasil Perikanan yang Dipasarkan Ke Luar Daerah	Ton/Tahun	460	460	460	507	507	559	587	587,00
25)	**Urusan Pariwisata**									
107	Proporsi Usaha Ekonomi Kreatif	Persentase	5,30	5,45	5,50	5,55	5,60	5,65	5,70	5,70
108	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)	Persentase	4,14	5,12	5,33	5,54	5,75	5,96	6,17	6,17
109	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	58.564	60.000	61.000	62.000	63.000	64.000	65.000	65.000,00
110	Tingkat hunian akomodasi	Persentase	0	38,17	38,94	39,71	40,51	41,32	42,15	42,15
26)	**Urusan Pertanian**									
111	Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	14,45	14,60	14,80	15,00	15,20	15,40	15,60	15,60

112	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00
113	Persentase peningkatan produksi pertanian	Persentase	78	83,00	87,00	90,00	93,00	97,00	100,00	100,00
114	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
27)	**Urusan Perdagangan**									
115	Persentase Pengembangan Pasar	Persentase	45,00	47,25	49,61	52,09	54,70	57,43	60,30	60,30
116	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase	77,78	81,01	84,24	87,47	90,70	93,93	97,16	97,16
117	Persentase dan ketersediaan barang pokok	Persentase	95,26	97,80	99,10	99,60	99,83	99,93	99,97	99,97
28)	**Urusan Perindustrian**									
118	Kontribusi sektor lapangan usaha industri terhadap PDRB	Persentase	0,19	0,21	0,22	0,24	0,25	0,28	0,29	0,29
119	Persentase Bina Kelompok IKM	Persentase	10,36	11,08	12,15	13,34	14,87	16,44	16,44	16,44
29)	**Urusan Pendukung Sekretariat Daerah**									
120	Indeks Reformasi	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB

	Birokrasi									
121	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persen	55	60	63	65	70	72	75	75
122	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,39	4,40	4,41	4,43	4,44	4,45	4,47	4,47
123	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,26	84,00	86,20	86,60	87,25	89,00	90,00	90,00
124	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,14	2,28	2,35	2,42	2,49	2,56	2,59	2,59
30)	**Urusan Pendukung Sekretariat DPRD**									
125	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
31)	**Urusan Penunjang Perencanaan**									
126	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	*	84,14	84,39	84,47	84,74	84,96	85,19	85,19
127	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase	94,19	94,66	95,13	95,61	96,09	96,57	97,05	97,05
32)	**Urusan Penunjang Keuangan**									
128	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00

	(IPKD)									
129	Indeks kesesuain dokumen perencanaan dan penganggaran	Indeks	10,98	11,75	11,80	11,85	11,90	11,95	12,00	12,00
130	Indeks pengalokasian belanja dalam APBD	Indeks	19,65	19,67	19,69	19,71	19,73	19,75	19,77	19,77
131	Indeks transparansi pengelolaan keuangan	Indeks	15	15,25	15,35	15,50	15,75	16,00	16,25	16,25
132	Indeks kondisi keuangan daerah	Indeks	3,14	3,20	3,50	3,80	4,00	4,50	5,00	5,00
133	Opini BPK atas laporan keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
134	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah mengelola BMD dengan baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100
33)	**Urusan Penunjang Pendapatan Daerah**									
135	Tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah	Persentase	-13	-5	2	4	5	6	6	6
136	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan daerah	Persentase	3,27	3,50	3,75	4,00	4,50	4,75	5,00	5,00

137	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	80
138	Persentase penerapan sistem informasi pendapatan berbasis digital	Persentase	50	55	60	65	70	75	80	80
34)	**Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**									
139	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74,78	74-75	75-76	76-77	78-79	79-80	80-81	80-81
140	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	13,88	13,90	13,91	13,92	13,94	13,95	13,96	13,96
141	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persentase	98,78	98,88	98,90	98,95	98,98	98,99	99,00	99,00
142	Persentase pegawai yang tidak melanggara disiplin	Persentase	98,78	98,79	98,80	98,82	98,84	98,85	98,90	98,90
143	Persentase layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	80	85	86	87	88	89	90	90
35)	**Urusan Penunjang Riset dan Inovasi**									
144	Indeks Inovasi Daerah	Angka	40,34	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00	52,00

145	Persentase hasil riset/penelitian dan inovasi daerah	Persentase	*	17,00	35,00	53,00	73,00	86,00	100,00	100,00
36)	**Urusan Penunjang Pengawasan**									
146	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase	2,9	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
147	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Persentase	3,000	3,025	3,050	3,075	3,100	3,125	3,150	3,150
148	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77 - 79	77 - 79	78 – 80	78 - 80	78 - 80	79 - 81	79 - 81	79 - 81
149	Kapabilitas APIP	Level	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi	Ter integrasi
37)	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**									
150	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
151	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	80,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00	98,00	98,00
38)	**Urusan Penunjang Pemerintahan**									
152	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00

153	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	Persentase	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
154	Persentase kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi pengelolaan dokumen desa	Persentase	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
155	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C. DAYA SAING DAERAH										
156	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	*	1,0-1,5	1,5-2,0	2,0-2,5	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5-4,0	3,5-4,0
157	Pengeluaran Perkapita/Tahun	Rp. Juta	9,056	9,509	9,984	10,483	11,008	11,558	12,136	12,136

Indikator kinerja daerah di atas selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	IPM = $^1/_3$ [$X_{(1)}$ + $X_{(2)}$ + $X_{(3)}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $^2/_3$(indeks melek huruf) + $^1/_3$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)}$= $X_{(i)}$ - $X_{(i)min}$ / [$X_{(i)maks}$ - $X_{(i)min}$] Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun. Rumus : (PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100
3	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Rumus : PPM = Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Keterangan: PPM: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional JPM: Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu JP: Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
4	Indeks Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi
5	Tingkat Inflasi	Persentase	Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Tingkat Inflasi (%) = Indeks Harga Konsumen Tahun n dikurangi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya dibagi Indeks Harga Konsumen Tahun sebelumnya x 100
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Rumus: Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain, yang selanjutnya akan dirilis oleh Kemenpan-RB
7	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, Persentase sarana perhubungan kondisi baik)
8	PDRB ADHB Kota Gunungsitoli	Rp. Juta	Berita Resmi Statistik BPS

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	Berita Resmi Statistik BPS
10	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	Berita Resmi Statistik BPS
11	Rapor Pendidikan	Skor	Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan. Data diambil dari Asesmen Nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survey Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Nilai rapor Pendidikan ini selanjutnya akan dikeluarkan oleh Kemendikdas
12	Rata Rata Lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	$EYS_a^t = FKx\sum_{i=a}^{n}\frac{E_i^t}{P_i^t}$ Dimana: EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur *a* di tahun *t* ; E_i^t : Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t* ; P_i^t : Jumlah penduduk usia *i* pada tahun *t* ; *i* : Usia (a, a+1,...,n) ; *FK* : Faktor koreksi.
14	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase	Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persentase	Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah
17	Umur Harapan Hidup	Tahun	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			Rumus: Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase	Jumlah peserta JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan data kerentanan Rumus : data cakupan dilkeluarkan oleh BPJS Kesehatan
19	Prevalensi Stunting	Persentase	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005 Rumus : Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah balita (0-59 bulan) yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 100%
20	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Rumus : Jumlah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, abortus, dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama DIKALI 100.000 KH
21	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Angka Kematian Bayi (AKB) adalah: Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:■70 sangat tinggi,■40 – 70 tinggi,■20-39 sedang,■dan 20 rendah Rumus: .Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000
22	Angka Kematian Balita (AKABa)	Per 1.000 Balita	Angka Kematian Balita (AKBa) adalah:Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut:■≥140 = sangat tinggi,■71AKBa 140 = tinggi,■20AKBa 70 = sedang,■≤20= rendah

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			Rumus : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000
23	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persentase	Bagian dari perkiraan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati. Rumus : Jumlah penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis yang ditangani DIBAGI jumlah keseluruhan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis DIKALI 100%
24	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Persentase	Jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi paripurna DIBAGI jumlah seluruh Puskesmas DIKALI 100%
25	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk Rumus : jumlah penduduk. Jumlah penerima pemeriksaan Kesehatan gratis pada semua kelompok usia dibagi total penduduk, dikalikan 100%.
26	Peresentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	Proporsi Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non perkotaan) Rumus : Jumlah puskesmas terintegrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%
27	Persentase Jalan Mantap	Persentase	((Total jalan dalam kondisi baik+ Total jalan dalam kondisi sedang) / Panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli) x 100
28	Persentase Penduduk yang mengakses sanitasi layak	Persentase	(Jumlah Penduduk yang mengakses sanitasi layak / Jumlah Penduduk) x 100
29	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	Persentase	(Total Panjang Saluran Irigasi Tertangani dalam Kondisi Baik/Total Panjang Rencana Penanganan Saluran Irigasi) x 100
30	Persentase Penduduk yang mengakses air bersih (perpipaan dan bukan perpipaan)	Persentase	(Total penanganan instalasi dan jaringan air bersih /Total kebutuhan Saluran Rumah di Kota Gunungsitoli) x 100
31	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persentase	Persentase penerbitan konformasi KKPR adalah capaian tahunan dari jumlah penerbitan Konfirmasi KKPR dibandingkan dengan jumlah penerbitan seluruh produk KKPR Rumus : Persentase jumlah penerbitan Konfirmasi KKPR terhadap jumlah penerbitan KKPR dalam satu tahun

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
32	Persentase Ruang Terbuka Publik, Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase	(Jumlah Ruang Terbuka Publik, Bangunan dan Lingkungan yang Tertata DIBAGI Ruang Terbuka Publik, Bangunan dan Lingkungan yang Ada) x 100
33	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase	(Persentase Jasa Konstruksi pada periode akhir - Persentase Jasa Konstruksi pada periode awal) / Persentase Jasa Konstruksi pada periode awal DIKALI 100
34	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Rumus : (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau / Jumlah rumah tanga) x 100
35	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persentase	(Total penanganan drainase dalam kondisi baik/Panjang kebutuhan drainase di Kota Gunungsitoli) x 100
36	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase	(kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani/total kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kota Gunungsitoli) x 100
37	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	(Jumlah bangunan Gedung dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan bangunan Gedung) x 100
38	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	IRB = (P x E x V) / C Keterangan: P (Probabilitas) = Probabilitas kejadian bencana E (Eksposur) = jumlah asset atau populasi yang terdapat bencana V (vulnerabilitas) = Tingkat kerentanan asset atau populasi terhadap dampak bencana C (Kapasitas) = Kemampuan untuk menghadapi dan pulih dari bencana IRB selanjutnya dirilis secara resmi oleh BNPB
39	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	(Tingkat Keamanan+Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA+Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS) / 3
40	Persentase gangguan Trantibum yang dapat	Persentase	(Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / jumlah gangguan trantibum) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
	diselesaikan		
41	Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA	Persentase	(Jumlah pelanggaran PERDA yang diselesaikan / jumlah pelanggaran PERDA) x 100
42	Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS	Persentase	(Jumlah Polisi Pamong Praja PNS / Target Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja PNS) x 100
43	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persentase	(Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK) x 100
44	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	(Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / jumlah kejadian) x 100
45	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	(Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran / jumlah kejadian) x 100
46	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Yang Tertangani	Persentase	(Jumlah Pemerlu Atensi Sosial (PAS) Yang Tertangani / jumlah pemerlu antensi sosial (PAS) yang ada) x 100
47	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di Luar Panti	Persentase	(Penanganan pemerlu atensi social (PAS) di luar panti / populasi penduduk miskin) x 100
48	Layanan Sosial yang tertangani	Persentase	(Jumlah layanan sosial yang tertangani / jumlah permohonan pelayanan sosial) x 100
49	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	(Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100
50	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	(Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan / Jumlah PDRB) x 100
51	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	(Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan / jumlah tenaga kerja) x 100
52	Persentase Sarana Perdagangan yang	Persentase	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / jumlah seluruh sarana perdagangan) x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
	Ditingkatkan Kualitasnya		
53	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	(Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku / Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)) x 100
54	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap stabil dan ketersediaan barang tersebut di pasar. Ini mencerminkan sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap berada dalam kisaran yang dapat diterima dan seberapa banyak barang tersebut tersedia bagi konsumen. Rumus : ((harga maksimum – harga aktual) / (harga maksimum – harga minimum)) x 100
55	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Rumus : IPG – IPM Perempuan / IPM laki-laki
56	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	IKG terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Rumus : Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic Menghitung indeks masing – masing dimensi Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Menghitung Indeks Kesetaraan Gender Menghitung Indeks Ketimpangan Gender
57	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Persentase	Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Adalah penghargaan yang diberikan Pemrintah kepada pemerintah daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian Pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan.
58	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Indeks perlindungan anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			Rumus : Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klister.
59	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten atau kota memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak. KLA merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan yang memadai sesuai dengan hak-haknya.
60	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu ketersediaan dan konsumsi pangan Rumus : dirilis oleh Badan Pangan Nasional
61	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus : IKLH Nasional IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)
62	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persentase	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Rumus : Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: Cara (1) SO=ST MFPA+RDP Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)
63	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yg diterbitkan pemerintah kabupaten/kota yang ditangani}}{\text{Total Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota}} \times 100\%$

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
64	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase	(Penurunan Emisi GRK=Emisi Tahun Dasar−Emisi Tahun Pelaporan Penurunan Emisi) x 100
65	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	$\text{SKM} = \frac{\text{Tolal dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \text{ x Nilai Penimbang}$
66	Persentase Dokumen kependudukan yang diterbitkan	Persentase	$\frac{\left(\frac{Jlh\ Persentase\ Kepemilikan\ IKD\ dan\ KIA}{2} + \frac{Jlh\ Persentase\ Penerbitan\ 4\ Dokumen\ Capil}{4}\right)}{2}\ x\ 100$
67	Persentase Pemenuhan Informasi Data Kependudukan	Persentase	$\frac{Jlh\ Permintaan\ Informasi\ data\ Kependudukan\ yang\ dipenuhi}{Jlh\ Permintaan\ Informasi\ data\ kependudukan}\ x\ 100$
68	Indeks Desa Membangun	Indeks	**IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)** IDM : Indeks Desa Membangun IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)
69	Persentase Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	(Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital / jumlah desa) x 100
70	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran program pembangunan kualitas keluarga yang ditunjukan melalui dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			Rumus : iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, di mana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama
71	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri Plus	Persentase	Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) yang sering disebut Kampung KB adalah suatu satuan wilayah setingkat kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan Masyarakat mellaui integrasi dan konvergensi berbagai program Pembangunan keluarga, kependudukan dan Pembangunan lainnya dan berfungsi sebagai wadah untuk pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam berbagai dimensi. Rumus : (Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri Plus / jumlah desa/kelurahan) x 100
72	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem transportasi dapat beroperasi dengan risiko minimal terhadap kecelakaan, cedera, dan kerugian lainnya. Definisi ini biasanya mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi keselamatan suatu moda transportasi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Rumus : (jumlah kecelakaan/jumlah kendaraan) x 100
73	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	Jumlah kendaraan yang laik jalan/jumlah kendaraan
74	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	(Jumlah perlengkapan jalan yang telah terpasang/jumlah kondisi ideal perlengkapan jalan) x 100
75	Persentase OPD menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	Persentase	(Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah/jumlah keseluruhan OPD) x 100
76	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	$\frac{Jumlah\ Masyarakat\ sasaran\ yang\ mengetahui}{Jumlah\ total\ Masyarakat\ sasaran} \times 100\%$

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
77	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase	(Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah/Jumlah keseluruhan perangkat daerah) x 100
78	Rata-rata pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Persentase	$\frac{\text{Jumlah UKM Tahun N dikurang Tahun N-1}}{\text{Tahun N-1}} \times 100\%$
79	Peningkatan Modal Usaha Mikro Melalui Badan Layanan Umum daerah (BLUD)	Rp. Miliar	Jumlah penyertaan modal untuk dana bergulir
80	Persentase koperasi Aktif	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Kopersi Keseluruhan}} \times 100\%$
81	Realisasi Investasi	Miliar	Realisasi Investasi adalah nilai investasi yang telah secara nyata diwujudkan oleh pelaku usaha (menengah dan besar) dalam memulai dan/atau mengembangkan kegiatan usahanya serta tercatat pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). Rumus : Total LKPM tahun n
82	Jumlah investor	Investor	Jumlah Investor adalah seluruh pelaku usaha menengah (Rp. 5 M < Modal ≤ 10 M), dan pelaku besar (Modal > Rp. 10M), baik PMA maupun PMDN yang berasal dari luar maupun dalam Kota Gunungsitoli yang melakukan penanaman modal melalui kegiatan usaha di wilayah Kota Gunungsitoli. Rumus : Jlh Investor = Jlh Investor Baru + Naik Status Menjadi Menengah Besar
83	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	Persentase	Persentase IKM adalah hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikonversi menjadi persentase sehingga menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Gunungsitoli

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
	pelayanan perizinan		Rumus: IKM = Total Nilai IKM per unsur x 25
84	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	(Jumlah organisasi pemuda aktif / Jumlah keseluruhan organisasi pemuda) x 100
85	Jumlah Prestasi Olaharga	Cabang Olahraga	Jumlah prestasi olahraga yang diraih
86	Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda	Kegiatan	Jumlah kegiatan organisasi pemuda yang terbentuk dan aktif
87	Persentase kegiatan statsitik sektoral yang memenuhi standar	Persentase	(Jumlah kegiatan statsitik sektoral yang memenuhi standar/jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral) x 100
88	Persentase OPD menggunakan Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	(Jumlah OPD menggunakan Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah/ Jumlah seluruh OPD) x 100
89	Indeks budaya lokal	Indeks	$\frac{\text{Persentase pelaksanaan kegiatan Festival seni dan budaya dlm 1 thn} + \text{Persentase jlh sanggar seni dan budaya} + \text{Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{3} \; x$ 100%
90	Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun	Persentase	(Realisasi Pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun / Rencana Pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 Tahun) x 100 Catatan: direncanakan 4 kali dlm setahun
91	Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Persentase	(Jumlah Sanggar Seni dan Budaya ada / Rencana Jumlah Sanggar Seni dan Budaya) x 100
92	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Persentase	(Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan / Jumlah Keseluruhan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya) x 100
93	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =$\sum UPLM/ALM$ X 100 UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan ALM = aspek listerasi masyarakat
94	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survey / Kajian kegemaran membaca masyarakat
95	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase	T = (a+i+s+j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
96	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	Jumlah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah/Jumlah Perangkat daerah yang melakukan pengawasan x 100%
97	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase	NTN adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus. NTN kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTN sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.
98	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Persentase	NTPI merupakan rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTPI lebih dari 100 artinya pembudidaya ikan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus . NTPI kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTPI sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.
99	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota	Ton	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dalam 1 tahun
100	Jumlah Hasil Perikanan yang Dipasarkan Ke Luar Daerah	Ton/Tahun	Jumlah Hasil Perikanan yang Dipasarkan Ke Luar Daerah per tahun
101	Proporsi Usaha Ekonomi	Persentase	Σ PDRB 17 sub sektor ekonomi kreatif regional x 100

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
	Kreatif		PDRB
102	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB lapangan usaha pariwisata (penyediaan akomodasi makan dan minum)	Persentase	Akumulasi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)
103	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah kunjungan wisata selama 1 (satu) tahun
104	Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	Akumulasi Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
105	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persentase	Persentase Ketersediaan Pangan Utama dalam 1 tahun
106	Persentase peningkatan produksi pertanian	Persentase	Jumlah produksi padi / Jumlah luas panen
107	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani	Persentase	(jumlah kelompok tani yang dibina/jumlah total kelompok tani) x 100
108	Persentase Pengembangan Pasar	Persentase	(jumlah pasar yang dikembangkan / jumlah seluruh pasar) x 100
109	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase	(Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani / jumlah pengaduan konsumen) x 100
110	Persentase ketersediaan barang pokok	Persentase	Jumlah ketersediaan barang pokok / Jumlah kebutuhan x 100%
111	Kontribusi sektor lapangan usaha industri terhadap PDRB	Persentase	Data dirilis oleh BPS
112	Persentase Bina Kelompok IKM	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Kelompok IKM yang dibina}}{\text{Total Kelompok IKM}} \times 100\%$
113	Indeks reformasi birokrasi	Predikat	Data dirilis oleh Kemenpan-RB

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
114	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	(Perencanaan Kinerja x 30%) + (Pengukuran Kinerja 25%) + (Pelaporan Kinerja x 15%) + (Evaluasi Internal x 10%) + Capaian Kinerja x 20%)
115	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Data dirilis oleh KEMENPAN-RB
116	Indeks Kepuasan Masyarakat (Setda)	Indeks	Hasil survei internal Sekretariat Daerah ; Rumus = (Jumlah bobot yang disurvey / Jumlah unsur yang disurvey) x 100
117	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	IKAD menjembatani data kondisi akses keuangan di daerah dengan perumusan kebijakan pemerintah daerah serta memastikan kebijakan daerah selaras dengan target nasional, mengidentifikasi kesenjangan dan memperkuat peran tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) untuk meningkatkan inklusi keuangan.
118	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	Survey Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Internal/Eksternal/Mandiri)
119	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	IPPD = (sinergi x 50%) + (kualitas x 20%) + (konsistensi x 30%) Keterangan: Sinergi = (jumlah program dalam dokumen tahun berkenan/jumlah program dalam dokumen RPJMD tahun berkenan) x 100 Kualitas = (jumlah program prioritas daerah dalam dokumen RKPD tahun n/jumlah program dalam dokumen RKPD tahun n) x 100 Konsistensi = (total belanja APBD Tahun n / jumlah pagu RKPD tahun n) x 100
120	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase	((Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Dokumen RKPD Tahun Berkenan) / (Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Dokumen RPJMD Tahun Berkenan)) x 100%
121	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Hasil pengukuran terhadap : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Kualitas anggaran belanja dalam APBD Transparansi pengelolaan keuangan daerah Penyerapan anggaran Kondisi keuangan daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (Permendagri 19 Tahun 2020)
122	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Gabungan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN (Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019)

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
123	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Data dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri
124	Persentase hasil riset/kajian pembangunan	Persentase	(jumlah riset/kajian yang dihasilkan/jumlah riset/kajian yang ditetapkan) x 100
125	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persentase	Hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
126	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	Kerangka pengukuran atas kemajuan segala Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam organisasi. Fokusnya terutama pada pencegahan seperti memperbaiki sitem birokrasi, transparansi, akuntabilitas dan integritas.
127	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	Survey nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur Tingkat integritas dalam penyelenggaraan layanan publik.
128	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	(Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan / Jumlah konflik sosial yang diterima) x 100
129	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Persentase	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan / julah target peserta yang ditetapkan x 100 % Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan : data realisasi orang/ kelompok yang terlibat dalam sosialisasi, seminar atau Pendidikan kebangsaan. Jumlah target peserta yang ditetapkan : target yang direncanakan dalam renja/renstra pada tahun berjalan.
130	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	(Jumlah persentase kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang Tingkat Kecamatan + fasilitasi pengelolaan dokumen desa + penyelesaian pengaduan masyarakat) / 3
131	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	Persentase	IKM = (total dari nilai persepsi per unsur/toral unsur yang terisi) X nilai penimbang Nilai penimbang = (jumlah bobot/jumlah unsur) Nilai IKM = (total nilai IKM per unsur X 25)
132	Persentase kepuasan masyarakat terhadap fasilitasi pengelolaan dokumen desa	Persentase	IKM = (total dari nilai persepsi per unsur/toral unsur yang terisi) X nilai penimbang Nilai penimbang = (jumlah bobot/jumlah unsur) Nilai IKM = (total nilai IKM per unsur X 25)
133	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase	(Jumlah pengaduan Masyarakat yang diselesaikan/jumlah seluruh pengaduan Masyarakat) x 100
134	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	IDSD = ∑ (Wi x Xi) Keterangan :

NO	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
-1	*-2*	*-3*	*-4*
			Wi = bobot untuk setiap indikator Xi = Nilai untuk setiap indikator yang telah dinormalisasi Indikator yang umum digunakan: Ekonomi = pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan investasi Infrastruktur = Kualitas jalan, Pelabuhan, bandara dan fasilitas publik lainnya SDM = kualitas Pendidikan, Kesehatan dan keterampilan tenaga kerja Inovasi = kemampuan inovasi, penelitian, dan pengembangan Pemerintahan = efektivitas pemerintahan, birokrasi dan regulasi
135	Pengeluaran Perkapita/Tahun	Rp. Juta	Data dirilis oleh BPS

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli dalam lima tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Gunungsitoli untuk turut andil dalam pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kota Gunungsitoli.

A. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

1. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen- dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

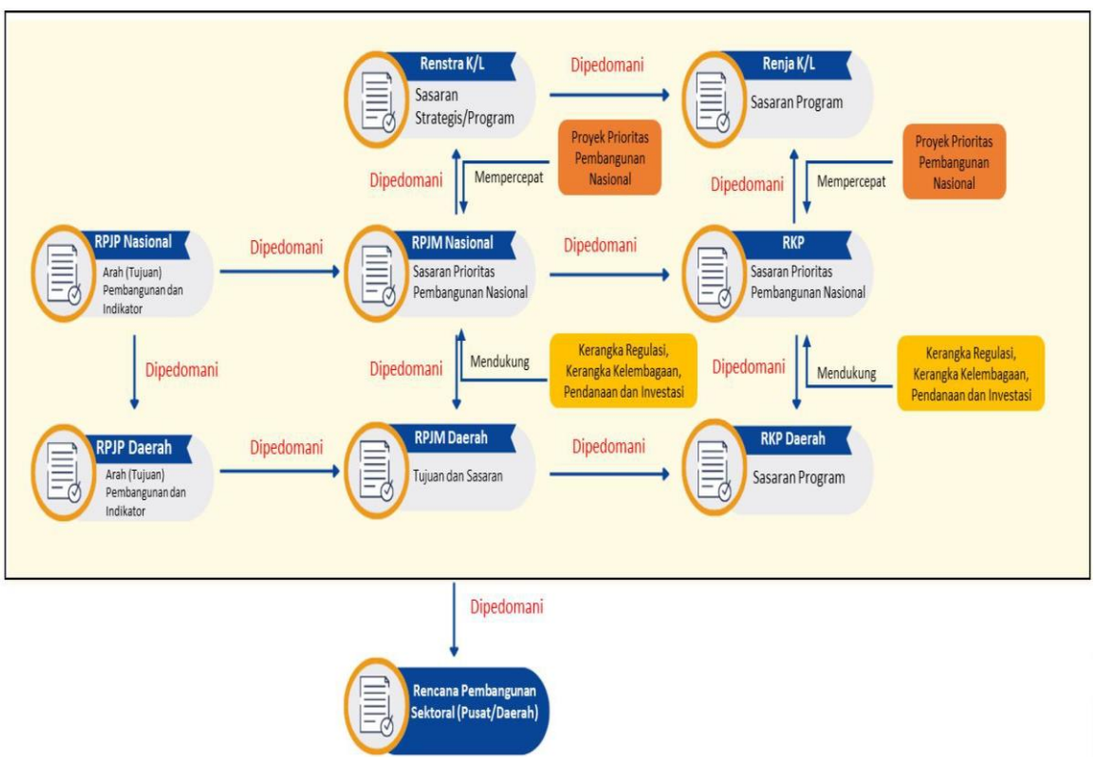

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan RPJMN dan RPJMD Provinsi beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

1. RPJMD merupakan rencana strategis 5 tahunan daerah bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045.
2. Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
3. Tujuan dan sasaran pada RPJMD berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJMD Nasional dan Provinsi. Selain itu RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat Kabupaten/Kota
4. Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.
5. Sasaran program RKPD berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional dan provinsi. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan

sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

B. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah.

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses assessment risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

Gambar 5.2
Kerangka Kerja MRPN

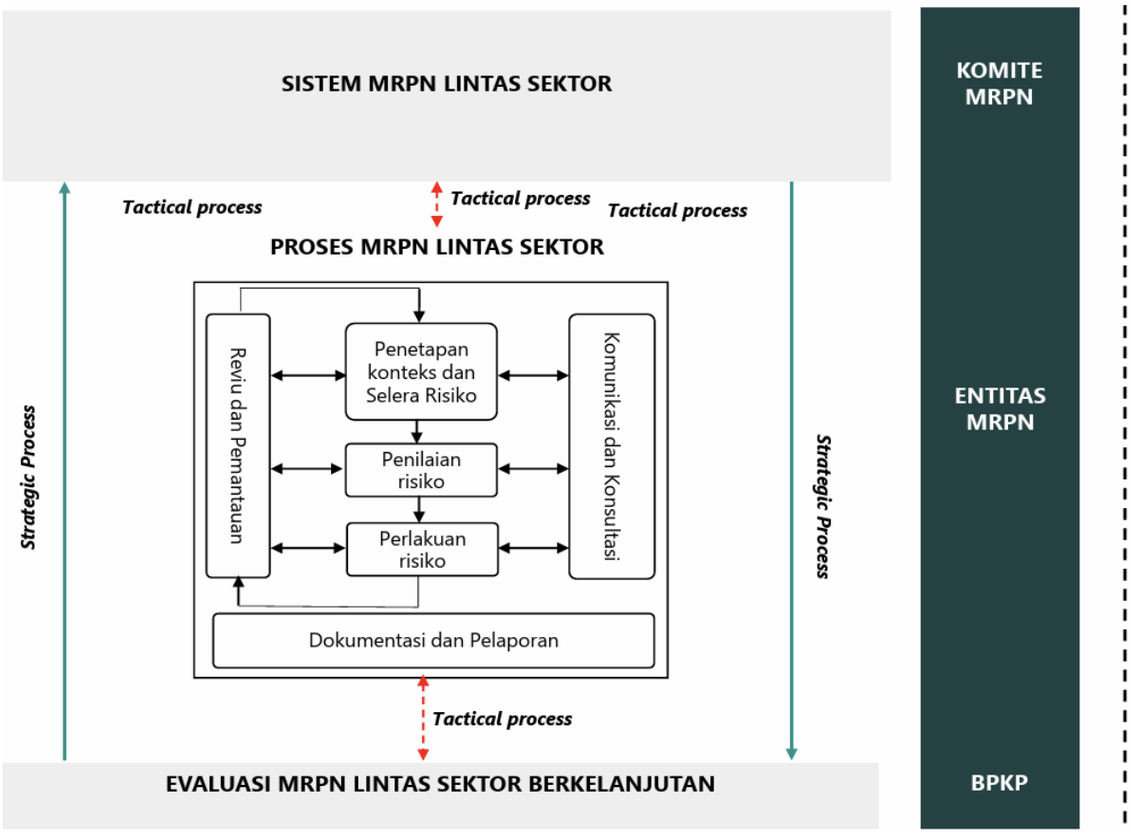

Penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD dan RPJM Nasional dan Provinsi. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5.3
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD

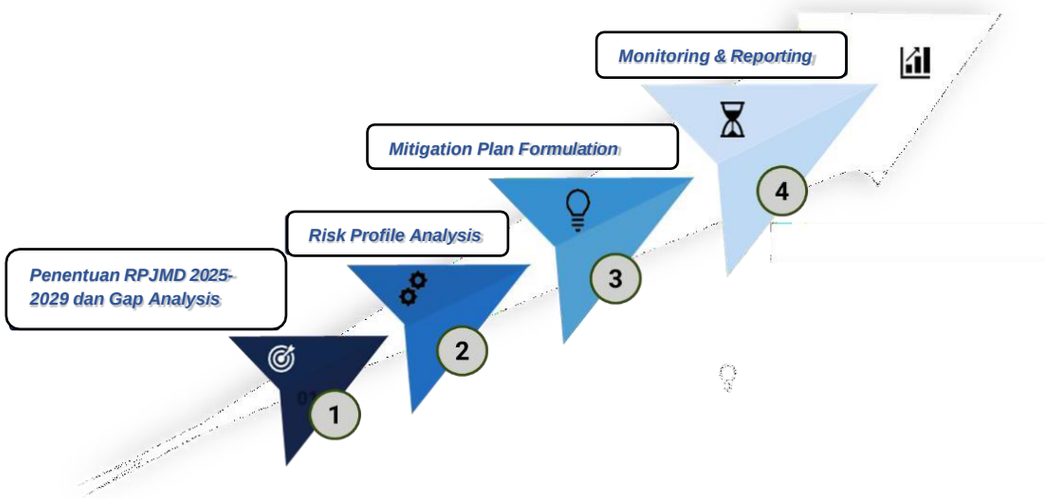

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

1. Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kota Gunungsitoli menuju pencapaian visi **"Gunungsitoli Hebat"**. Hal tersebut perlu dilakukan melalui analisis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.
2. Risk Profile Analysis dilakukan dengan proses identifikasi dan assessment risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan assessment risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan dampak serius (severity) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.

3. Penyusunan Rencana Mitigasi (Mitigation Plan Formulation) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
4. Melakukan monitoring and reporting untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kota Gunungsitoli periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
2. Pengendalian pelaksanaan

   Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek (tahunan). Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut

menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

C. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

D. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKP Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

E. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” dan partisipasi yang bermakna. Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi "**Gunungsitoli Hebat**" memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan branding dengan marketing digital dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak; (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset, tukar guling aset hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik

dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Kota Gunungsitoli untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu **“Gunungsitoli Hebat”**. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
3. Keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan
4. Peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Gunungsitoki serta menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Kota Gunungsitoli sangat diharapkan dalam mewujudkan Gunungsitoli Hebat. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.